



JASAMARGA BALI TOL
Highway Corporation

LAPORAN
TAHUNAN
ANNUAL REPORT
PT JASAMARGA BALI TOL
2016



HIGHWAY TO PARADISE ...

**HIGHWAY TO
PARADISE ...**





**JALAN TOL
BALI MANDARA**



Daftar isi



JASAMARGA BALI TOL
Highway Corporation

07 Profil Perusahaan

Identitas Perusahaan, 09
Sekilas Jasamarga Bali Tol, 11
Pembentukan Perusahaan dan Pemegang Saham, 15
Visi dan Misi, 20
Struktur Organisasi, 22
Strategi Perusahaan, 24
Tata Nilai Perusahaan, 25
Peristiwa Penting, 26
Penghargaan dan Sertifikasi, 38

41 Ikhtisar Keuangan

Ikhtisar Keuangan, 43
Pencapaian Keuangan, 44
Ikhtisar Operasional, 45
Ikhtisar Saham, 46
Laporan Laba Rugi Komprehensif, 47
Laporan Arus Kas, 48
Laporan Posisi Keuangan, 49

51 Laporan Manajemen

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, 53
Profil Dewan Komisaris, 57
Sambutan Direktur Utama, 65
Profil Direksi, 68

73 Laporan Kegiatan

Pengoperasian dan Pemeliharaan, 75
Pengadaan Tanah, 76
Sengketa Klaim Tiang Pancang, 77
Rencana Investasi, 78
Kinerja Keuangan, 79
Perjanjian Kolaborasi, 80
Prospek Usaha Perseroan ke Depan, 81
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, 82
Penutupan Jalan Tol dalam rangka Nyepi, 83
Rapat Umum Pemegang Saham, 84

91 Analisa Pembahasan Manajemen

Laporan Aset, 92
Laporan Liabilitas, 100
Ekuitas, 109
Kinerja Keuangan, 110
Laporan Arus Kas, 117

119 Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan, 121
Organ Tata Kelola Perusahaan, 122
Kegiatan Manajemen Untuk Mendukung Kegiatan Perseroan, 123

125 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung Jawab Sosial, 128
Tanggung Jawab Lingkungan, 129

131 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Komposisi Karyawan, 134
Program SDM, 135

139 Data Perusahaan

Susunan Pemegang Saham, 141
Daftar Kunjungan, 142

147 Tanggung Jawab Manajemen

Kontrak Manajemen, 148
Realisasi KPI, 152
Tanggung Jawab Manajemen, 157

159 Laporan Keuangan



PROFIL PERUSAHAAN

- 09** Identitas Perusahaan
- 11** Sekilas Jasamarga Bali Tol
- 15** Pembentukan Perusahaan dan Pemegang Saham
- 20** Visi dan Misi
- 22** Struktur Organisasi
- 24** Strategi Perusahaan
- 25** Tata Nilai Perusahaan
- 26** Peristiwa Penting
- 38** Penghargaan dan Sertifikasi





IDENTITAS Perusahaan

Nama Perusahaan PT Jasamarga Bali Tol

Alamat Kantor

Kawasan Ikat Plaza
Jln. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 505,
Pemogan 80221, Denpasar - Bali

Telp. : + 62 361 725326

Faks. : + 62 361 725327

Tanggal Pendirian

22 Agustus 2011

Akta Pendirian Perusahaan

Nomor: 2/2011, oleh Notaris Paulina Siti
Suprimulyanti, S.H.

Pengesahan Pendirian

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI Nomor : AHU-57740.AH.01.01.
Tanggal 25 November 2011

Modal Dasar

Rp. 745 miliar

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Rp. 745 miliar

Kepemilikan Saham

PT Jasa Marga (Persero) Tbk	55,00%
PT Pelindo III (Persero)	17,58%
Pemerintah Provinsi Bali	8,01%
Pemerintah Kabupaten Badung	8,01%
PT Angkasa Pura I (Persero)	8,00%
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	1,00%
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	1,00%
PT Utama Karya (Persero)	1,00%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	0,40%

Kegiatan Usaha Utama

Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan ruas jalan (jembatan) tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa yang sekarang bernama Jalan Tol Bali Mandara.

Kegiatan Usaha Penunjang

Mengusahakan lahan di ruang milik jalan, tempat istirahat dan pelayanan, fasilitas-fasilitas jalan tol untuk meningkatkan pendapatan usaha.





Sekilas Jasamarga Bali Tol

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang paling banyak menerima kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Setiap tahunnya, tidak kurang 10 juta wisatawan membanjiri Bali. Jumlah tersebut selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pesatnya pertumbuhan industri pariwisata di Bali membawa konsekuensi pada pesatnya pertumbuhan tingkat kepemilikan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat/lebih. Pertumbuhan alat transportasi ini tidak seiring dengan penambahan jaringan jalan maupun infrastruktur dasar yang lain.

Selama ini satu-satunya akses yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Bali hanyalah jalan By Pass Ngurah Rai. Jika akses ini terganggu, maka hubungan utara-selatan Bali akan terputus. Memasuki tahun 2010, By Pass Ngurah Rai kondisinya sudah sangat macet, terutama di persimpangan Dewa Ruci dan persimpangan sebidang (pertigaan) ke arah bandara Ngurah Rai. Untuk menempuh jarak 10 kilometer saja diperlukan waktu tidak kurang dari dua jam.

Sekedar ilustrasi, dari Nusa Dua ke Denpasar memerlukan waktu lebih dari tiga jam. Dari Sanur atau Nusa Dua ke airport setidaknya harus mencadangkan waktu paling sediki dua jam atau akan ketinggalan pesawat.

Kemacetan di Bali tanpa disadari telah menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy), terutama konsumsi bahan bakar, oli, pemakaian suku cadang dan yang paling berharga adalah travel saving time mengingat tujuan wisatawan ke Bali adalah untuk mengunjungi sebanyak mungkin lokasi-lokasi wisata. Kondisi kemacetan di Bali tidak hanya dikeluhkan oleh wisatawan, namun pengusaha hotel, penyedia jasa alat transportasi, sampai sopir taksi.

Berangkat dari kebutuhan prasarana transportasi itu, Pemerintah merencanakan pembangunan jembatan yang menghubungkan pulau Serangan dengan Tanjung Benoa sebagai salah satu solusi mengurai kemacetan. Rencana tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Jaringan Jalan Nasional di Bali.

Hanya saja rencana tersebut gagal terealisasi mengingat beberapa hal, meliputi:

1. Jembatan yang akan dibangun memotong alur jalur pelayaran (shipping line) dan jalur penerbangan (air line), maka terdapat syarat teknis yang harus dipenuhi yaitu, untuk kepentingan alur pelayaran disyaratkan ketinggian minimal > 45,4 meter LWS, sedangkan jalur penerbangan

mensyaratkan ketinggian maksimal 44,8 meter. Menteri Perhubungan menyatakan secara teknis tidak dimungkinkan dibangun konstruksi jembatan karena akan saling mengganggu jalur penerbangan/alur pelayaran,

2. Secara finansial biaya investasi terlalu tinggi, sekitar Rp 5,8 triliun, dan sudah dua kali dilakukan tender investasi, tidak ada peminat.

Kegagalan pembangunan jembatan Serangan-Tanjung Benoa membuat Pemerintah berfikir keras bagaimana mewujudkan jalan alternatif dan peningkatan fasilitas transportasi, namun harus selesai dalam waktu maksimal 2 tahun karena akhir tahun 2013 terdapat beberapa acara penting tingkat internasional. Di sisi lain, Pemerintah juga menyadari bahwa membangun / mengembangkan jalan baru di atas tanah (at grade) di Bali selatan sulit dilaksanakan mengingat keterbatasan lahan, harga tanah sangat mahal, dan terkendala dengan lingkungan, pelestarian budaya, adat-istiadat, serta agama.

Pemerintah kemudian memerintahkan empat BUMN, PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pelindo III (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), dan PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) untuk mencari solusi paling efektif mengatasi kemacetan di Bali selatan, dengan menggunakan konsep jalan tol.

Keempat BUMN tersebut kemudian sepakat membentuk konsorsium dan menunjuk Jasa Marga sebagai lead konsorsium dengan pertimbangan Jasa Marga merupakan satu-satunya BUMN yang paling berpengalaman di bidang pengelolaan jalan tol.

Pada tanggal 18 November 2010, MOU keempat BUMN ditandatangani dengan garis besar kesepakatan:

1. Rencana Kerjasama Pengusahaan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa meliputi:

- inventarisasi aset dan potensi, kajian-kajian komprehensif, study kelayakan,
- 2. Membentuk konsorsium mengikuti tender investasi,
- 3. Membentuk perusahaan patungan.

Pada Butir 3 surat Menteri PU memerintahkan Konsorsium untuk:

- a. Membentuk Perusahaan Jalan Tol yang khusus dibentuk untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol serta memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat penetapan, dan
- b. Menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat penetapan.

Beberapa hari sebelum diterimanya penetapan pemenang tender dari Menteri PU tersebut, Konsorsium BUMN telah membentuk badan usaha jalan tol (BUJT) dengan nama PT Jasamarga Bali Tol, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Nomor AHU-57740.AH.01.01, tanggal 25 November 2011.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada tanggal 16 Desember 2011, ditandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) antara PT Jasamarga Bali Tol (JBT) dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) atas nama Pemerintah c.q. Kementerian Pekerjaan Umum yang kemudian dinotariskan dengan akta Nomor 10 tanggal 16 Desember 2011 oleh Rina Utami Djauhari, S.H., notaris di Jakarta, dengan masa hak pengusahaan jalan tol selama 45 (empat puluh lima) tahun yang berlaku efektif sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau terhitung mulai tanggal 10 September 2012.





Pembentukan Perusahaan dan Pemegang Saham

Pada tanggal 27 April 2011, dibuat suatu perjanjian Konsorsium tentang Kerjasama Kemitraan BUMN. Pada saat ini sudah turut bergabung tiga Kontraktor BUMN terkemuka, yaitu :PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., dan PT Hutama Karya (Persero)

Kesepakatan penting dalam perjanjian tersebut adalah:

1. menunjuk Jasa Marga sebagai leader untuk mengikuti tender investasi jalan tol,
2. Membentuk perusahaan patungan dengan nama PT Jasamarga Bali Tol, dengan porsi saham: Jasa Marga (60%), Pelindo III (20%), Angkasa Pura I (10%), Wika (5%), Adhi Karya (2%), Hutama Karya (2%), BTDC (1%).

PT Jasamarga Bali Tol

Secara bersamaan dengan proses tender investasi perusahaan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), konsorsium ketujuh BUMN membentuk badan usaha jalan tol (BUJT).

Kepada BUJT inilah konsorsium BUMN yang kelak menovasikan perusahaan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa mencakup kegiatan:

- mencari pendanaan,
- pembangunan termasuk didalamnya detail engineering design mengingat kontrak yang diberlakukan adalah design and build,
- pengoperasian, dan
- pemeliharaan.

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)

Pada 2 Desember 2011, Konsorsium memperoleh penetapan pemenang tender dari Menteri Pekerjaan Umum melalui surat Nomor: KU.03.01-Mn/620 setelah memenangkan tender investasi perusahaan jalan tol Bali Mandara.

Dengan tanpa mengurangi makna Hak Pengusahaan Jalan Tol yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sesuai PPJT, telah dimengerti sepenuhnya oleh BUJT, dalam hal ini PT Jasamarga Bali Tol (JBT) bahwa:

- Jalan Tol merupakan milik Pemerintah, maka oleh karenanya setelah masa berakhirnya perusahaan atau pengakhiran Perjanjian oleh salah satu pihak sesuai ketentuan perjanjian, JBT harus mengembalikan dan menyerahkan kembali kepada Pemerintah.

- Pemberian hak pengusahaan jalan tol kepada JBT tidak berarti sebagai beralihnya hak milik atas Jalan Tol kepada JBT, JBT hanya memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi Perusahaan Jalan Tol dan melaksanakan Perusahaan Jalan Tol sesuai ketentuan dalam Perjanjian dan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum Pendirian JBT

PT Jasamarga Bali Tol (JBT) yang saat ini berkedudukan di Kawasan Ikat Plaza Jln. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 505, Pemogan 80221, Denpasar, Bali, terbentuk berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 02 tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, Sarjana Hukum, Notaris di Depok, Akta Pendirian mana telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-57740.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011, kemudian diubah dengan Akta Nomor 01 tanggal 17 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, Sarjana Hukum, Notaris di Depok, Akta Perubahan mana:

- Telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor AHU-62682.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 06 Desember 2012;
- Proses Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat NomorAHU-AH.01.10-44344 tanggal 12 Desember 2012;

- Proses Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat NomorAHU-AH.01.10-44345 tanggal 12 Desember 2012.

Kemudian beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Akta Nomor 33 tanggal 15 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta, Akta perubahan mana, yang Proses Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-47138.40.22.2014 tanggal 16 Desember 2014.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam bidang perusahaan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Melakukan pekerjaan perencanaan.
- Membangun jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan, dan fasilitas jalan tol.
- Pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, termasuk memungut dan menggunakan uang tol.
- Menggunakan ruang milik jalan untuk usaha lain yang berkaitan dengan pengoperasian jalan tol, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau persetujuan pihak yang berwenang.
- Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d.



Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Pergantian Komisaris I Wayan Suanbara, S.H., M.M. kepada Kompyang Raka Suandika, S.H., M.M. diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung selaku pemegang saham melalui surat nomor: 538/1738/Adm.Ek., Akta Nomor 11 tanggal 01 Juni 2016

Sedang penggantian Direktur Teknik dan Operasi dari Ir. Rismarture Sidabutar, M.Mt. kepada Ali Sodikin, M.Mar. diusulkan oleh PT Pelindo III (Persero) melalui surat No. RH 624/KP.0403/P.III.2016, Akta Nomor 11 tanggal 01 Juni 2016

Anggaran Dasar PT Jasamarga Bali Tol yang dituangkan dalam Akta Notaris Paulina S S Endah Putri, SH. nomor 9 tanggal 22 Agustus 2011, sebagai mana perubahan terakhir dengan Akta Notaris Leolin Jayayanti, SH Nomor 11 tanggal 01 Juni 2016, ditetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Ir. Abdul Hadi Hasbullah, M.M.
Komisaris	Drs. U. Saefudin Noer M.Si.
Komisaris	Robert Daniel Waloni
Komisaris	Ir. Blayu Suarjaya
Komisaris	Ir. I Gusti Putu Nuriatha, M.M.
Komisaris	I Wayan Suambara, S.H., M.M. digantikan oleh: Kompyang Raka Suandika, S.H., M.H. (sejak 1 Juni 2016)

Direksi

Direktur Utama	Ir. Akhmad Tito Karim, M.M.
Teknik dan Operasi	Ir. Rismarture Sidabutar, M.Mt. digantikan oleh: Ali Sodikin, M.Mar. (sejak 1 Juni 2016)
Direktur Keuangan	Drs. Ronny Haryanto

Pemegang Saham JBT

JBT memiliki konsesi pengusahaan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa selama 45 tahun. Panjang jalan tol sekitar 10 km di atas laut dangkal (elevated), dan sekitar 2 km di atas tanah darat yang juga merupakan jalan akses. Pada awal perencanaan JBT diprakarsai oleh empat BUMN, kemudian menjelang pembentukannya bergabung tiga BUMN kontraktor sehingga pada saat terbentuk saham JBT dimiliki oleh 7 (tujuh) BUMN.

Kemudian menjelang konstruksi, yaitu bertepatan dengan pencahangan pembangunan (ground breaking) jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa tanggal 21 Desember 2011, ketujuh Pemegang Saham JBT menandatangani MOU dengan Gubernur Bali dan dengan Bupati Badung. Inti MOU tersebut adalah kesepakatan keikutsertaan investasi Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung dalam pengusahaan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa. Masing-masing pemerintah akan menyeter modal sebesar Rp 100 miliar.

Dengan bergabungnya Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung tersebut, maka riwayat dan komposisi kepemilikan saham JBT adalah sebagai berikut:

PT Jasa Marga (Persero) Tbk	55,00%
PT Pelindo III (Persero)	17,58%
Pemerintah Provinsi Bali	8,01%
Pemerintah Kabupaten Badung	8,01%
PT Angkasa Pura I (Persero)	8,00%
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	1,00%
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	1,00%
PT Hutama Karya (Persero)	1,00%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	0,40%



Visi dan Misi

Visi

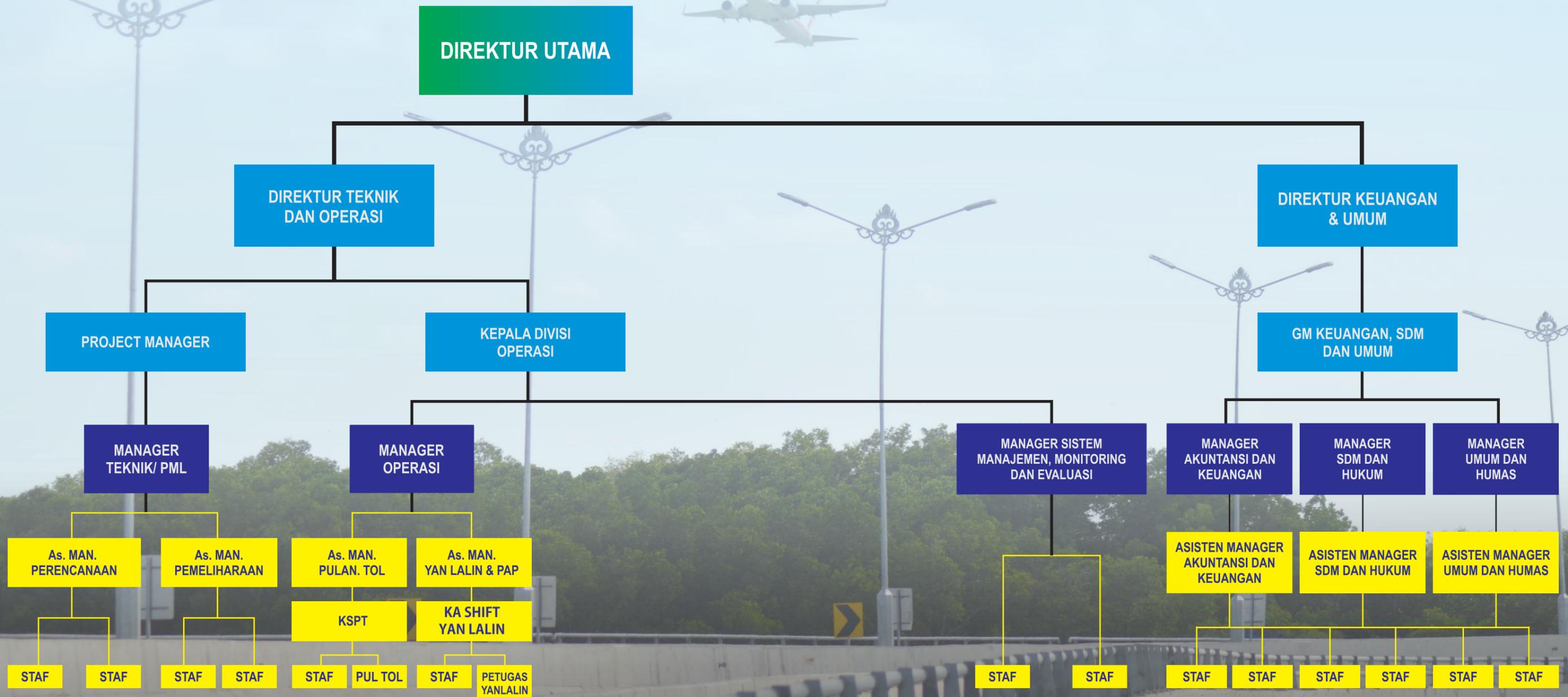
“ MENJADI PERUSAHAAN PENGELOLA JALAN TOL
TERKEMUKA DI INDONESIA ”

Misi

1. **Menyediakan jasa layanan jalan tol** yang Lancar, Aman, Nyaman, dan Efisien
2. **Meningkatkan nilai tambah** dengan memanfaatkan keindahan sekitar/lingkungan jalan tol
3. **Mengelola sumberdaya perusahaan secara profesional** dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh Pemangku Kepentingan.
4. **Mengembangkan sistem pembelajaran** yang berorientasi pada Kompetensi inti untuk keberlanjutan perusahaan.
5. **Mengoperasikan jalan tol** dengan tetap menjaga keasrian lingkungan hidup dan budaya Bali.



STRUKTUR Organisasi



STRATEGI Perusahaan



1

Mengoperasikan jalan tol dengan standar pelayanan prima untuk mencapai kepuasan pelanggan/pengguna jalan tol,

2

Mengeloladan memelihara aset jalan tol secara efektif dan efisien,

3

Mencari terobosan dan peluang usaha yang sejalan dengan bisnis inti untuk meningkatkan pendapatan usaha lain,

4

Mengelola keuangan secara efisien sehingga mampu menyeimbangkan antara pendapatan dengan kewajiban pembayaran utang, serta kebutuhan biaya pengoperasian dan pemeliharaan.



TATA NILAI Perusahaan

PT Jasamarga Bali Tol mengutip **“MANDARA”** yang merupakan bagian dari nama jalan tol Nusa Dua -Ngurah Rai - Benoa, yaitu jalan tol Bali Mandara sebagai landasan Tata nilai perusahaan.

Kata Mandara sendiri berasal dari motto Provinsi Bali merupakan singkatan dari: aMAN, MAju, DAMai dan sejahteRA.

Sedangkan PT Jasamarga Bali Tol menjadikan **MANDARA** sebagai dasar 3 (tiga) Tata nilai, yaitu:



MANDIRI

1. Berani mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya.
2. Berani mengambil risiko atas keputusan dan tindakan semata - mata demi kepentingan perusahaan.
3. Mampu menyelesaikan secara cepat dan tuntas permasalahan-permasalahan operasional yang timbul.

ANDAL

1. Memiliki kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan yang dapat diandalkan untuk mengelola secara profesional jalan tol Bali Mandara.
2. Selalu belajar, mengembangkan kompetensi dalam rangka mencapai Visi dan melaksanakan Misi Perusahaan.

RAMAH

Bersikap ramah dan santun dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jalan tol serta dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.

PERISTIWA Penting

15-19
FEBRUARI
2016



Penilaian Kinerja Perusahaan Berdasarkan Kreteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

07
APRIL
2016



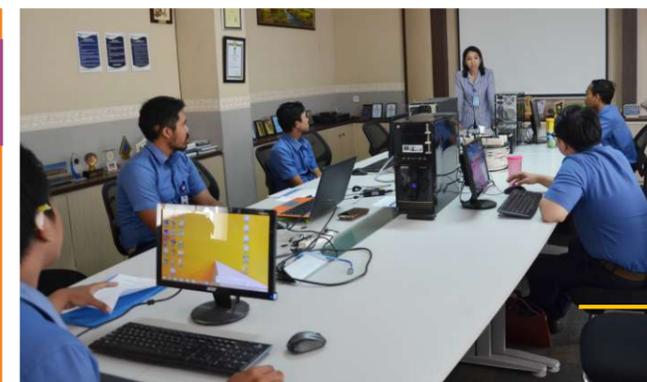
Pembahasan materi gugatan sengketa claim tiang pancang

02
MARET
2016



Persiapan Lomba Pelayanan Lalin.

13
APRIL
2016



Assessment Calon Staff Keuangan

04
MARET
2016



Konferensi Pers Dalam Rangka Perayaan Nyepi, Tahun Caka 1938

16
APRIL
2016



Tour ke Lombok

18
APRIL
2016



Sidang Gugatan Sengketa
Tiang Pancang

19
APRIL
2016



Surveillance Audit Certificate
ISO 9001 : 2008

29
APRIL
2016



Pelaksanaan Hari Mutu

18
MEI
2016



Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS),
Tahun Buku 2015

26
MEI
2016



Seminar International Road
Federation, Nusa Dua

28
MEI
2016



Latihan Fisik Calon
Karyawan Operasional

01
JUNI
2016



Pisah Sambut
Direktur Teknik & Operasi

20
JUNI
2016



Penandatanganan
Kredit Modal Kerja (KMK)

9
JUNI
2016



BUMN Mengajar 2016

22
JUNI
2016



Buka Puasa Bersama
PT Jasamarga Bali Tol

13
JUNI
2016



Pelatihan Developing
dan Managing Personality
at Work

24
JUNI
2016



Pasar Murah
BUMN

24
JUNI
2016



Penyerahan Santunan Anak Yatim

17
AGUSTUS
2016



Upacara HUT Kemerdekaan RI

29
JUNI
2016



Konferensi Pers Idul Fitri 2016

24
AGUSTUS
2016



Latihan Baleganjur (Megamel)

08
AGUSTUS
2016



Presentasi "Eagle Eye" oleh NEXCO Jepang

31
AGUSTUS
2016



Pemaparan Laporan RKL-RPL

02
SEPTEMBER
2016



Sosialisasi Asuransi Civil Engineering Completed Risks (CECR)

29
SEPTEMBER
2016



Sosialisasi Asuransi Mandiri Inhealth

12
OKTOBER
2016



Seminar Nasional KETEKNIKSIPILAN Politeknik Negeri Bali

24
OKTOBER
2016



Uji Kesehatan Berkala

07-10
NOVEMBER
2016



Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional XX

19
NOVEMBER
2016



Cross Culture Cycling 2016

21-23-24
NOVEMBER
2016



Rafting
Employee Gathering
" 5th Anniversary "

02
DESEMBER
2016



Rapat Umum
Pemegang Saham
Luar Biasa (RUPS LB)

21
DESEMBER
2016



Konferensi Pers
Hari Raya Natal
dan Tahun Baru 2017



Employee Gathering
" 5th Anniversary "
PT Jasamarga Bali Tol



PENGHARGAAN dan Sertifikasi



Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada PT Jasamarga Bali Tol

Pada Kegiatan Studi Ekskursi 2016 yang di selenggarakan Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Mercu Buana.

Penghargaan DPD RI

dalam Rangka Kontribusi dan Partisipasi dalam kegiatan Social Responsibility (CSR) Penataan Zona Ekonomi Pura Agung Besakih. Karya Ida Betara Tutun Kabeh 2016.

The Best Growth I Kelompok Berkembang

Penilaian Kinerja Cabang & Anak Perusahaan Tahun 2016



IKHTISAR KEUANGAN

- 43** Ikhtisar Keuangan 2012-2016
- 44** Pencapaian Keuangan 2012-2016
- 45** Ikhtisar Operasional
- 46** Ikhtisar Saham
- 47** Laporan Laba Rugi Komprehensif
- 48** Laporan Arus Kas
- 49** Laporan Posisi Keuangan





Ikhtisar Keuangan

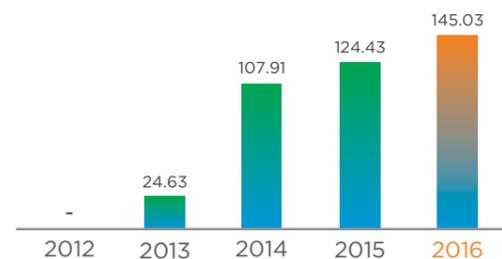
Ikhtisar Keuangan 2012 - 2016

(dalam milyar)

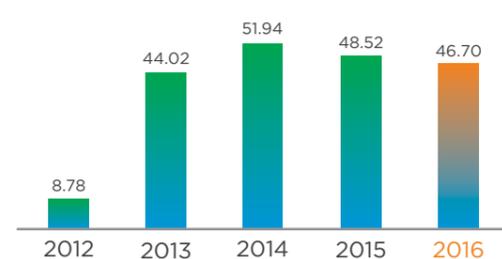
Laba Rugi Keuangan 2012 - 2016	2012	2013	2014	2015	2016
Pendapatan Usaha	-	24.63	107.91	124.43	145.03
Pendapatan Bunga	9.91	15.20	23.50	15.24	10.13
Beban Usaha	8.78	44.02	51.94	48.52	46.70
Beban Bunga	0.01	25.90	138.39	150.88	139.42
Laba Usaha	9.07	(9.38)	13.51	63.40	69.97
Laba Sebelum pajak	19.63	(20.08)	(101.03)	(72.23)	(56.80)
Beban Pajak	0.09	3.45	11.55	19.81	(19.26)
Total Laba (Rugi) Komprehensif	19.54	(23.53)	(112.58)	(92.04)	(76.14)
Laporan Posisi Keuangan					
Total Aset	1,659.51	2,172.59	2,074.00	1,984.83	1,938.33
Total Liabilitas	1,007.50	1,318.20	1,332.20	1,335.07	1,364.71
Total Ekuitas	651.99	854.39	741.80	649.76	573.62
Rasio Keuangan (%)					
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Aset	1.18%	-1.08%	-5.43%	-4.64%	-3.93%
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Ekuitas	3.00%	-2.75%	-15.18%	-14.17%	-13.27%
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Pendapatan	-	-4.09%	-91.48%	-73.97%	-52.50%
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	154.53%	54.29%	179.59%	205.47%	237.91%
Rasio Liabilitas Terhadap Jumlah Aset	60.71%	60.67%	64.23%	67.26%	70.41%

PENCAPAIAN KEUANGAN 2012 - 2016

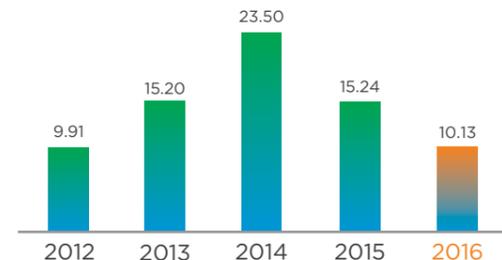
PENDAPATAN USAHA



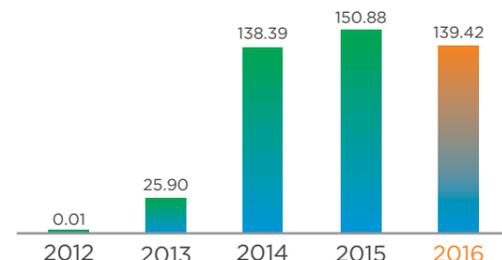
BEBAN USAHA



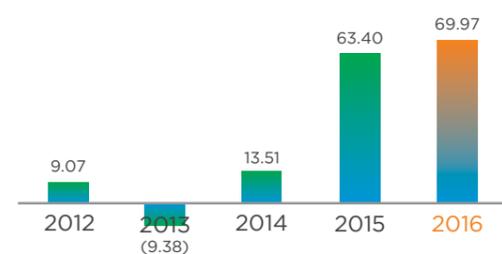
PENDAPATAN BUNGA



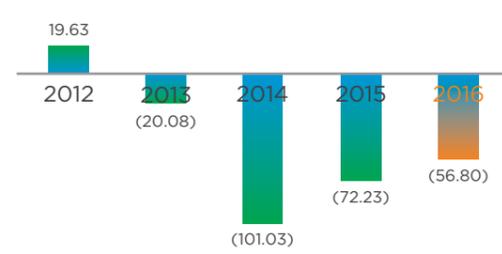
BEBAN BUNGA



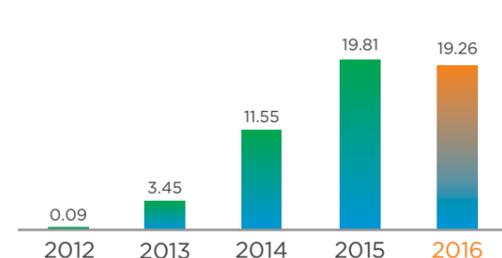
LABA USAHA



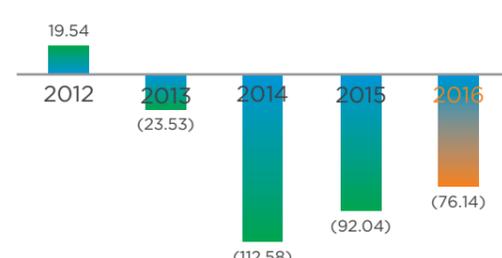
LABA SEBELUM PAJAK



BEBAN PAJAK



LABA RUGI KOMPRESIF

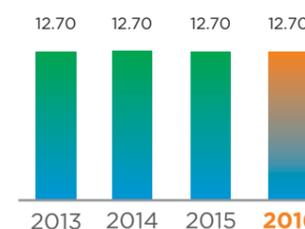


IKHTISAR Operasional

Ikhtisar Operasional 2013 - 2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
Panjang Jalan Tol (Km)	12.70	12.70	12.70	12.70
Volume Lalu Lintas Transaksi (juta kendaraan)	3.24	14.19	16.54	17.46
Pemenuhan SPM	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
Jumlah Pegawai Perbantuan (orang)	12.00	12.00	5.00	6.00
Jumlah Pegawai Tetap (orang)	3.00	3.00	124.00	133.00
Jumlah pegawai Kontrak (orang)	19.00	14.00	2.00	2.00
Jumlah Petugas Pengumpulan Tol (orang)	76.00	70.00	68.00	57.00
Volume Lalu Lintas Transaksi Harian Rata-rata (ribu kendaraan)	35.19	38.98	45.56	47.97
Pendapatan Tol Harian Rata-rata (juta rupiah)	258.62	290.25	337.12	393.55

PANJANG JALAN TOL (KM)



VOLUME LALU LINTAS TRANSAKSI (JUTA KENDARAAN)



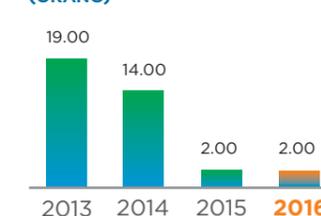
JUMLAH PEGAWAI PERBANTUAN (ORANG)



JUMLAH PEGAWAI TETAP (ORANG)



JUMLAH PEGAWAI KONTRAK (ORANG)



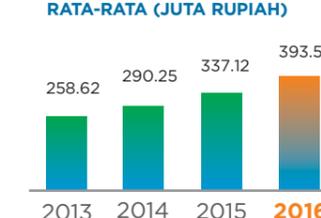
JUMLAH PETUGAS PENGUMPULAN TOL (ORANG)



LHR (RIBU KENDARAAN)



PENDAPATAN TOL HARIAN RATA-RATA (JUTA RUPIAH)



IKHTISAR Saham

Saham **PT Jasamarga Bali Tol** mengalami kenaikan harga transaksi dari waktu ke waktu. Sejak pendirian perusahaan telah dilakukan dua kali appraisal harga transaksi saham oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto,

konsultan appraisal independen dan profesional yang terdaftar pada Bapepam, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pada waktu pendirian nilai nominal saham perseroan sebesar Rp 1.000.000,- per lembar saham.
2. Berdasarkan Laporan Keuangan (audited) 30 Juni 2012 atau padasaat progres konstruksi baru mencapai 25% = Rp 1.274.786,-per lembar saham.
3. Berdasarkan Laporan Keuangan (audited) 31 Oktober 2012 atau pada saat progres konstruksi baru mencapai 50% = Rp 1.674.836,- = Rp 1.674.836,-per lembar saham.

Sampai akhir tahun 2016 belum dilakukan lagi appraisal saham.



LAPORAN LABA RUGI Komprehensif

Uraian	AUDITED 2015	PENETAPAN RKAP 2016	REALISASI RKAP 2015	DEVIASI
	1	2	3	4=3-2
Pendapatan Usaha				
Pendapatan Tol	122,710,788,907	142,522,913,500	143,250,846,206	727,932,706
Pendapatan Konstruksi	4,265,894,476	24,552,272,702	2,082,699,470	(22,469,573,232)
Pendapatan Usaha Lainnya	1,716,568,298	1,745,303,863	1,775,496,648	30,192,785
Jumlah Pendapatan Usaha	128,693,251,681	168,820,490,065	147,109,042,324	(21,711,447,741)
Beban Usaha:				
Sumber Daya Manusia	15,344,110,564	22,751,712,885	19,227,957,790	(3,523,755,095)
Beban Operasi:				
Pengumpulan Tol	8,256,340,734	7,725,984,100	6,223,734,020	(1,502,250,080)
Pelayanan Pemakai Jalan Tol	7,768,634,220	7,307,497,345	6,557,058,647	(750,438,698)
Pemeliharaan Aktiva Jalan Tol	7,831,840,193	6,395,423,870	5,738,307,465	(657,116,405)
Umum & Administrasi	7,399,977,394	7,979,723,437	7,094,698,503	(885,024,934)
Pajak Bumi dan Bangunan	1,893,145,795	2,300,000,000	1,862,731,773	(437,268,227)
	48,494,048,900	54,460,341,637	46,704,488,198	(7,755,853,439)
Penyusutan	983,483,403	1,036,691,450	1,191,902,684	155,211,234
Amortisasi	11,582,584,134	12,498,847,925	12,567,850,499	69,002,574
Beban Provisi Pelapisan Jalan Tol		14,604,206,100	14,604,206,100	
Beban Konstruksi	4,202,851,700	24,189,431,233	2,071,648,733	(22,117,782,500)
Jumlah Beban Usaha	65,262,968,137	106,789,518,345	77,140,096,214	(29,649,422,131)
Laba Usaha	63,430,283,544	62,030,971,720	69,968,946,110	7,937,974,390
EBITDA	75,933,308,305	89,807,875,726	98,321,854,656	8,513,978,930
Beban Bunga	150,883,378,565	150,784,098,774	139,417,969,226	(11,366,129,548)
Pendapatan Bunga	15,243,264,275	8,615,450,973	10,125,498,066	1,510,047,093
Lainnya - bersih	5,322,251	3,446,323	2,520,702,733	2,517,256,410
Jumlah Pendapatan/(Beban)	(135,634,792,039)	(142,165,201,478)	(126,771,768,427)	15,393,433,051
Lain-lain				
Laba Bersih Sebelum Pajak	(72,204,508,495)	(80,134,229,758)	(56,802,822,317)	23,331,407,441
Pajak Penghasilan	(19,811,130,487)	(21,792,243,536)	(19,262,534,766)	2,529,708,770
Rugi akrual atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang	(27,237,000)		(77,680,895)	(77,680,895)
Laba Bersih	(92,042,875,982)	(101,926,473,294)	(76,143,037,978)	25,861,116,211

LAPORAN Arus Kas

Uraian	AUDITED 2015	PENETAPAN RKAP 2016	REALISASI RKAP 2016	DEVIASI
	1	3	4	5
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi				
Pendapatan Tol	122,710,788,907	142,522,913,500	143,250,846,206	727,932,706
Pendapatan Non Tol	1,721,890,548	1,748,750,186	1,775,496,648	26,746,462
Pembayaran kepada pihak ketiga	(94,649,427,500)	(61,875,562,882)	(37,131,159,476)	24,744,403,406
Pembayaran kepada karyawan	(14,452,165,721)		(18,173,297,222)	-18,173,297,222
Pembayaran Pajak (PPH Badan)				
Penerimaan bunga	15,243,264,275	8,615,450,973	10,256,466,285	1,641,015,312
Pembayaran Bunga (Bank+Obligasi)	(150,883,378,566)	(151,299,089,304)	(139,849,181,897)	11,449,907,407
Pembayaran Provisi				
Penerimaan Aset/(Pembayaran)				
Kew. Jangka Pendek				
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(120,309,028,057)	(60,287,537,527)	(39,870,829,456)	20,416,708,071
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi				
Pengeluaran Capex HPJT				
Pengeluaran Capex selain jalan tol	(5,035,002,976)	(24,189,431,233)	(924,954,731)	23,264,476,502
Perolehan aset tetap		(6,050,000,000)	(18,300,000)	6,031,700,000
Penempatan dana yang dibatasi penggunaannya	(96,075,702)			-
Pengeluaran selain Capex				
Pembayaran Hutang Kontraktor (Retensi)	-	(36,619,558,347)	-	36,619,558,347
Pembayaran Hutang Kontraktor				
Pencairan Aset Kauangan Lainnya				
Pendapatan Bunga				
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(5,131,078,678)	(66,858,989,580)	(943,254,731)	65,915,734,849
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan				
Hutang (Bank+Obligasi)	38,183,145,126	56,515,815,843	7,900,000,000	-48,615,815,843
Setoran Modal				
Pembayaran Pokok Hutang Bank + SLA		(7,904,185,708)	(7,774,643,227)	129,542,481
Pembayaran Pokok Obligasi				
Pembayaran Dividen				
Emisi Obligasi				
Lain-2				
Total Arus Kas Bersih dr Aktivitas Pendanaan	38,183,145,126	48,611,630,135	125,356,773	-48,486,273,362
KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS	(87,256,961,609)	(78,534,896,972)	(40,688,727,414)	37,846,169,558
Saldo Kas Awal	254,121,692,267	166,864,730,658	166,864,730,658	-
Saldo Kas Akhir	166,864,730,658	88,329,833,686	126,176,003,244	37,846,169,558

LAPORAN Posisi Keuangan

Uraian	AUDITED 2015	PENETAPAN RKAP 2016	REALISASI RKAP 2016	DEVIASI
	1	3	4	5
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	166,864,730,658	88,329,833,686	126,176,003,244	37,846,169,558
Biaya Dibayar di Muka	2,731,389,598	3,999,144,468	2,771,357,063	(1,227,787,405)
Dana yang dibatasi penggunaannya bagian lancar	4,889,450,871	5,173,067,628	9,339,286,602	4,166,218,974
Piutang usaha pihak ketiga	329,731,262	8,367,284	78,746,956	70,379,672
Piutang usaha pihak ketiga	529,230,247	1,253,021,404	358,926,027	(894,095,377)
Pendapatan yang akan diterima			900,000,000	900,000,000
Jumlah Aset Lancar	175,344,532,636	98,763,434,470	139,624,319,892	40,860,885,422
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap				
Non Jalan Tol	4,596,761,000	11,073,099,000	5,041,399,000	(6,031,700,000)
(Akumulasi Depresiasi)	(1,081,122,493)	(2,117,813,942)	(1,951,330,177)	166,483,765
Non Jalan Tol-Bersih	3,515,638,507	8,955,285,058	3,090,068,823	(5,865,216,235)
Aset tak berwujud	1,820,404,912,587	1,844,398,243,831	1,820,404,912,587	(23,993,331,244)
(Akumulasi Amortisasi)	(64,100,713,681)	(76,438,714,099)	(76,668,564,180)	(229,850,081)
Hak Penggunaan Jalan Tol Bersih	1,756,304,198,906	1,767,959,529,732	1,743,736,348,407	(24,223,181,325)
Dana yang dibatasi penggunaan -bagian aset tidak lancar	44,597,415,470	44,896,499,176	45,404,358,005	507,858,829
Aset Tak Berwujud Lainnya	5,065,924,476	4,999,400,428	6,475,341,674	1,475,941,246
Jumlah Aset Tidak Lancar	1,809,483,177,359	1,826,810,714,394	1,798,706,116,909	(28,104,597,485)
Total Aset	1,984,827,709,995	1,925,574,148,864	1,938,330,436,801	12,756,287,937
Kewajiban				
Kewajiban Lancar				
Utang Usaha	11,604,098,419	9,760,582,347	8,875,729,159	(884,853,188)
Utang Pajak	988,443,155	156,634,495	4,105,460,077	3,948,825,582
Utang - Jatuh Tempo Dlm Setahun				
- Pihak ketiga	15,093,772,770	14,448,479,414	24,890,824,525	10,442,345,111
Beban Accrual	9,208,252,333	8,615,095,241	9,172,264,913	557,169,672
Jumlah Kewajiban Lancar	36,894,566,677	32,980,791,497	47,044,278,674	14,063,487,177
Kewajiban Tidak Lancar				
Kewajiban Pajak Tangguhan	34,895,730,946	56,687,974,482	54,158,265,712	(2,529,708,770)
Hutang Kontraktor (Retensi)	36,587,754,035	148,207,450	36,704,129,762	36,555,922,312
Kewajiban Jangka Panjang (Bank+Obligasi+SLA)	1,226,291,752,922	1,272,921,537,214	1,211,320,807,409	(61,600,729,805)
Kewajiban Provisi		14,604,206,100	14,604,206,100	
Kewajiban Imbalan Kerja	397,874,000	397,874,000	881,755,707	483,881,707
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	1,298,173,111,903	1,344,759,799,246	1,317,669,164,690	(27,090,634,556)
Jumlah Kewajiban	1,335,067,678,580	1,377,740,590,743	1,364,713,443,364	(13,027,147,379)
Ekuitas				
Modal Saham	745,434,000,000	745,434,000,000	745,434,000,000	-
Tambahan Modal Disetor	112,101,694,074	112,101,694,074	112,101,694,074	-
Laba (Rugi) Belum Direalisasi Efek Tersedia Untuk Dijual				
Saldo Laba	(115,732,786,677)	(207,775,662,659)	(207,775,662,659)	-
Laba Tahun Berjalan	(92,042,875,982)	(101,926,473,294)	(76,143,037,978)	25,783,435,316
Jumlah Ekuitas	649,760,031,415	547,833,558,121	573,616,993,437	25,783,435,316
Total Kewajiban dan Ekuitas	1,984,827,709,995	1,925,574,148,864	1,938,330,436,801	12,756,287,937



LAPORAN MANAJEMEN

- 53** Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
- 57** Profil Dewan Komisaris
- 65** Sambutan Direktur Utama
- 68** Profil Direksi



Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

Pemegang Saham yang terhormat,

Berakhirnya tahun anggaran 2016 yang merupakan tutup buku bagi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP 2016) PT Jasamarga Bali Tol. Puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa selama kurun waktu tersebut, Dewan Komisaris selaku pemegang amanah dari para Pemegang Saham telah melaksanakan tugas dan kewajiban pengawasan Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Anggaran Dasar maupun Undang-Undang Nomor 40, Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.

Sebelum mengawali kegiatan sepanjang tahun buku 2016, pada tanggal 7 Desember 2015 Perseroan telah memperoleh pengesahan dari para Pemegang Saham terkait usulan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) untuk Tahun Anggaran 2016. Kemudian pada tanggal 18 Mei 2016 Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan dengan agenda:

- 1) Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
- 2) Penetapan Penggunaan Laba Rugi Tahun 2015;
- 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun 2016;
- 4) Persetujuan Pemberian Insentif untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan PT Jasamarga Bali Tol atas Kinerja Perusahaan untuk Tahun Buku 2015 dan Penetapan Remunerasi dan Honorarium serta Tunjangan bagi Anggota Direksi dan Komisaris Tahun 2016;

Ir. Abdul Hadi Hasbullah, M.M.
Komisaris Utama

Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan, yaitu terdiri dari 1 (satu) orang anggota komisaris sebagai Komisaris Utama, dan 5 (lima) orang anggota Komisaris.

Pada tahun 2016, para Pemegang Saham menyetujui usulan penggantian Pengurus. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) III mengusulkan penggantian Direktur Teknik dan Operasi dari Ir. Rismarture Sidabutar, M.MT. kepada Ali Sodikin, M.Mar., dan Pemerintah Kabupaten Badung mengusulkan penggantian salah satu anggota Dewan Komisaris, yaitu I Wayan Suambara, S.H., M.M. digantikan oleh Kompyang Raka Swandika, S.H., M.Hum.. Penggantian keduanya dikukuhkan melalui Akta Notaris Nomor 11 tanggal 01 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn dan Akta perubahan mana, yang Proses Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0054541 tanggal 06 Juni 2016.

Program Kerja Dewan Komisaris

Sesuai tugas dan kewajibannya, Dewan Komisaris menyusun program kegiatan sebagai acuan pengawasan dan pemberian saran kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan. Dalam perjalanannya dilakukan penyesuaian-penyesuaian mengingat dinamika dan perlunya review atas business plan dari rencana awal. Kajian atas rencana usaha ini, di samping memang diperjanjikan dalam PPJT (Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol), juga menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan pada tahun-tahun mendatang.

Program kerja Dewan Komisaris juga mengagendakan pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Dalam forum rapat-rapat tersebut, Dewan Komisaris secara aktif menyampaikan masukan dan arahan kepada Direksi, serta bersama-sama dengan Direksi

membahas hal-hal strategis dan berdampak besar bagi usaha dan kinerja Perseroan, seperti pengoperasian jalan tol yang dilaksanakan sendiri oleh Perseroan tanpa melibatkan provider.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Dewan Komisaris mencermati setiap upaya yang dilakukan Direksi terutama dalam hal efisiensi serta pencapaian target-target usaha. Secara umum Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab sesuai kaidah good corporate governance (GCG). Dewan Komisaris juga mendorong agar Direksi lebih mempercepat proses penyelesaian program-program sebagai berikut:

1. Pengadaan Tanah

Sampai dengan akhir tahun 2016, pekerjaan rumah yang belum dapat diselesaikan adalah pengadaan tanah/lahan HPL milik PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Secara fisik tidak ada kendala karena telah memperoleh ijin penggunaan lahan dari kedua BUMN tersebut. Namun, penyelesaian ganti rugi sampai dengan akhir tahun 2016 belum dapat direalisasikan. Di satu sisi Perseroan telah mengalokasikan anggaran ganti rugi, namun secara legal formal Dirjen. Bina Marga c.q. Tim Pengadaan Tanah belum memberikan perintah kepada Perseroan untuk melakukan pembayaran karena adanya Pendapat dari BPKP bahwa lahan HPL tidak diberikan ganti rugi. Di sisi lain, pemanfaatan HPL milik PT Angkasa Pura I (Persero) tersebut menjadi temuan BPK. Permasalahan yang melibatkan dua lembaga resmi Pemerintah ini menjadi semakin rumit dan berlarut-larut.

Dewan Komisaris memahami peliknya penyelesaian ganti rugi tanah/lahan milik PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tersebut. Atas Perbedaan antara BPK dan BPKP ini,

maka Dewan Komisaris menyarankan kepada Direksi untuk diselesaikan secara lintas sektoral antar Departemen, dengan alasan tanggung jawab pengadaan tanah sesungguhnya berada di tangan Pemerintah c.q. Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal Bina Marga.

Lahan untuk Kantor Operasional

Selain lahan HPL milik PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas upaya Direksi untuk mendapatkan lahan bagi pembangunan Kantor Operasional di Daerah Lingkungan Pelabuhan, yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Sampai dengan akhir tahun 2016, Perseroan telah menyelesaikan Kajian Lingkungan bekerja sama dengan Unud. Perseroan juga telah memperoleh Ijin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali sebagai syarat pengajuan perijinan penimbunan kepada Menteri Perhubungan, dan telah menyampaikan kepada Kementerian PUPR untuk di tindak lanjuti.

2. Sengketa Klaim Tiang Pancang

Pada akhir tahun 2015, menerima gugatan klaim kelebihan volume tiang pancang yang diajukan Kontraktor Paket 2 dan Paket 4 (PT Waskita Karya (Persero) Tbk.) Gugatan tersebut baru mulai disidangkan pada awal tahun 2016 dan Putusan PN Denpasar disampaikan pada 20 Juni 2016 dengan Putusan memenangkan Waskita sebagai Penggugat.

Perseroan kemudian, melalui Pengacaranya, menempuh upaya banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar melalui PN Denpasar. Putusan Pengadilan Tinggi, yang dibacakan pada Desember 2016 memenangkan Perseroan dengan Putusan membatalkan seluruh gugatan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Dewan Komisaris, dalam rapat-rapat

gabungan dengan Direksi, senantiasa memberikan saran dan pendapat terkait penyelesaian sengketa klaim tiang pancang.

Di samping rapat-rapat, Dewan Komisaris melalui surat Nomor: 13/JBT-DK/2016, tanggal 21 September 2016, juga secara tegas menganjurkan kepada Direksi untuk memonitor secara ketat proses peradilan dan tetap melakukan upaya maksimal untuk memenangkan perkara.

Dewan Komisaris juga mengingatkan Direksi agar upaya yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, objektif, dan dengan itikad baik.

Di sisi lain, apabila ada keinginan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk. selaku Pihak Penggugat untuk melakukan perdamaian, Dewan Komisaris menganjurkan Direksi untuk menggunakan Perma No. 1/2016 sebagai salah satu alternatif penyelesaian dengan tetap mempertimbangkan risiko terendah apabila cara ini ditempuh.

3. Kredit Modal Kerja (KMK)

Tahun Buku 2016, Perseroan masih mengalami defisit *cash-flow*, dan diperkirakan sampai dengan tahun 2023. Defisit tersebut terjadi karena pendapatan tol belum cukup untuk pembayaran beban bunga dan pengembalian pokok pinjaman, serta biaya operasi dan pemeliharaan.

Selama ini, untuk menutupi defisit *cash-flow*, disamping melakukan efisiensi, Perseroan masih menggunakan equity dan diperkirakan akan habis pada Semester II 2017. Untuk mengatasinya, Perseroan telah melakukan rekayasa finansial dan mengajukan kepada Kreditur fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dengan jaminan *pari-passu*. Dewan Komisaris memberikan saran agar fasilitas KMK tersebut dimanfaatkan sebagai *standby loan*, yang akan digunakan apabila benar-benar diperlukan.

4. Pendapatan Usaha Lain

Pendapatan Usaha Lain dari pemasangan reklame relative belum menggembirakan mengingat kebijakan dari Pemerintah Daerah yang menginginkan jalan tol bersih dari iklan agar tetap terjaga kerapian dan keindahannya. Dewan Komisaris memberikan saran dan arahan agar Direksi menciptakan peluang untuk meningkatkan pendapatan lain-lain, seperti kerjasama dengan penyedia panel surya (*solar cell*) yang bisa ditempatkan sebagai atap pada jalur sepeda motor sekaligus sumber energy listrik tenaga surya. Selain hal tersebut, Dewan Komisaris juga mendorong percepatan pengembangan jalan tol melalui pembangunan tempat pelayanan dan wisata agar bisa menjadi tujuan wisata baru serta *meeting point* yang dapat dikomersilkan.

5. Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol Bali Mandara

Mulai tahun 2016 pengoperasian jalan tol dilaksanakan sendiri oleh Perseroan. Pengoperasian ini memiliki implikasi pada penambahan jumlah pegawai. Dewan Komisaris memberi saran kepada Direksi agar tetap konsisten melakukan efisiensi tanpa merugikan hak-hak pegawai. Biaya pengoperasian sedapat mungkin ditekan dengan berbagai cara seperti menambah pengoperasian GTO untuk menekan *overhead*.

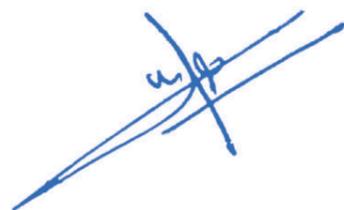
Jalan Tol Bali Mandara merupakan satu-satunya jalan tol terpanjang di atas laut dengan pondasi tiang pancang. Pengaruh air laut berisiko merusak pondasi tiang pancang.

Dewan Komisaris telah menyarankan Direksi untuk menyusun database aset, termasuk data detail mengenai tiang pancang untuk memudahkan pengawasan dan pemeliharaan. Dewan Komisaris menyarankan untuk menekan biaya pemeliharaan, agar dipersiapkan system dan prosedur pemeliharaan sehingga terukur dari sisi kinerja dan biaya mengingat setelah FHO, biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perseroan.

Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi agar selalu melakukan terobosan yang kreatif dan menangkap peluang-peluang usaha baru yang sejalan dengan bisnis inti perusahaan, serta melakukan efisiensi dan inovasi terutama terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.

Dewan Komisaris juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepada Pemegang Saham; PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pelindo III, PT Angkasa Pura I (Persero), Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), serta jajaran Direksi dan seluruh karyawan Perseroan atas dukungan dan kerjasama dalam memberikan kontribusi atas pencapaian kinerja Perseroan di tahun 2016.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan tol.



Ir. Abdul Hadi Hs, MM.
Komisaris Utama

Profil Dewan Komisaris



-  **Ir. Abdul Hadi Hasbullah**
Komisaris Utama
-  **Ir. I Gusti Putu Nuriatha**
Komisaris
-  **Drs. U. Saefudin Noer, M.Si.**
Komisaris
-  **Robert Daniel Waloni**
Komisaris
-  **Ir. Blayu Suarjaya**
Komisaris
-  **Kompyang Raka S. S.H., M.H**
Komisaris

Abdul Hadi Hasbullah

Komisaris Utama



Lahir di Jakarta, 13 Juni 1957.

Ditetapkan untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Utama PT Jasamarga Bali Tol pada tanggal 5 Desember 2011.

Kedudukannya sebagai Komisaris Utama merupakan jabatan rangkap sebagai Direktur Pengembangan Usaha di PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sejak tahun 2006 dan terpilih kembali sebagai Direktur Pengembangan Usaha dalam RUPS Luar Biasa Jasa Marga tanggal 30 Januari 2012. Mulai bergabung dengan Jasa Marga tahun 1987.

Selain kedua jabatan tersebut, Abdul Hadi Hs menjabat sebagai :

- Komisaris PT Marga Lingkar Jakarta.
- Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (2001-2005),
- Kepala Divisi Pengembangan Investasi (1994-2001),
- Komisaris PT Bukaka Marga Utama (1995-2001), dan sebagai Ketua Tim Penanaman Modal Jalan Tol (1994-2001).
- Menjabat sebagai Ketua Bidang Pasar Regional dan Internasional DPP Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) periode 2007-2011, diangkat kembali sebagai menjadi Ketua Hubungan dan Pengembangan Pasar Internasional untuk periode 2011-2015.

Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil dari Universitas Trisakti (1982) dan meraih gelar S2 Magister Manajemen Jalur Profesi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1982).

Robert Daniel Waloni

Komisaris



Lahir di Manado, Sulawesi Utara,
16 September 1954.

Menjabat sebagai Komisaris PT Jasamarga Bali Tol sejak 5 Desember 2011 sampai sekarang.

Memperoleh gelar Bachelor of Science dari Universitas Sam Ratulangi, Manado pada tahun 1980.

Jabatan utamanya adalah Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura I sejak 27 Juli 2010. Memulai karir di dunia penerbangan dengan menjadi pegawai PT Garuda Indonesia pada tahun 1975 sampai mencapai posisi penting seperti General Manager di Spanyol, Jepang, Inggris, dan Irlandia. Regional Director untuk Jepang, Korea, dan China, serta Vice President untuk kawasan Amerika dan Australia.

Jabatan terakhir di Garuda Indonesia adalah sebagai Vice President Production sebelum dipromosikan sebagai Direktur Niaga di PT Gapura Angkasa pada tahun 1998. Pada tahun 2004 diangkat sebagai Direktur Utama PT Gapura Angkasa.

Pada tahun 2008 menjadi Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura II sebelum menjabat posisi yang sama di PT Angkasa Pura I.

Drs. U. Saefudin Noer, M.Si.

Komisaris



Lahir di Pandeglang, Jawa Barat,
15 September 1965.

Menjadi Komisaris PT Jasamarga Bali Tol sebagai wakil dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sejak 30 April 2015 sampai sekarang. Jabatan utama saat ini adalah sebagai Direktur Keuangan, Pelindo III sejak 16 Maret 2015. Menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, dan menyelesaikan pendidikan pasca sarjana Manajemen Komunikasi/M.Si. juga dari Universitas Indonesia.

Pengalaman berorganisasi yang turut melengkapi perjalanan karir Saefudin Noer, antara lain sebagai Ketua Kompartemen Asia-Pasifik, KADIN. Pernah menjadi Koordinator Expert Group, APEC Business Advisory Council, Ketua Departemen Pengembangan Bank Syariah dari MES, serta Wakil Ketua Komite Permanen Bank Syariah, KADIN.

Serangkaian pengalaman kerja di bidang finansial/perbankan adalah: sebagai Asisten Presiden Direktur & Corporate Secretary Bank Duta, Executive Director pada Pusat Komunikasi Economic Syariah, Direktur Business Bank Muamalat, Kepala Perbankan Syariah di CIMB Niaga Group, serta Head of Government Relations and Senior Vice President di CIMB Niaga.

I Wayan Blayu Suarjaya

Komisaris



Lahir di Gianyar, Bali,
28 Januari 1952.

Ditetapkan untuk kali pertama sebagai Komisaris PT Jasamarga Bali Tol sejak 5 Desember 2011.

Memulai karir di PT Utama Karya (Persero) sejak 1 November 1972. Pengalamannya menangani proyek sejak diangkat sebagai Kepala Proyek di NTT dan Bali. Karirnya meningkat menjadi Kepala Cabang NTB, Kepala Cabang di Bali sampai akhirnya menanjak lagi menjadi Kepala Wilayah yang membawahi daerah Bali, NTB, NTT, dan Timtim.

Gelar sarjana Teknik Sipil diperoleh dari Universitas Ngurah Rai Bali ditambah pengalaman mengikuti program Project Management Training Course di Australia (1992), mengikuti Kovensi IFAWPCA ke 28 di Seoul, Korea Selatan serta berbagai training di bidang manajemen dan pengawasan.

- Menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT Utama Karya (Persero) pada tahun 2004 - 2007,
- Menduduki jabatan Direktur Operasi II pada November 2007 - Juni 2011, sempat merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Citra WASPPHUTOWA dari Maret 2006 - November 2011.

Kompyang R. Swandika

Komisaris

Lahir di Badung, 1 Februari 1957,

ditetapkan sebagai Komisaris PT Jasamarga Bali Tol mewakili Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten Badung sejak 1 Juni 2016 sampai dengan sekarang.

Menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun 2004. Jenjang pendidikan S1 juga diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, lulusan tahun 1981.

Memulai karir sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Badung tahun 1981, pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kab. Badung pada tahun 1992-1999, Assisten II Kabupaten Badung pada tahun 1999-2000, Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2000-2006, Kepala Bappeda, Litbang Kab. Badung pada tahun 2006-2010 dan kemudian diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Badung pada tahun 2010 hingga saat ini.

Selain sebagai Pegawai Negeri Sipil, beberapa organisasi yang pernah dipimpin diantaranya Ketua KORPRI Kabupaten Badung tahun 2010 sampai dengan sekarang, Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung periode 2010 - 2016, Ketua Umum Cabang Olahraga Tarung Derajat Bali dari tahun 2005 hingga dengan sekarang, Ketua Pengurus PMI Kabupaten Badung tahun 2014 sampai dengan Sekarang, dan Ketua Forum Kerukunan Umat Berahama (FKUB) Kabupaten Badung tahun 2015 sampai dengan sekarang.

I Gusti Putu Nuriartha

Komisaris

Lahir di Abiansemal, Badung, Bali, pada 11 Juni 1956.

Ditetapkan oleh Pemegang Saham sebagai Komisaris PT Jasamarga Bali Tol mewakili Pemegang Saham Pemerintah Provinsi Bali pada 15 November 2013, akta perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat AHU-AH.01.10-51470 tanggal 29 November 2013.

Menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen S2 dari Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, pada tahun 2004. Jenjang pendidikan S1 juga dari Universitas Udayana dari Fakultas Peternakan, lulus tahun 1982.

Sebelum memasuki masa purna bhakti, pernah menduduki serangkaian jabatan penting di Pemerintahan Provinsi Bali. Pernah menjabat sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Bali, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, dan Sekretaris Bappeda Provinsi Bali.

Pengalaman di bidang audit memberikan warna baru pada penciptaan good corporate governance (GCG) PT Jasamarga Bali Tol





Sambutan

Direktur Utama

Om Swastyastu...

Pemegang Saham yang terhormat,

Sebelum tutup Tahun Anggaran 2015, yaitu pada tanggal 7 Desember 2015, Perseroan telah memperoleh pengesahan dari para Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 dan Key Performance Indikator (KPI).

RKAP tahun anggaran 2016 tersebut disusun dengan landasan hukum:

1. Anggaran Dasar Perseroan (PT Jasamarga Bali Tol) Pasal 17,
2. Surat PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor: DB.TR.05.565, tanggal 1 September 2015.

Sesuai arahan Pemegang Saham, Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol Bali Mandara agar dilaksanakan sendiri oleh Perseroan tanpa melibatkan provider penyedia jasa pengoperasian jalan tol.

Dengan demikian, rencana dan strategi Perseroan untuk Tahun Anggaran 2016 dititikberatkan pada Pengoperasian dan

Pemeliharaan jalan tol, dengan Sasaran Pokok:

1. Pengoperasian dan Pemeliharaan (rutin) dilaksanakan sendiri oleh Perseroan
2. Tercapainya proyeksi volume lalu lintas
3. Tercapainya Jalan Tol yang Lancar, Aman dan Nyaman
4. Menjaga sarana dan kondisi jalan tol dengan motto "zero pothole"
5. Penyelesaian tanah HPL milik Angkasa Pura I dan Pelindo III
6. Pembangunan Gedung Kantor Operasional
7. Penerapan sistem KPKU
8. Restrukturisasi pinjaman Kredit Investasi (KI)

9. Menjaga likuiditas Perseroan sehingga dapat memenuhi kewajibannya.

Pada tahun anggaran 2016, Perseroan masih mengalami defisit *cash-flow* sehingga perlu penajaman strategi pendanaan untuk memperkecil atau paling tidak memperlambat jadwal suntikan modal (*top up*) dari Pemegang Saham.

Sesuai Keputusan RUPS LB Nomor: 33, tanggal 18 Desember 2013, Perseroan telah melakukan refinancing atau rekayasa finansial untuk mengatasi *cost overrun* maupun *cash deficiency*. Dan sampai akhir tahun 2016 Perseroan belum mengajukan permintaan *top up* atau suntikan *equity*, meskipun dalam *business plan*, Perseroan diproyeksikan sudah harus mengajukan *top up* kepada Pemegang Saham sejak awal Pengoperasian. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan operasional, Perseroan, atas persetujuan Pemegang Saham, menggunakan fasilitas kredit perbankan dan pendapatan tol.

Secara umum kinerja perseroan pada tahun 2016 dapat dikatakan baik. Seluruh target yang ditetapkan dalam RKAP 2016 tercapai, beberapa diantaranya pencapaiannya melebihi target. Namun demikian, untuk *capital expenditure* pengadaan tanah dan pembangunan kantor operasional belum dapat terealisasi mengingat Perseroan memiliki ketergantungan proses pengadaan tanah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, c.q. Kementerian PUPR, c.q. Dirjen. Bina Marga c.q. Tim Pengadaan Tanah. Keterlambatan pengadaan tanah akan berpengaruh pada keterlambatan pembangunan gedung kantor operasional serta tidak terealisasinya Pendapatan Konstruksi.

Volume lalu-lintas dalam RKAP 2016, oleh Pemegang Saham mayoritas ditargetkan sebanyak 17,2 juta kendaraan, dan pada akhir tahun 2016 tercapai 17,4 juta kendaraan atau 1,1% melebihi target. Pada bagian lain, pendapatan tol yang semula ditargetkan sebesar Rp 142 milyar

juga tercapai sebesar Rp 143 milyar melampaui target yang ditetapkan dalam RKAP 2016. Demikian pula Pendapatan Usaha Lain yang melampaui target.

Secara umum, kinerja Keuangan Perseroan telah mampu melampaui target yang ditetapkan dalam RKAP 2016. Pencapaian target volume lalin menjadi kunci tercapainya target pendapatan tol. Target pendapat usaha lain juga tercapai sehingga secara keseluruhan Pendapatan Usaha Perseroan melebihi target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan tahun sebelumnya, maka Laba Usaha, EBITDA, Laba Rugi sebelum Pajak, Laba Rugi Komprehensif, dan KPI secara keseluruhan melampaui target yang ditetapkan dalam RKAP 2016, dan meningkat jika dibandingkan dengan kinerja keuangan tahun sebelumnya.

Selama tahun 2016, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) melakukan inspeksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian rapor SPM diakumulasikan untuk laporan setiap Semester, dan pada tahun 2016 berdasarkan Berita Acara Nomor: 29/BA.SPM.II-2016/IX/2016 tanggal 1-2 September 2016, BPJT menyatakan Jalan Tol Bali Mandara telah memenuhi SPM. Perseroan telah mampu menjaga dan mempertahankan sarana dan kondisi jalan tol dengan motto "*zero pothole*". Selain itu, Perseroan juga telah berhasil mewujudkan jalan tol yang lancar, aman, dan nyaman.

Pemegang Saham yang kami hormati,

Sebagaimana telah kami singgung di depan, bahwa sampai akhir tahun 2016, Perseroan masih belum dapat merealisasikan anggaran capex untuk uang ganti rugi (UGR) tanah/lahan HPL milik PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), serta lahan non HPL untuk kantor operasional.

Belum dapat direalisasinya UGR tersebut karena Pemerintah, selaku penanggung jawab pengadaan tanah, masih menghadapi dilema perbedaan pandangan antara BPKP yang berpendapat bahwa tanah/lahan HPL tidak perlu

diberi UGR, sementara permasalahan tanah tersebut menjadi salah satu temuan audit BPK di PT Angkasa Pura I (Persero).

Perbedaan pandangan dari kedua lembaga resmi Pemerintah tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian mengenai pembayaran UGR untuk tanah/lahan HPL milik PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan berlarut-larut hingga sekarang.

Terhadap lahan non HPL perairan dangkal di akses Benoa, Perseroan juga telah melakukan berbagai upaya namun sampai dengan akhir tahun 2016, Pemerintah juga belum dapat merealisasikan lahan non HPL perairan dangkal dimaksud. Akibatnya penyerapan anggaran capex untuk pembangunan kantor operasional menjadi tertunda.

Pada tahun 2016, Perseroan juga menghadapi gugatan klaim kelebihan volume tiang pancang yang diajukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. selaku Kontraktor Paket 2 dan Paket 4.

Pada tingkat pertama di PN Denpasar, sebagian besar gugatan Kontraktor dikabulkan. Perseroan kemudian mengajukan banding, dan di tingkat banding tersebut Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar membatalkan Putusan PN yang memenangkan gugatan Kontraktor serta menolak gugatan Kontraktor untuk seluruhnya.

Pemegang Saham yang kami hormati,

Pada tahun 2016, Perseroan berhasil memperoleh Awards KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul) untuk kategori *Best Growth*. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya *team-*

work di perusahaan serta dukungan Pemegang Saham dan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang senantiasa mendorong agar Perseroan terus menerus meningkatkan kinerja secara kesisteman.

Untuk menjaga likuiditas keuangan agar Perseroan tetap dapat memenuhi kewajibannya, Perseroan telah melakukan rekayasa finansial dengan cara merestrukturisasi pinjaman KI (kredit investasi) serta memanfaatkan fasilitas KMK (kredit modal kerja) dengan jaminan pari passu dengan kolateral KI. Dengan rekayasa finansial tersebut sampai dengan akhir tahun anggaran 2016, Perseroan belum mengajukan suntikan modal kepada Pemegang Saham.

Pemegang Saham yang kami hormati,

Pada kesempatan ini, kami atas nama Direksi PT Jasamarga Bali Tol, mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan selama ini.

Direksi juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris yang telah membantu, mengawasi, dan memberikan arahan sehingga kinerja Perseroan menjadi semakin baik.

Dan kepada seluruh karyawan yang telah bekerja secara *team-work* sehingga Perseroan mampu mencapai kinerja yang baik selama tahun 2016.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia dan hidayahNya kepada kita semua sehingga dapat bekerja dengan lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Om Santih Santih Santih Om



Ir. Akhmad Tito Karim, M.M.
Direktur Utama

Profil Direksi



- Akhmad Tito Karim**
Direktur Utama
- Ali Sodikin**
Direktur Teknik dan Operasi
- Ronny Haryanto**
Direktur Keuangan

Akhmad Tito Karim

Direktur Utama

Lahir di Lahat,
Sumatera Selatan, 27 Mei 1957.

Menjabat sebagai Direktur Utama PT Jasamarga Bali Tol sejak 5 Desember 2011.

Pada Januari 2006 menjabat Direktur Utama PT Trans Lingkar Kita Jaya. Pada Juli 2007 menjabat sebagai Direktur Operasi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JORR) merangkap sebagai Komisaris PT Trans Lingkar Kita Jaya.

Jabatan sebagai Komisaris tersebut masih dirangkap ketika ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar dari Juli 2010-Desember 2011 (Bogor Ring Road).

Mulai berkarir di Jasa Marga sejak Juni 1986 dan menggeluti bidang pengoperasian jalan tol hingga menjadi Kepala Cabang Padaleunyi-Citarum tahun 2001-2003, Kepala Cabang Jakarta-Cikampek tahun 2003-2006.

Lulus Teknik dari Universitas Sriwijaya 1984, menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen dari Ikopin Bandung 2006, pernah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan seminar Strategic and Business Leadership, Corporate Adventure, Assessment Center, Workshop Change Acceleration, Konvensi TQC Internasional di Kuala Lumpur, Studi Banding pada Traffic Control Tunnel Singapura.





Ali Sodikin

Direktur Teknik & Operasi

Lahir di Jepara, 10 Februari 1973.

Menjabat sebagai Direktur Teknik dan Operasi PT Jasamarga Bali Tol sejak 1 Juni 2016. Berkarir di Pelindo III sejak Tahun 2009, dan menapak di struktural mulai dari Assisten Manajer Pelayanan Kapal di Pelindo III Cabang Tanjung Intan, Cilacap sejak 27 April 2009.

Menduduki jabatan Manager Operasi dan Komersial, Cabang Benoa pada November 2009 kemudian rotasi menjadi Manager Pelayanan Terminal di cabang yang sama pada Januari 2012, menjadi Assisten Senior Manager Pelayanan Terminal Wilayah II pada April 2012, kemudian menjadi General Manager PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Benoa sejak November 2013 sebelum akhirnya ditugaskan rangkap jabatan sebagai Direktur Teknik dan Operasi PT Jasamarga Bali Tol.

Menempuh pendidikan formal di Akademi Pelayaran Niaga Indonesia Semarang (AKPELNI) D3 Jurusan Nautika Kepelautan, kemudian melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta ANT-1 Jurusan Nautika Lulus Tahun (2008).

Selain pendidikan formal, beberapa pelatihan dan program telah diikuti, diantaranya, Building Asustainable Relationship With Account dari MarkPlus Institute Of Marketing, Program Penjurangan Manajerial Tingkat Madya serie 1 PPM, Jakarta, pada April 2011. Pernah mengikuti Annual Cruise Down Under Conference 2010 dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang dilaksanakan di Brisbane, Australia pada September 2010, juga mengikuti Conference on Seatrade Cruise Shipping Miami 2011 dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang dilaksanakan di Miami - Florida pada Maret 2011.

Ali Sodikin juga memiliki Sertifikasi SDM Kepelabuhanan dari Kementerian Perhubungan, Pelatihan International Port Security yang dilaksanakan oleh APEC di Antwerp Belgia pada tahun 2013, dan beberapa pelatihan lain di dalam negeri antara lain: Basic Safety Training BPLP, Ship Handling and Maneuvering Course Pertamina Maritime Training Center, Mooring Master Training Pertamina Maritime training Center, Port Operation Management, dan Managerial Competency Enhancement.

Ronny Haryanto

Direktur Keuangan

Lahir di Bandung, 22 April 1961.

Menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Jasamarga Bali Tol sejak 5 Desember 2011.

Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan dan Akuntansi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sejak September 2006. Mulai berkarir di PT Jasa Marga (Persero) Tbk. pada Januari 1988.

Pernah menduduki berbagai posisi Manager di bidang akuntansi dan keuangan. Menjabat sebagai Pgs. Kepala Biro Perencanaan Perusahaan, Pgs. Kepala Unit PKBL.

Lulus pendidikan sarjana (S1) Ekonomi Manajemen dari Universitas Padjadjaran Bandung 1986, menyelesaikan pendidikan pasca sarjana (S2) bidang Ilmu Manajemen dari Universitas Indonesia 1998, mengikuti berbagai seminar dan pelatihan diantaranya: Accounting Conference and Doctoral, Workshop Financial Modeling for Project Finance, Applied Corporate Finance Training - Singapore, Pelatihan Leadership Training for Manager, Project Financing Asia - Regional Conference - Singapore.





LAPORAN KEGIATAN

- 75** Pengoperasian Dan Pemeliharaan
- 76** Pengadaan Tanah
- 77** Sengketa Klaim Tiang Pancang
- 78** Rencana Investasi
- 79** Kinerja Keuangan
- 80** Perjanjian Kolaborasi
- 81** Prospek Usaha Perseroan Ke Depan
- 82** Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- 83** Penutupan Jalan Tol dalam rangka Nyepi
- 84** Rapat Umum Pemegang Saham





Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pada tahun 2016, pengoperasian (dan pemeliharaan rutin) jalan tol sepenuhnya dilaksanakan oleh Perseroan. Seluruh personel bidang operasi tidak banyak mengalami kendala maupun masalah karena sebelumnya mereka adalah pegawai provider penyedia jasa pengoperasian jalan tol. Dampak yang terasa adalah anggaran Biaya Administrasi dan Umum meningkat cukup besar karena realokasi Beban SDM operasional yang semula di pos Beban Operasi.

Pencapaian volume lalin selama tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 volume lalin yang melintas di Jalan Tol Bali Mandara mencapai 14,3 juta kendaraan, pada tahun 2015 naik secara signifikan mencapai 16,5 juta kendaraan atau naik 15,3 %, dan tahun 2016 juga naik mencapai 17,4 juta kendaraan atau naik 6% dari tahun 2015.

TAHUN	2014	2015	2016
Volume Lalin (KR)	14,309,837	16,500,774	17,462,256
Kenaikan (%)		15%	6%

Selama tahun 2016, Perseroan juga telah menangani sendiri pemeliharaan rutin seperti pemeliharaan gerbang tol, pertamanan, penerangan jalan, peralatan tol, kendaraan operasional dan penyusunan database tiang pancang serta pemeliharaan aset-aset jalan tol yang lain. Sedangkan untuk pemeliharaan bangunan/struktur utama masih menjadi tanggung jawab penyedia jasa karena belum sepenuhnya diserahkan (*final hand over*).

Perseroan telah berhasil menyusun Sistem Monitoring Pemeliharaan yang terdiri dari item Tiang Pancang dan Struktur Bangunan Jalan.

Untuk system monitoring tiang pancang telah selesai pada tahun anggaran 2016, sedangkan untuk bagian-bagian struktur bangunan secara simultan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Selain itu, Perseroan juga telah mengasuransikan aset jalan tol dengan polis asuransi *Civil Engineering Completed Risks* (CECR). Hal ini sebagai langkah antisipasi sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Kredit dengan pihak Bank Kreditur.

PENGADAAN Tanah

Pengadaan tanah/lahan HPL milik PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), serta lahan non HPL untuk kantor operasional sampai akhir tahun 2016 masih menyisakan perbedaan pandangan antara BPKP dan BPK sehingga, Pemerintah c.q. Dirjen. Bina Marga, selaku penanggung jawab pengadaan tanah belum dapat memerintahkan Perseroan untuk pembayaran UGR.

Perseroan menyadari bahwa untuk membebaskan lahan HPL milik PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), serta lahan non HPL perairan dangkal di Teluk Benoa tidaklah mudah.

Pemerintah menghadapi dilema, di satu sisi BPKP memberikan fatwa bahwa, *"Pemberian ganti rugi yang dapat diberikan terkait Hak Pengelolaan Lahan sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 tahun 2007, Pasal 43 ayat (2) dan (3) hanya pembayaran ganti rugi atas bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah di atas tanah hak pakai atau hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah hak pengelolaan"*.

Di sisi lain, BPK RI dalam auditnya di PT Angkasa Pura I (Persero) menyatakan bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) berhak memperoleh ganti rugi atas lahan HPL yang dipakai untuk pembangunan Jalan Tol Bali Mandara.

Perseroan telah turut mendorong dan secara resmi mengajukan surat kepada Pemerintah Nomor: 191.00/JBT/AA.PP01.02, tanggal 26 Juni 2015, perihal penyelesaian pengadaan tanah dengan status Hak Pengelolaan lahan (HPL) PT Pelindo III (Persero) dan PT Angkasa Pura I (Persero) agar permasalahan lahan milik kedua BUMN tersebut segera dicarikan jalan keluar, namun sampai dengan akhir tahun 2016 belum memperoleh kepastian.

Mengingat wewenang pengadaan tanah adalah Pemerintah c.q. Bina Marga, Kementerian PUPR, maka posisi Perseroan baru dapat bertindak setelah ada permintaan pembayaran UGR dari Pemerintah. Sampai dengan akhir tahun 2016 pemberian ganti rugi atas tanah/lahan HPL milik PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) belum dapat direalisasikan meskipun Perseroan telah mengalokasikan anggaran uang ganti rugi (UGR) sejak RKAP 2013.



SENGKETA Klaim Tiang Pancang

Pada tahun 2016 Perseroan menghadapi Gugatan Klaim Kelebihan Volume Tiang Pancang dari Kontraktor Paket 2 dan 4 PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Gugatan tersebut sudah diajukan sejak tahun 2015. Pada akhir tahun 2015 Perseroan dan Kontraktor mengikuti sidang mediasi namun tidak tercapai kesepakatan sehingga proses persidangan dilanjutkan ke proses pemeriksaan perkara yang dimulai pada awal tahun 2016.

Untuk mendampingi perseroan selama proses persidangan, Perseroan menyewa Konsultan Hukum Wiyono Partnership Attorneys At Law dan Pengacara dari Law Office Erwin Siregar & Associates (ESA). Perseroan juga menghadirkan ke persidangan Ahli Hukum Kontrak Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, SH.,M.Hum dari Universitas Airlangga Surabaya, Ahli Hukum Geoteknik Prof. Dr. Indarto DEA dari ITS dan Ahli FIDIC Internasional berkebangsaan Jerman Dr. Gotz Sebastian Hok salah satu President's List of FIDIC assessed and listed Dispute Adjudicator yang bermarkas di Jenewa, Swiss.

Proses persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar memakan waktu sekitar 5 bulan dan putusannya dibacakan pada tanggal 20 Juni 2016 yang secara garis besar amar Putusannya mengabulkan sebagian besar Gugatan dari Kontraktor.

Atas Putusan tersebut Perseroan berkonsultasi dengan Konsultan Hukum Wiyono Partnership Attorneys At Law yang pada intinya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak menjawab pokok persoalan dan Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas perbedaan penafsiran dan lebih memfokuskan pada penunjukan BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Maka atas Putusan Majelis Hakim tersebut Wiyono Partnership Attorneys At Law merekomendasikan Perseroan untuk mengajukan Banding.

Pada tanggal 28 Juni 2016, Perseroan melalui Law Office Erwin Siregar & Associates (ESA) mengajukan banding. Dalam memori banding tersebut Perseroan melengkapi dengan pendapat hukum dari Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, SH.,M.Hum, Prof. Dr. Indarto DEA, dan Dr. Gotz Sebastian Hok.

Pada tanggal 23 Desember 2016 Perseroan menerima surat tembusan dari Pengadilan Tinggi Denpasar No. W.24-U/2592/HK.02/12/2016, perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara Perdata Banding Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 20 Desember 2016 No 156/PDT/2016/PT.Dps. Surat tersebut juga memuat petikan Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar untuk seluruhnya, Menolak Gugatan Kontraktor untuk seluruhnya, dan menghukum Kontraktor untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.



RENCANA Investasi

Pada tahun 2016, Perseroan mengalokasikan anggaran untuk investasi sebesar Rp 30,2 milyar, terdiri dari capex investasi dan capex operasional. Dari jumlah tersebut, alokasi terbesar adalah capex investasi berupa pembebasan tanah HPL atas kepemilikan PT Pelindo III (Persero) dan PT Angkasa Pura I (Persero), pekerjaan penyiapan lahan pembangunan gedung kantor operasional, dan rencana pembangunan gedung kantor operasional. Selebihnya adalah capex operasional.

Untuk capex investasi sendiri tidak banyak terserap mengingat terhambatnya pengadaan lahan sehingga pembangunan gedung kantor operasional belum dapat direalisasikan.

KINERJA Keuangan

Untuk kinerja keuangan, Perseroan mampu mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam revisi RKAP 2016. Target Pendapatan Tol dari rencana sebesar Rp 142,5 milyar, terealisasi Rp 143,2 milyar. Pendapatan Usaha Lain sedikit melebihi target, dari rencana Rp 1,745 juta menjadi Rp 1,775 juta. Rencana EBITDA yang semula ditargetkan Rp 89,8 milyar, tercapai Rp 98,3 milyar atau surplus sekitar 9%.

Perseroan, sebagaimana arahan Dewan Komisaris, telah melakukan pengetatan terhadap Beban Usaha agar tidak melebihi alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. Beban Usaha dalam RKAP 2016 dialokasikan sebesar Rp 54,4 milyar di luar Beban Konstruksi, Beban Provisi, Penyusutan dan Amortisasi. Dari alokasi tersebut terserap sebesar Rp 46,7 milyar, terjadi surplus sekitar Rp 7,7 milyar atau sebesar 14%.

Sedangkan Rugi usaha sebelum pajak tercapai lebih kecil dari target, yaitu rencana rugi sebesar Rp 80,1 milyar, realisasi rugi mengecil menjadi Rp 56,8 milyar atau terjadi deviasi positif sebesar Rp 23,3 milyar. Untuk Rugi-Laba Komprehensif yang ditetapkan dalam RKAP 2016 rugi sebesar Rp 101,9 milyar, realisasinya mengecil menjadi sebesar minus Rp 76,1 milyar atau terjadi deviasi positif sebesar Rp 25,7 milyar.



PERJANJIAN Kolaborasi

Pada tahun 2016, Perseroan menunaikan kewajiban membayar biaya kompensasi untuk pemeliharaan dan pelestarian kawasan hutan mangrove sebesar Rp 233 juta sebagaimana tertuang dalam kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Perseroan berkenaan dengan penggunaan sebagian kawasan hutan mangrove melalui Perjanjian Nomor: 075/13/PKS/B.PEM/IX/2013 (010/SPK-JBT/IX/2013) tanggal 9 September 2013 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai terkait pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa.

Perjanjian Kolaborasi ini ditetapkan oleh Menteri Kehutanan RI sebagai prasyarat penggunaan kawasan hutan mangrove yang dilintasi trase jalan tol.

PROSPEK USAHA PERSEROAN Ke Depan

Jalan Tol Bali Mandara secara geografis menghubungkan tiga kawasan strategis, menjanjikan peluang bisnis yang menggiurkan, baik di bidang properti maupun jaringan. Beberapa perusahaan berskala nasional menawarkan kerjasama pemasangan fiber optic, instalasi distribusi gas alam cair, serta potensial terhadap prospek usaha lain seperti distribusi air bersih, listrik, dan lain-lain.

Saat ini, Perseroan telah bekerjasama dengan PT Nusatel dan PT Telkom dalam bentuk sewa lokasi pemasangan fiber optic di sepanjang jalan tol. Pemasangan fiber optic ini dinilai lebih aman, dan ke depan dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan usaha lain.

Potensi usaha lain yang memiliki prospek yang

menjanjikan adalah pembangunan tempat pelayanan dan wisata berbentuk rest area. Di samping sebagai meeting point, area area tersebut memiliki potensi komersil mengingat letaknya yang sangat strategis dan menjadi satu kesatuan dengan jalan tol sehingga dapat dimanfaatkan untuk pelayanan sekaligus tujuan wisata.



TANGGUNG JAWAB Sosial Perusahaan

Pada tahun 2016, Perseroan masih menerima kunjungan study dari beberapa perguruan tinggi maupun study banding dari Pemerintah Daerah maupun lembaga lain. Perseroan juga sering diundang ke kampus-kampus dari beberapa perguruan tinggi untuk memberikan kuliah umum terkait dengan best practice pembangunan Jalan Tol Bali Mandara.

Mengingat Perseroan belum membukukan keuntungan, maka Perseroan belum dapat mengalokasikan anggaran untuk program CSR. Namun untuk memenuhi anggaran program CSR, Perseroan mengajukan bantuan kepada Pemegang Saham.

Untuk kegiatan ritual keagamaan maupun kemasyarakatan yang rutin, Perseroan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Melasti di akses Benoa, persembahyangan bulan Purnama, Tilem, Kajeng Kliwon, maupun

kegiatan lain yang jatuh secara periodik seperti Tumpak Landep serta persembahyangan yang bersifat insidental seperti Pecaruan Alit Ayam Brumbun dan Pekelem untuk Padmasana yang dibangun di dekat bundaran Ngurah Rai.

Pada pertengahan tahun 2016, Perseroan menjadi kepanjangan tangan Pemegang Saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk yaitu menyalurkan Paket Sembako murah, bantuan rumah ibadah, serta bantuan kepada anak yatim.



PENUTUPAN JALAN TOL dalam rangka Nyepi

Dalam rangkaian kegiatan Hari Raya Nyepi, Perseroan melaksanakan upacara Pecaruan Hari Suci Nyepi dan pengamanan kegiatan Melasti yang dilaksanakan di akses tol Jalan Raya Pelabuhan, Benoa serta memberikan bantuan tenda pada saat kegiatan melasti, bantuan partisipasi ogoh-ogoh ke banjar, dan bantuan konsumsi untuk para pecalang.

Pada perayaan Hari Raya Nyepi tersebut, atas seijin Menteri PU, Jalan Tol Bali Mandara ditutup selama 30 jam, mulai Rabu, 8 Maret 2016, mulai pukul 00:00 Wita (Selasa, 7 Maret 2016, pukul 24:00), dan akan dibuka kembali pada hari Kamis, 10 Maret 2016, mulai pukul 07:00 Wita.



RAPAT UMUM Pemegang Saham

Pada tahun 2016, Perseroan mengadakan RUPS sebanyak dua kali, yaitu RUPS Tahunan pada tanggal 18 Mei 2016, dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 2 Desember 2016.

Pada tahun 2016, Perseroan mengadakan RUPS sebanyak dua kali, yaitu RUPS Tahunan pada tanggal 18 Mei 2016, dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 2 Desember 2016.

Selain Agenda yang sudah ditetapkan, Keputusan penting dalam RUPS Tahunan tersebut adalah Keputusan Pemegang Saham mengenai Penggantian Pengurus, yaitu Direktur Teknik dan Operasi dan Komisaris Perseroan.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) III melalui surat Nomor: RH.671.1/KP.0403/ P.III.2015, tanggal 1 Desember 2015 mengusulkan penggantian Direktur Teknik dan Operasi yang

saat itu dijabat wakil dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) III, yaitu dari Ir. Rismarture Sidabutar, M.MT. kepada Ali Sodikin, M.Mar. Proses penggantian Direktur Teknik dan Operasi tersebut sebenarnya masih sedang berjalan secara sirkuler. Namun sampai dengan pelaksanaan RUPS Tahunan tanda-tangan Pemegang Saham belum lengkap.

Selain itu, di dalam RUPS Tahunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung melalui surat Nomor: 538/1738/Adm.Ek. tanggal 17 Mei 2016, perihal penggantian Komisaris mewakili Pemerintah Kabupaten Badung pada PT Jasamarga Bali Tol.



Para Pemegang Saham kemudian setuju memutuskan penggantian kedua Pengurus dimaksud di dalam RUPS Tahunan dan berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Juni 2016.

Sedangkan Keputusan Penting yang diambil dalam RUPS Luar Biasa tanggal 2 Desember 2016 adalah:

1) Persetujuan atas usulan RKAP 2017:

Menyetujui usulan RKAP dan Kontrak Manajemen Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) PT Jasamarga Bali Tol termasuk di dalamnya terdapat kewajiban Pemegang Saham untuk melakukan top up untuk mengatasi cash deficiency dan cost over-run sebagaimana lampiran Buku I RKAP 2017 (dua ribu tujuh belas) yang dilekatkan pada Notulen Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dengan catatan:

1. Pendapatan usaha dalam usulan RKAP 2017 (dua ribu tujuh belas) merupakan batas minimum dan beban usaha dalam usulan RKAP 2017 (dua ribu tujuh belas) merupakan batas maksimum.
2. Mengupayakan target cost saving melalui penurunan suku bunga kredit investasi menjadi 9,5 % (sembilan koma lima persen).
3. Terhadap kewajiban top up dari Pemegang Saham untuk mengatasi cash deficiency dan cost over-run, para Pemegang Saham memberikan persetujuan kepada Direksi untuk:

- 3.1. mengupayakan sekecil mungkin jumlah *top up*; dan/atau

secara sistemik maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk penguatan dalam penerapan GCG.

Di sisi lain, Perseroan masih mengalami defisit *cash-flow* sehingga perlu penajaman strategi pendanaan untuk memperkecil atau paling tidak memperlambat jadwal suntikan modal (*top up*) dari Pemegang Saham. Untuk itu, sesuai Keputusan RUPS LB Nomor: 33, tanggal 18 Desember 2013, Perseroan telah melakukan refinancing atau rekayasa finansial untuk mengatasi *cost overrun* maupun *cash deficiency*.

Sampai akhir tahun 2016 Perseroan belum mengajukan permintaan *top up* atau suntikan *equity*, meskipun dalam business plan, Perseroan diproyeksikan sudah harus mengajukan *top up* kepada Pemegang Saham sejak awal Pengoperasian.

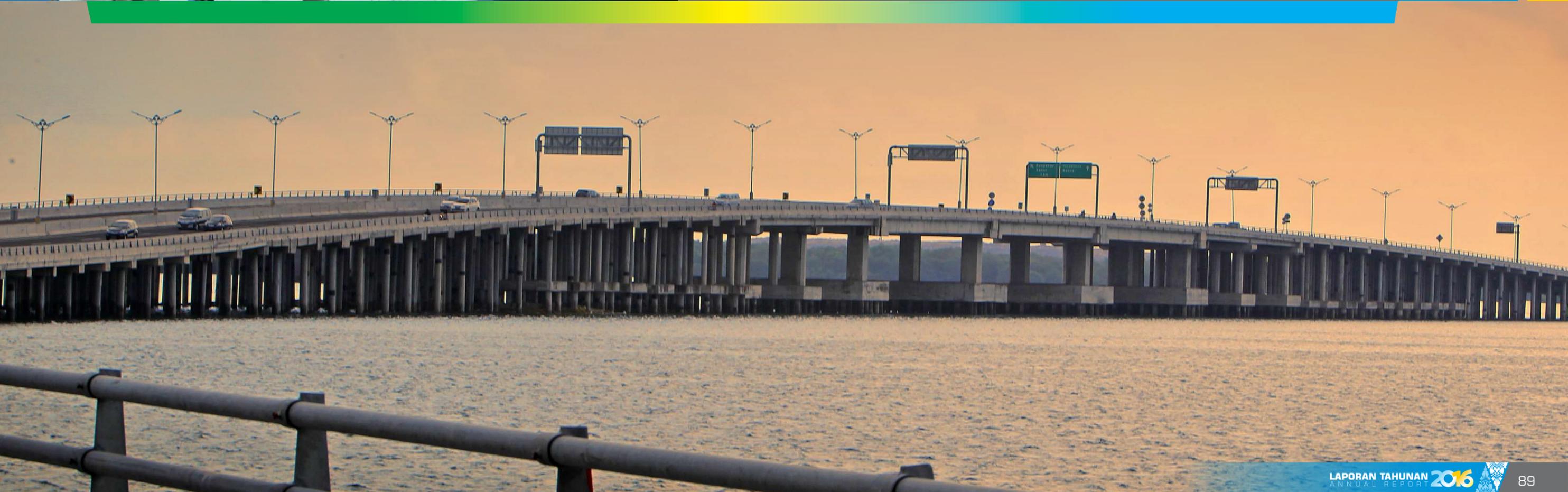
Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan operasional, Perseroan, atas persetujuan Pemegang Saham, menggunakan fasilitas kredit perbankan dan pendapatan tol.





ANALISA PEMBAHASAN MANAJEMEN

- 92** Laporan Aset
- 100** Laporan Liabilitas
- 109** Ekuitas
- 110** Kinerja Keuangan
- 117** Laporan Arus Kas





Analisa dan Pembahasan Manajemen

Analisis terkait dengan tinjauan keuangan berikut ini disajikan berdasarkan laporan keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Laporan keuangan ini telah diaudit oleh Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst and Young) melalui laporan Audit Nomor: RPC-3064/PSS/2017 tanggal 30 Januari 2017 dan telah mendapatkan opini wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 Lampiran Surat Keputusan No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan Posisi Keuangan

Posisi Keuangan Perseroan di tahun 2016 menunjukkan kinerja yang meningkat ditandai dengan tercapainya pendapatan tol yang lebih besar dari target, pendapatan usaha lebih besar dari rencana, naiknya EBITDA, dan rugi usaha yang lebih kecil dari rencana.

Pada tahun buku 2016, Perusahaan melakukan penelaahan dan mengkaji ulang atas estimasi umur masa manfaat ekonomis komponen Aset Tak berwujud berdasarkan kondisi teknis. Penyesuaian yang dilakukan atas masa manfaat komponen Aset Tak berwujud Hak Pengusahaan jalan tol dilakukan secara prospektif yang terinci mencakup masamfaat ekonomis aset, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisiteknis.

Atas dasar kajian tersebut, tercatat total Aset perseroan mengalami penurunan sebesar 4,3% dibandingkan tahun 2015. Penurunan tersebut sebagai akibat adanya penyusutan/amortisasi.

Selanjutnya Analisa dan Pembahasan secara rinci disajikan sebagai berikut:

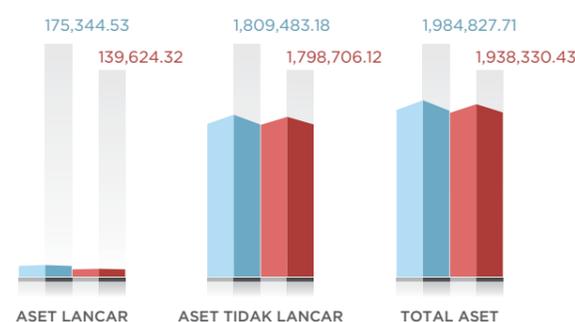
LAPORAN ASET 2015 dan 2016

ASET

Komposisi Aset 2016 Dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp Juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Aset Lancar	175,344.53	139,624.32	(35,720.2)	(20.4)
Aset Tidak Lancar	1,809,483.18	1,798,706.12	(10,777.1)	(0.6)
Total Aset	1,984,827.71	1,938,330.43	(46,497.3)	(2.3)



2015 2016

Definisi

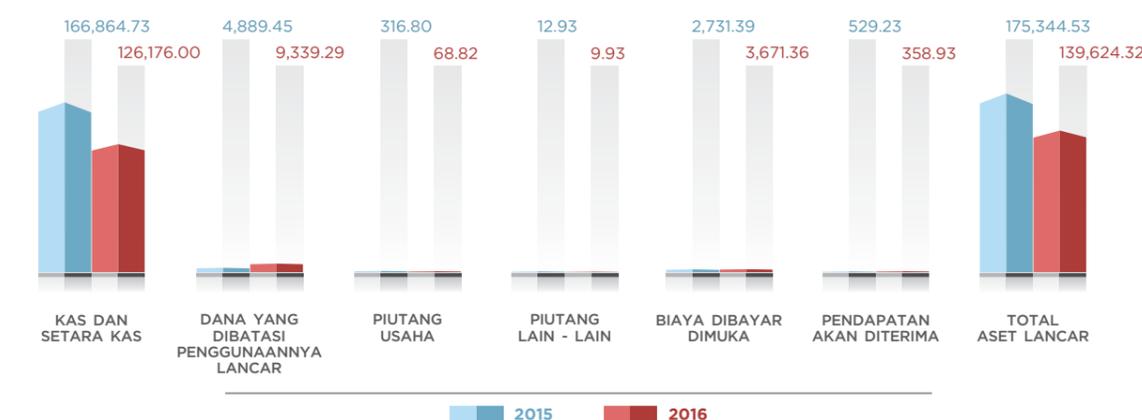
Total aset perseroan adalah Rp 1.938.330,4 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 46.497,2 juta atau 2,3% dibandingkan tahun 2015. Penurunan tersebut disebabkan karena penyusutan/amortisasi.

LAPORAN ASET LANCAR

Komposisi Aset 2016 Dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp Juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Kas dan Setara Kas	166,864.73	126,176.00	(40,688.7)	(24.4)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Lancar	4,889.45	9,339.29	4,449.8	91.0
Piutang Usaha	316.80	68.82	(248.0)	-
Piutang Lain - lain	12.93	9.93	(3.0)	(23.2)
Biaya Dibayar Dimuka	2,731.39	3,671.36	940.0	34.4
Pendapatan Akan Diterima	529.23	358.93	(170.3)	(32.2)
Total Aset Lancar	175,344.53	139,624.32	(35,720.2)	(20.4)



2015 2016

Definisi

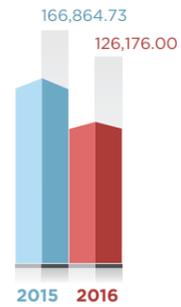
Secara keseluruhan perolehan Aset Lancar Perseroan turun 20,20% dari sebesar Rp 175.344,5 juta di tahun 2015 menjadi sebesar Rp 139.624,3 juta di tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran bunga bank dan pembayaran hutang kepada rekanan.

Laporan Kas Dan Setara Kas

Komposisi Kas dan Setara Kas 2016 Dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Kas dan Setara Kas	166,864.73	126,176.00	(40,688.73)	(24.38)



Definisi

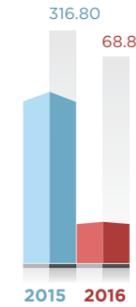
Kas dan Setara Kas perseroan turun 24,38% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 166.864,7 Juta menjadi 126.176 Juta di tahun 2016. Penurunan ini disebabkan karena adanya pembayaran bunga bank, biaya operasional, dan pembayaran hutang kepada dan rekanan.

Piutang Usaha

Komposisi Piutang Usaha 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Piutang Usaha	316.8	68.8	(247.98)	(78.28)



Definisi

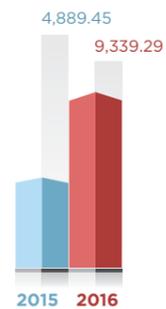
Perseroan pada tahun 2016 memiliki piutang usaha sebesar Rp 68,8 juta. Piutang tersebut merupakan kontrak dengan PT Pertamina Lubricants.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Lancar

Komposisi Dana yang dibatasi penggunaannya 2015 dibandingkan dengan 2014

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	4,889.45	9,339.29	4,449.84	91.01



Definisi

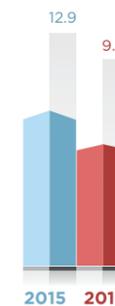
Pada tahun 2016 dana yang dibatasi penggunaannya bagian lancar terjadi peningkatan sebesar 91,01 % dari Rp 4.889.4 juta menjadi 9.339,3 juta. Peningkatan tersebut terjadi karena peningkatan pendapatan tol dan penurunan suku bunga pinjaman kredit investasi dari tahun sebelumnya.

Piutang Lain-lain

Komposisi Piutang Lain-Lain 2015 dibandingkan dengan 2014

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Piutang Lain-Lain	12.9	9.9	(3.00)	(23.22)



Definisi

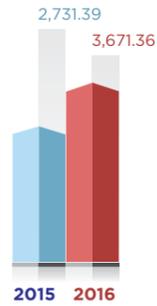
Piutang lain-lain merupakan piutang pegawai terhadap perseroan. Dimana piutang hanya diperbolehkan untuk biaya pengobatan pegawai dan keluarga. Pada tahun 2016 terjadi penurunan Piutang lain-lain dari Rp 12,9 juta menjadi 9,9 juta.

Biaya Dibayar Dimuka

Komposisi Biaya Dibayar Dimuka 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Biaya Dibayar Dimuka	2,731.39	3,671.36	939.97	34.41



Definisi

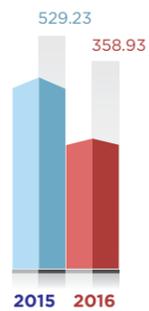
Terjadi peningkatan sebesar 34,42 % terhadap biaya dibayar dimuka dibandingkan dengan tahun 2015 biaya dimuka sebesar Rp 2.731,3 juta menjadi Rp 3.671,3 juta di tahun 2016. Peningkatan ini terjadi akibat pengakuan biaya perpanjangan Kredit Investasi direverse menjadi biaya dibayar dimuka sebesar Rp 900 juta.

Pendapatan Akan Diterima

Komposisi Pendapatan Akan Diterima 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Pendapatan Akan Diterima	529.23	358.93	(170.30)	(32.18)



Definisi

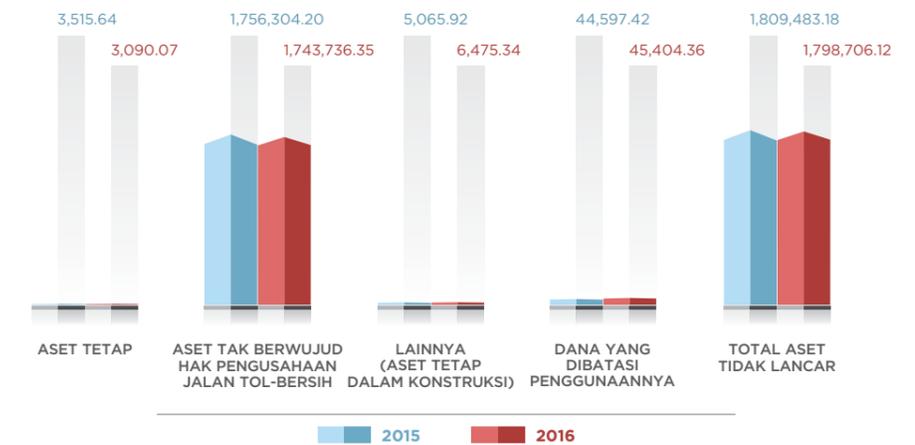
Pendapatan akan diterima merupakan pendapatan Bunga Deposito. Penurunan terjadi sebesar 32,18% dari Rp 529,2 juta di tahun 2015 menjadi Rp 358,9 di tahun 2016. Penurunan ini adalah dampak dari penurunan kas dan setara kas perseroan di tahun 2016.

ASET TIDAK LANCAR

Komposisi Aset Tidak Lancar 2016 Dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp Juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Aset Tetap	3,515.64	3,090.07	(425.6)	(12.1)
Aset Tak berwujud Hak Pengusahaan Jalan Tol-Bersih	1,756,304.20	1,743,736.35	(12,567.9)	(0.7)
Lainnya (aset tetap dalam konstruksi)	5,065.92	6,475.34	1,409.4	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Tidak Lancar	44,597.42	45,404.36	806.9	1.8
Total Aset Tidak Lancar	1,809,483.18	1,798,706.12	(10,777.1)	(0.60)



Definisi

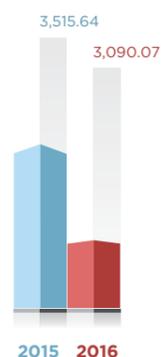
Aset tidak lancar perseroan ditahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,60% dari Rp 1.809.483,00 juta ditahun 2015 menjadi Rp 1.798.706,1 juta. Penurunan nilai aset disebabkan oleh Penyusutan/Amortisasi.

Aset Tetap

Komposisi Aset Tetap 2015 dibandingkan dengan 2016

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Aset Tetap	3,515.64	3,090.07	(425.57)	(12.11)



Definisi

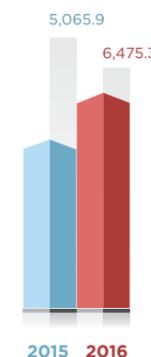
Nilai aset tetap perseroan di tahun 2016 sebesar Rp 3.090,00 juta dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp 3.515,6 terjadi penurunan sebesar 12,11%. Penurunan nilai aset tetap juga dipengaruhi oleh biaya penyusutan.

Lainnya (aset tetap dalam konstruksi)

Komposisi aset lainnya (aset tetap dalam konstruksi) 2016 dibandingkan 2015

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Lainnya (aset tetap dalam konstruksi)	5,065.9	6,475.3	1,409.4	27.82



Definisi

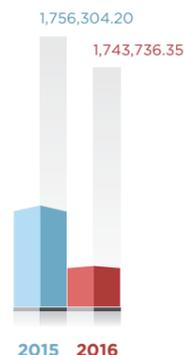
Terjadi peningkatan pada aset tetap dalam konstruksi di tahun 2016 sebesar 27,82% dari Rp 5.065,9 juta pada tahun 2015 dan sebesar Rp 6.475,3 juta di tahun 2016. Peningkatan terjadi karena terdapat tambahan biaya yang akan dikapitalisasi sebagai harga perolehan gedung kantor.

Aset Takberwujud Hak Pengusahaan Jalan Tol-Bersih

Komposisi Aset Takberwujud Hak Pengusahaan Jalan Tol-Bersih 2015 dibandingkan dengan 2016

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Aset Takberwujud Hak Pengusahaan Jalan Tol-Bersih	1,756,304.20	1,743,736.35	(12,567.85)	(0.72)



Definisi

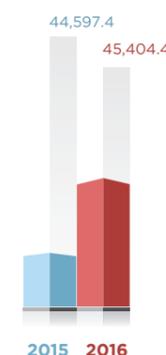
Penurunan nilai aset tak berwujud (HPJT) pada tahun 2016 sebesar 0,72 % Rp 1.743.736,3 juta ditahun 2016 dan sebesar Rp. 1.756.304,1 juta di tahun 2015. Penurunan diakibatkan karena Amortisasi HPJT di tahun 2016 sebesar Rp 12.567,8 juta.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Tidak Lancar

Komposisi dana yang dibatasi penggunaannya tidak lancar 2016 dibandingkan 2015

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Tidak Lancar	44,597.4	45,404.4	806.9	1.8



Definisi

Terjadi peningkatan sebesar 1,8% terhadap akun ini ditahun 2016 dibanding tahun 2015. tahun 2016 sebesar Rp 45.404,3 juta dan tahun 2015 sebesar Rp 44.597,4 juta.

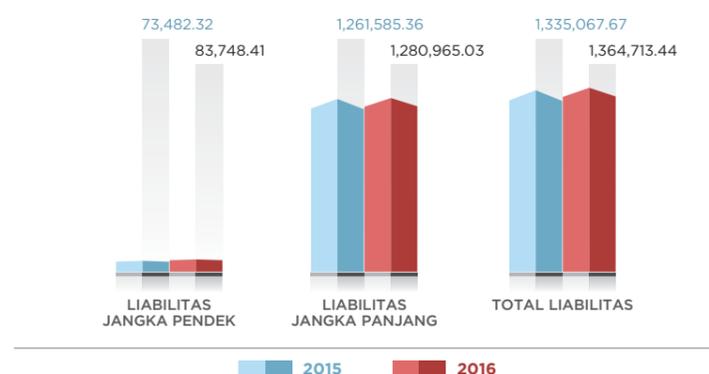
LAPORAN LIABILITAS 2015 dan 2016

LIABILITAS

Komposisi Liabilitas 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp Juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Liabilitas Jangka Pendek	73,482.32	83,748.41	10,266.09	13.97
Liabilitas Jangka Panjang	1,261,585.36	1,280,965.03	19,379.68	1.54
Total Liabilitas	1,335,067.67	1,364,713.44	29,645.76	2.22



Definisi

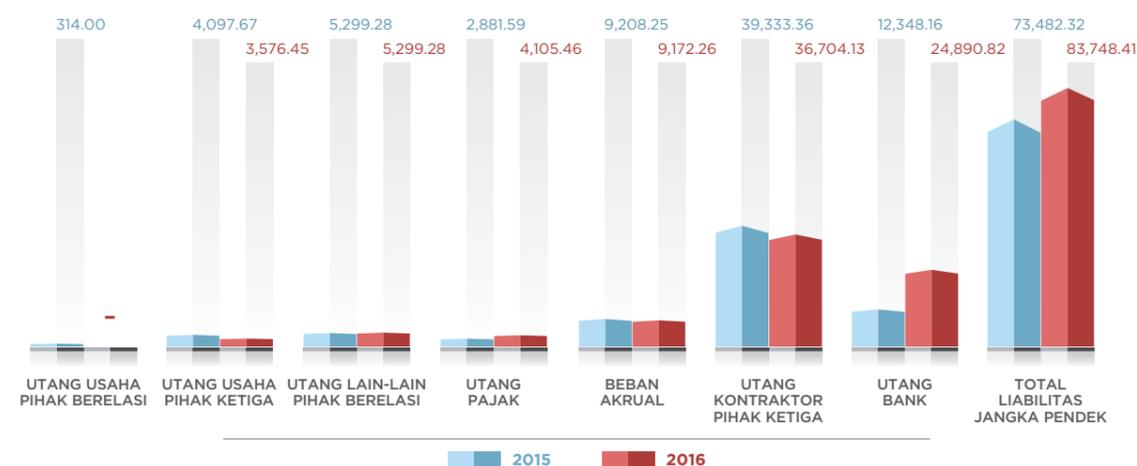
Liabilitas perseroan pada tahun 2016 Rp 1.364.713,5 juta dan tahun 2015 sebesar Rp 1.335.067,6 juta. Terjadi peningkatan sebesar 2,22% atau Rp 29.645,9 juta dibanding tahun 2015. Peningkatan diakibatkan ditahun 2016 perseroan melakukan pengakuan Povisi pelapisan jalan tol, tambahan hutang PBB dan tambahan liabilitas pajak tangguhan mengingat perseroan masih merugi sampai tahun 2016.

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Komposisi Liabilitas Jangka Pendek 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp Juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Utang Usaha-Pihak Berelasi	314.00	-	(314.00)	(100.00)
Utang Usaha-Pihak Ketiga	4,097.67	3,576.45	(521.22)	(12.72)
Utang Lain-lain-Pihak Berelasi	5,299.28	5,299.28	-	-
Utang Pajak	2,881.59	4,105.46	1,223.87	42.47
Beban Akrual	9,208.25	9,172.26	(35.99)	(0.39)
Utang Kontraktor-Pihak Ketiga	39,333.36	36,704.13	(2,629.23)	(6.68)
Utang Bank	12,348.16	24,890.82	12,542.66	101.58
Total Liabilitas Jangka Pendek	73,482.32	83,748.41	10,266.09	13.97



Definisi

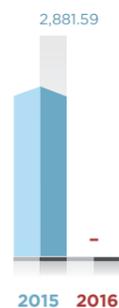
Pada tahun 2016 terjadi peningkatan terhadap liabilitas jangka pendek/hutang jangka pendek sebesar 13,97 % dibandingkan tahun 2015. Nilai liabilitas jangka pendek di tahun 2016 sebesar Rp 83.748,4 juta dan tahun 2015 sebesar Rp 73.482,3 juta. Peningkatan terjadi karena ditahun 2016 perseroan sudah menggunakan fasilitas KMK dari Bank Mandiri dan reklasifikasi pencatatan atas hutang bank jangka panjang ke hutang bank jangka pendek.

Utang Usaha-Pihak Berelasi

Komposisi Utang Usaha-Pihak Berelasi 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Utang Usaha-Pihak Berelasi	314.00	-	(314.00)	(100.00)



Definisi

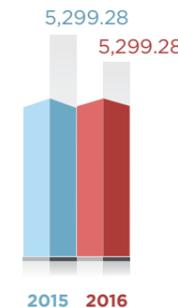
Sampai dengan tahun 2016 perseroan tidak mencatat adanya hutang dengan pihak berelasi, sedangkan tahun 2015 tercatat sebesar Rp 314 juta.

Utang Lain-lain-Pihak Berelasi

Komposisi Utang Lain-lain-Pihak Berelasi 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Utang Lain-lain-Pihak Berelasi	5,299.28	5,299.28	-	-



Definisi

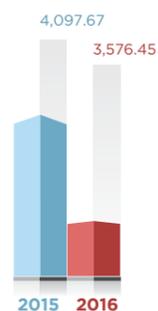
Utang lain-lain pihak berelasi adalah hutang biaya praoperasi kepada pemegang saham. Sampai dengan tahun 2016 tidak terjadi perubahan terhadap nilai hutang lain-lain pihak berelasi.

Utang Usaha-Pihak Ketiga

Komposisi Utang Usaha-Pihak Ketiga 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Utang Usaha-Pihak Ketiga	4,097.67	3,576.45	(521.22)	(12.72)



Definisi

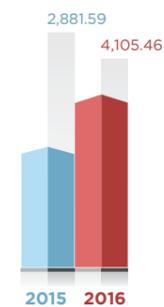
Terjadi penurunan pencatatan Hutang Usaha Pihak Ketiga di tahun 2016 sebesar 12,72 % di bandingkan dengan tahun 2015 dengan nilai masing-masing sebesar Rp 3.576,5 juta dan 4.097,6 juta.

Utang Pajak

Komposisi Utang Pajak 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Utang Pajak	2,881.59	4,105.46	1,223.87	42.47



Definisi

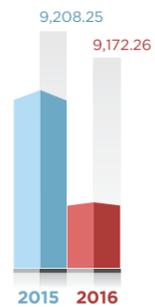
Utang pajak perseroan meningkat di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. nilai hutang pajak tahun 2016 Rp 4.105,4 juta sedangkan tahun 2015 Rp 2.881,5 juta. Peningkatan terjadi akibat pengakuan hutang PBB di tahun 2016.

Beban Akrua

Komposisi Beban Akrua 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Beban Akrua	9,208.25	9,172.26	(35.99)	(0.39)



Definisi

Terjadi penurunan terhadap akun beban akrual di tahun 2016 sebesar 0,39% atau Rp 36 juta dibanding tahun 2015. Akun ini adalah pengakuan beban bunga hutang bank KI sampai akhir tahun buku. Penurunan diakibatkan penurunan suku bunga pinjaman KI di tahun 2016.

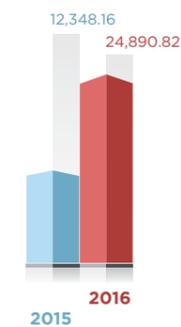
Utang Bank

Komposisi Utang Bank 2016 dibandingkan dengan 2015

(yang jatuh tempo dalam 1 Tahun)

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Utang Bank	12,348.16	24,890.82	12,542.66	101.58



Definisi

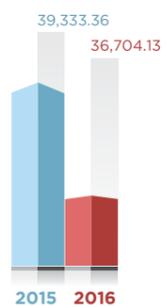
Utang bank jatuh tempo dalam satu tahun pada tahun 2016 meningkat diakibatkan karena perhitungan pembayaran pokok sudah dengan tarif 1,25% baki debit sedangkan tahun 2015 dengan tarif 0,75% baki debit. Selain itu pada tahun 2016 perseron juga telah menggunakan fasilitas KMK dari Bank Mandiri sebesar Rp 7.900 juta.

Utang Kontraktor-Pihak Ketiga

Komposisi Utang Kontraktor-Pihak Ketiga 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Utang Kontraktor-Pihak Ketiga	39,333.36	36,704.13	(2,629.23)	(6.68)



Definisi

Terjadi penurunan hutang kontraktor di tahun 2016. Hutang kontraktor pada tahun 2016 dimaksud adalah hutang retensi atas pembangunan jalan tol

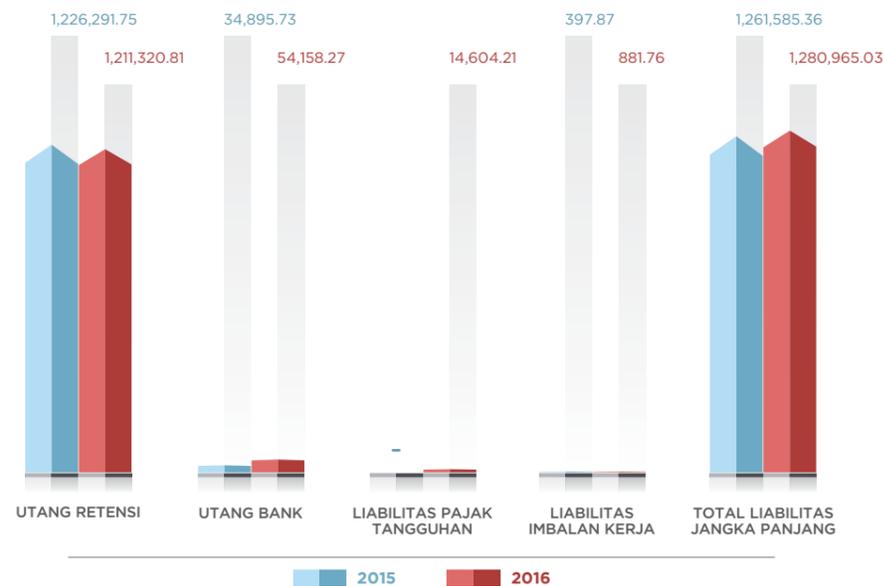


LIABILITAS JANGKA PANJANG

Komposisi Liabilitas Jangka Panjang 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp Juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Utang Retensi	1,226,291.75	1,211,320.81	(14,970.95)	(1.22)
Utang bank	34,895.73	54,158.27	19,262.54	55.20
Liabilitas Pajak Tangguhan	-	14,604.21	14,604.21	
Liabilitas Imbalan Kerja	397.87	881.76	483.88	121.62
Total Liabilitas Jangka Panjang	1,261,585.36	1,280,965.03	19,379.68	1.54



Definisi

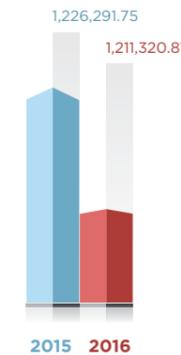
Secara total liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan sebesar 1,54 % di tahun 2016 dengan nilai Rp 1.280.965,1 juta dan Rp 1.261.585,2 juta di tahun 2015. Peningkatan liabilitas jangka panjang diakibatkan perseroan pada tahun 2016 telah mengakui beban provisi pelapisan jalan tol yang ditangguhkan dibanding tahun 2015 yang belum mengakui beban provisi pelapisan jalan tol.

Utang Bank

Komposisi Utang Bank 2016 dibandingkan dengan 2015 (yang jatuh tempo lebih dari 1 Tahun)

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Utang bank	1,226,291.75	1,211,320.81	(14,970.95)	(1.22)



Definisi

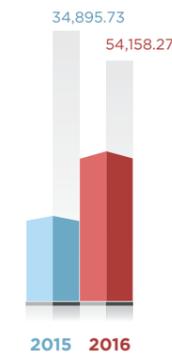
Utang bank mengalami penurunan sebesar 1,22 % dibanding tahun 2015. Penurunan ini disebabkan perseroan telah mengangsur hutang pokok selama tahun 2016 dan adanya reklasifikasi pencatatan hutang bank jangka panjang ke hutang bank jangka pendek dimana nilai hutang bank tahun 2016 sebesar Rp 1.211.320,8 juta dan tahun 2015 sebesar Rp 1.226.291,7 juta.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Komposisi Liabilitas Pajak Tangguhan 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Liabilitas Pajak Tangguhan	34,895.73	54,158.27	19,262.54	55.20



Definisi

Liabilitas pajak tangguhan meningkat. Liabilitas pajak tangguhan meningkat akibat akumulasi dari tahun 2015. Selain itu pada tahun 2016 liabilitas pajak tangguhan meningkat sebesar Rp 19.262,6 juta. Peningkatan tersebut juga dipengaruhi perbedaan kontemporer antara perhitungan amortisasi HPJT secara Fiskal dan secara Komersial.

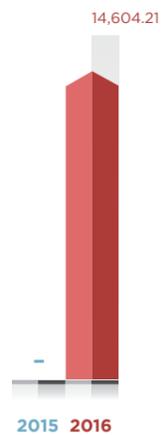
EKUITAS 2015 dan 2016

Provisi Pelapisan Jalan Tol

Komposisi Provisi Pelapisan Jalan Tol 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Provisi Pelapisan Jalan Tol	-	14,604.21	14,604.21	



Definisi

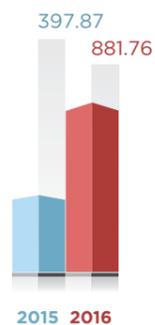
Pada Tahun 2016 perseroan telah melakukan pencatatan pengakuan terhadap akun Provisi Pelapisan Jalan Tol dibandingkan dengan tahun 2015 yang belum melakukan pencatatan terhadap akun tersebut. Pencatatan ini didasarkan pada RKAP perseroan tahun 2016.

Liabilitas Imbalan Kerja

Komposisi Liabilitas Imbalan Kerja 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Liabilitas Imbalan Kerja	397.87	881.76	483.88	121.62



Definisi

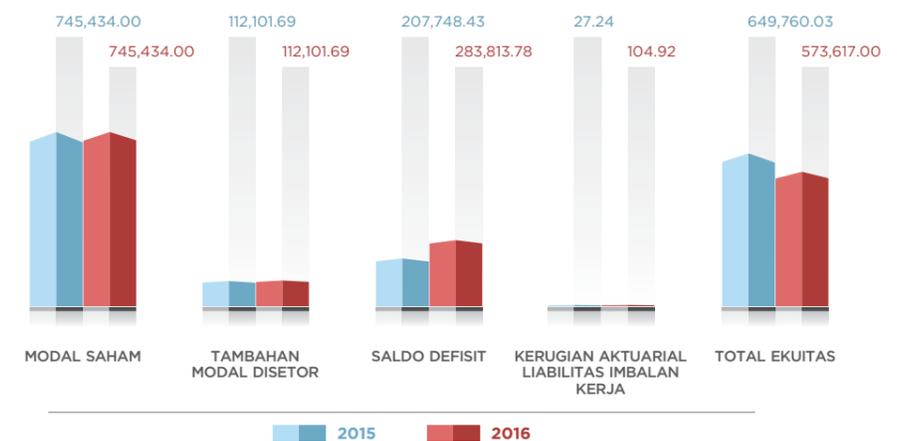
Liabilitas imbalan kerja meningkat secara garis lurus seiring dengan telah dioperasikannya secara penuh jalan tol oleh perseroan tanpa melalui pihak ketiga. Tahun 2016 jumlah karyawan tetap perseroan mencapai 140 orang dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya 125 orang.

EKUITAS

Komposisi Ekuitas 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp Juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Modal Saham	745,434.00	745,434.00	-	-
Tambahan Modal Disetor	112,101.69	112,101.69	-	-
Saldo Defisit	207,748.43	283,813.78	76,065.36	36.61
Kerugian Aktuarial Liabilitas Imbalan Kerja	27.24	104.92	77.68	285.20
Total Ekuitas	649,760.03	573,617.00	(76,143.04)	(11.72)



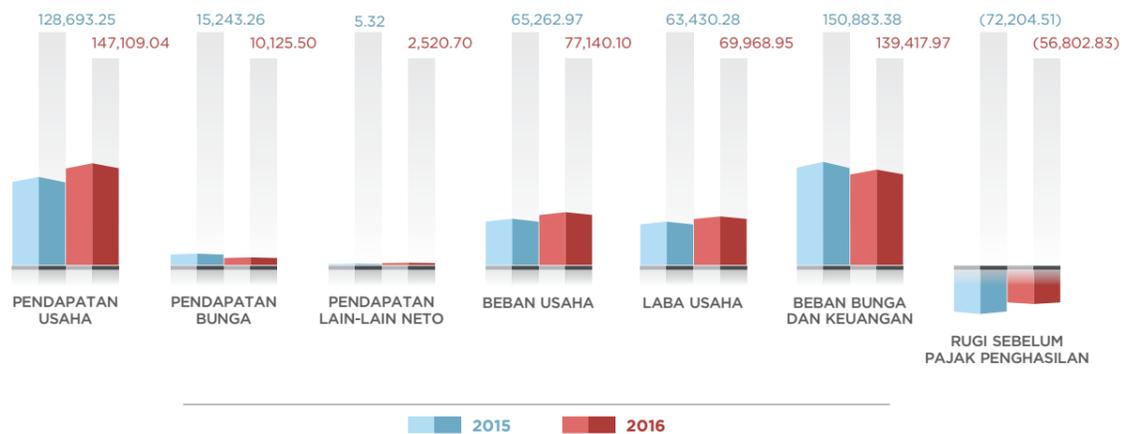
Definisi

Perseroan mencatat jumlah ekuitas tahun 2016 sebesar Rp 573.616,9 juta. Kondisi tersebut mengalami penurunan 11,72% atau sebesar Rp 76.143,1 juta dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp 649.760 juta. Penurunan ini diakibatkan pada tahun buku 2016 Perseroan mengalami kerugian sebesar Rp 76.143,1 juta.

KINERJA KEUANGAN 2015 dan 2016

(dalam Rp Juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Pendapatan Usaha	128,693.25	147,109.04	18,415.79	14.31
Pendapatan Bunga	15,243.26	10,125.50	(5,117.77)	(33.57)
Pendapatan Lain-lain Neto	5.32	2,520.70	2,515.38	472.64
Beban Usaha	65,262.97	77,140.10	11,877.13	18.20
Laba Usaha	63,430.28	69,968.95	6,538.66	10.31
Beban Bunga dan Keuangan	150,883.38	139,417.97	(11,465.41)	(7.60)
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(72,204.51)	(56,802.83)	15,401.68	(21.33)

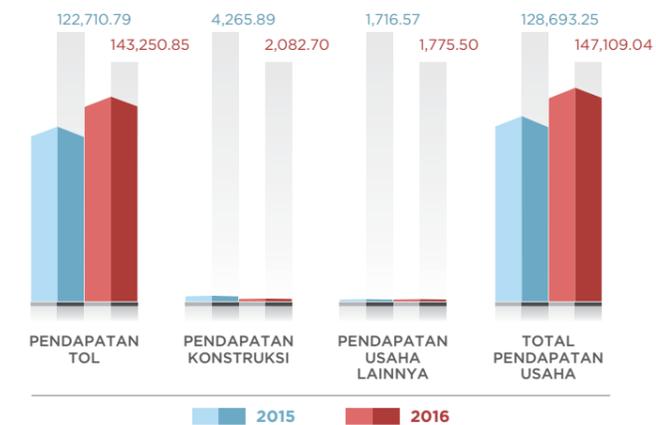


Pendapatan Usaha

Komposisi Pendapatan Usaha 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp Juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Pendapatan Tol	122,710.79	143,250.85	20,540.06	16.74
Pendapatan Konstruksi	4,265.89	2,082.70	(2,183.20)	(51.18)
Pendapatan Usaha Lainnya	1,716.57	1,775.50	58.93	3.43
Total Pendapatan Usaha	128,693.25	147,109.04	18,415.79	14.31



Definisi

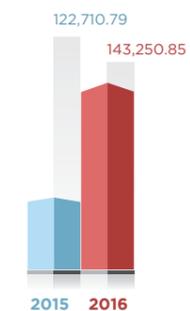
Pendapatan usaha perseroan terdiri dari Pendapatan Tol, Pendapatan Konstruksi, dan Pendapatan Usaha Lainnya. Selama tahun 2016 pendapatan usaha perseroan mencapai Rp 143.109,05 juta atau naik 14,31% dari pendapatan usaha tahun 2015 sebesar Rp 128.693 juta. Dari segi pendapatan tol terjadi peningkatan sebesar 16,74% dari Rp 122.710,7 juta di tahun 2015 menjadi Rp 143.250,85 juta di tahun 2016. Sedangkan pendapatan konstruksi mengalami penurunan sebesar 51,18% dari Rp 4.265,8 juta di tahun 2015 menjadi Rp 2.082,7 juta di tahun 2016.

Pendapatan Tol

Komposisi Pendapatan Tol 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Pendapatan Tol	122,710.79	143,250.85	20,540.06	16.74



Definisi

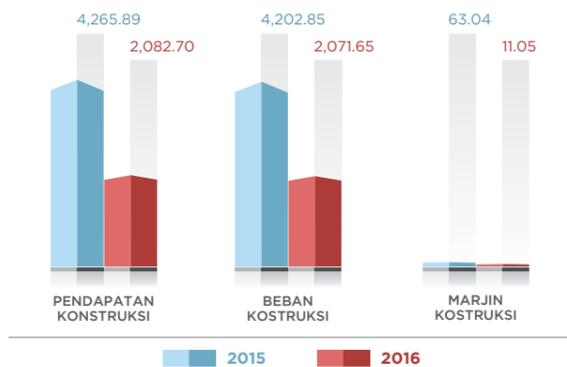
Pendapatan tol terjadi peningkatan sebesar 16,74% dari Rp 122.710,7 juta di tahun 2015 menjadi Rp 143.250,85 juta di tahun 2016. Peningkatan terhadap pendapatan tol di akibatkan pada tahun buku 2016 terjadi peningkatan terhadap lalu lintas pada jalan tol.

Pendapatan Konstruksi

Komposisi Pendapatan Konstruksi 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp Juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Pendapatan Konstruksi	4,265.89	2,082.70	(2,183.20)	(51.18)
Beban Konstruksi	4,202.85	2,071.65	(2,131.20)	(50.71)
Marjin Konstruksi	63.04	11.05	(51.99)	(82.47)



Definisi

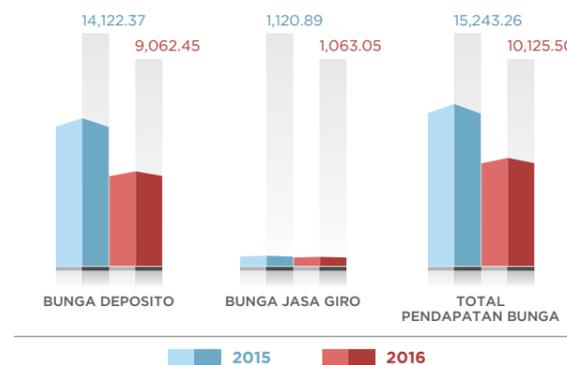
Pada tahun 2016, pendapatan konstruksi Rp 2.082,7 juta dengan jumlah beban konstruksi Rp 2.071,65 juta dan marjin konstruksi Rp 11,05 juta atau turun 82,46% dari tahun sebelumnya. Penurunan disebabkan karena telah beroperasi jalan tol.

Pendapatan Bunga

Komposisi Pendapatan Bunga 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp Juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Bunga Deposito	14,122.37	9,062.45	(5,059.92)	(35.83)
Bunga Jasa Giro	1,120.89	1,063.05	(57.84)	(5.16)
Total Pendapatan Bunga	15,243.26	10,125.50	(5,117.77)	(33.57)



Definisi

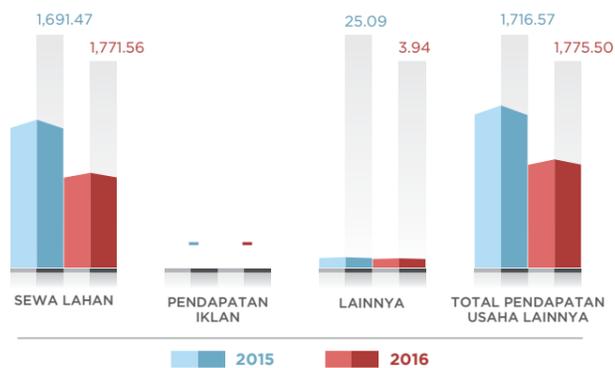
Pada tahun 2016, pendapatan bunga mengalami penurunan 33,57% atau sebesar Rp 5.117,6 juta di bandingkan tahun 2015 sebesar Rp 23.512 juta. Penurunan pendapatan bunga disebabkan oleh penurunan rate suku bunga BI pada masing-masing bank dan menurunnya kas dan setara kas perseroan.

Pendapatan Usaha Lainnya

Komposisi Pendapatan Usaha lainnya 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp Juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Sewa Lahan	1,691.47	1,771.56	80.09	4.73
Pendapatan Iklan	-	-	-	-
Lainnya	25.09	3.94	(21.16)	(84.31)
Total Pendapatan Usaha Lainnya	1,716.57	1,775.50	58.93	3.43



Definisi

Pendapatan usaha lainnya pada tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 3,44 % dibandingkan tahun 2015. pada tahun 2015 nilai pendapatan usaha lainnya sebesar Rp 1.716,4 juta dan Rp 1.775,46 juta ditahun 2016.

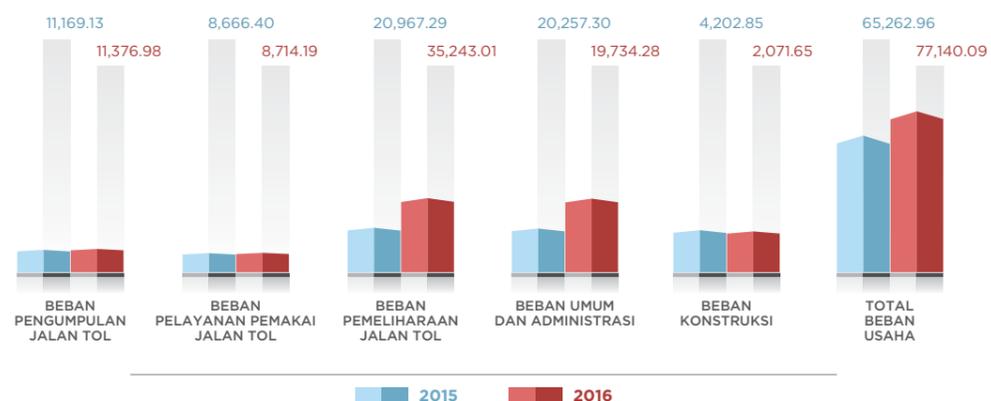


Beban Usaha

Komposisi Beban Usaha 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp Juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Beban Pengumpulan Jalan Tol	11,169.13	11,376.98	207.85	1.86
Beban Pelayanan Pemakai Jalan Tol	8,666.40	8,714.19	47.79	0.55
Beban Pemeliharaan Jalan Tol	20,967.29	35,243.01	14,275.72	68.09
Beban Umum dan Administrasi	20,257.30	19,734.28	(523.02)	(2.58)
Beban Konstruksi	4,202.85	2,071.65	(2,131.20)	(50.71)
Total Beban Usaha	65,262.96	77,140.09	11,877.13	18.20



Definisi

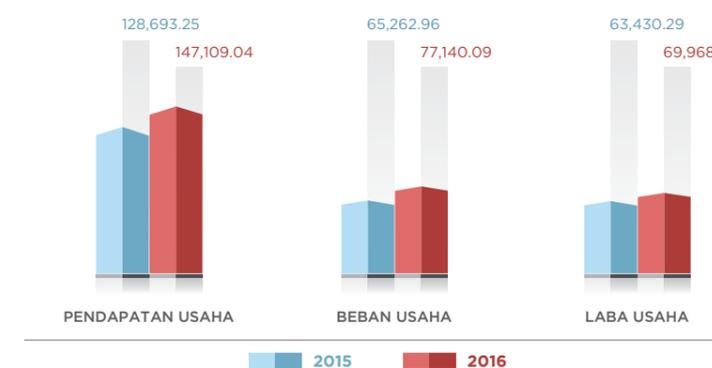
Pada tahun 2016 secara total beban usaha meningkat sebesar 18,20% dari Rp 65.262,96 juta di tahun 2015 dibanding tahun 2016 Rp 77.140,09 juta. Peningkatan secara signifikan terdapat pada akun Beban Pemeliharaan Jalan Tol, dimana terjadi peningkatan beban sebesar Rp 14.275,81 juta di tahun 2016 yang disebabkan oleh pengakuan Beban Provisi Jalan Tol.

Laba Usaha

Komposisi Laba Usaha 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp Juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Pendapatan Usaha	128,693.25	147,109.04	18,415.79	14.31
Beban Usaha	65,262.96	77,140.09	11,877.13	18.20
Laba Usaha	63,430.29	69,968.95	6,538.66	10.31



Definisi

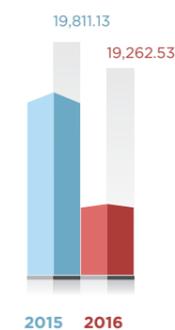
Laba usaha perseroan di tahun 2016 mencapai Rp 69.968,95 juta. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari tahun 2015 yang mencapai Rp 63.430,3 juta. Hal ini sesuai dengan kenaikan kinerja perseroan dan telah penuh beroperasi dalam setahun sehingga pendapatan tol meningkat.

Beban Bunga dan Keuangan

Komposisi Beban Bunga dan Keuangan 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Beban Bunga dan Keuangan	150,883.38	139,417.97	(11,465.41)	(7.60)



Definisi

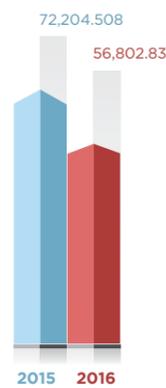
Tahun 2016 perseroan mencatat beban bunga menurun sebesar 7,60%, pada tahun 2015 sebesar Rp 150.883,3 juta dan tahun 2016 Rp 139.417,97 juta. Penurunan ini diakibatkan selama tahun 2016 perseroan telah membayar angsuran Pokok Kredit Investasi dan didukung pula oleh penurunan suku bunga Kredit Investasi.

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan

Komposisi Rugi Sebelum Pajak Penghasilan 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	72,204.508	56,802.83	(15,401.68)	(21.33)



Definisi

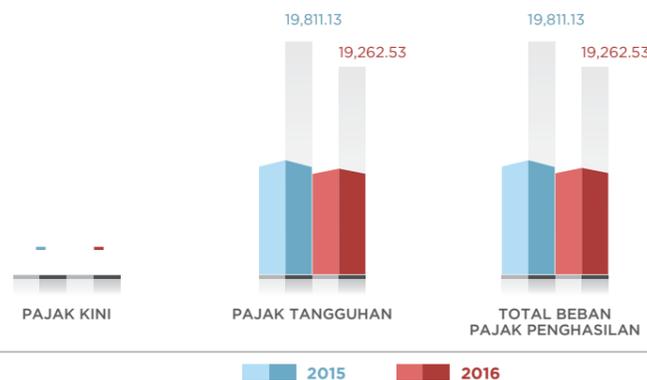
Perseroan mencatat rugi sebelum pajak penghasilan tahun buku 2016 sebesar Rp 56.802,83 juta terjadi penurunan atas rugi dibandingkan tahun 2015 sebesar 21,33%. Penurunan ini diakibatkan efisiensi dari perseroan dan juga meningkatnya pendapatan usaha perseroan, khususnya pendapatan tol selama tahun 2016

Beban Pajak Penghasilan

Komposisi Beban Pajak Penghasilan 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp Juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Pajak Kini	-	-	-	-
Pajak Tangguhan	19,811.13	19,262.53	(548.60)	(2.77)
Total Beban Pajak Penghasilan	19,811.13	19,262.53	(548.60)	(2.77)



Definisi

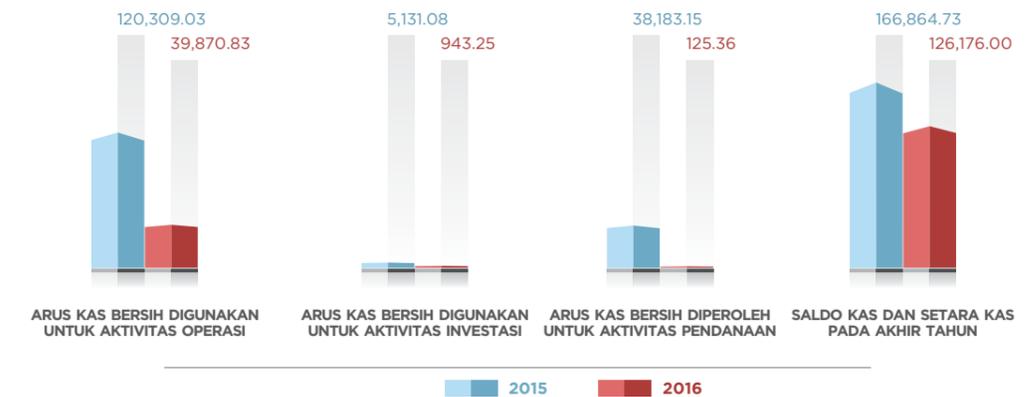
Beban Pajak penghasilan Tahun 2016 menurun sebesar 2,77% dari tahun 2015 sebesar Rp 19.262,53 juta.

LAPORAN ARUS KAS

Komposisi Laporan Arus Kas 2016 dibandingkan dengan 2015

(dalam Rp Juta)

Uraian	2015	2016	Rp	%
Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Operasi	120,309.03	39,870.83	(80,438.20)	(66.86)
Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi	5,131.08	943.25	(4,187.82)	(81.62)
Arus Kas Bersih diperoleh untuk Aktivitas Pendanaan	38,183.15	125.36	(38,057.79)	(99.67)
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	166,864.73	126,176.00	(40,688.73)	(24.38)



Definisi

- Arus kas bersih dari Aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar 66,86 % diakibatkan berkurangnya pengadaan barang dan jasa ditahun 2016 dibandingkan tahun 2015.
- Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi mengalami penurunan dari Rp 5.131 juta di tahun 2015 menjadi Rp 943,26 juta di tahun 2016.
- Arus kas bersih dari Aktifitas Pendanaan mengalami penurunan signifikan sebesar 99,67% dari Rp 38.183,1 juta di tahun 2015 menjadi Rp 125,73 ditahun 2016.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

- 121** Tata Kelola Perusahaan
- 122** Organ Tata Kelola Perusahaan
- 123** Kegiatan Manajemen Untuk Mendukung Kegiatan Perseroan





Tata Kelola Perusahaan

Perseroan telah bertekad untuk menjadi perusahaan yang tumbuh berkembang dan berdaya saing tinggi, maka perlu melandasi dengan struktur dan sistem Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

Tujuan Memberlakukan GCG:

Mengacu pada pemberlakuan GCG dari Pemegang Saham, Perseroan menerapkan GCG dengan tujuan:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Perseroan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, karyawan, pelanggan, mitra kerja, masyarakat dan lingkungan agar berjalan dengan baik, harmonis, serta akomodatif terhadap semua kepentingan.
2. Mendorong dan mendukung Perseroan agar tumbuh dan berkembang.
3. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
4. Mengelola risiko secara lebih tersistem.
5. Meningkatkan pertanggung jawaban kepada stake-holders.
6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.
7. Memperbaiki budaya kerja Perseroan.
8. Meningkatkan citra perusahaan menjadi lebih baik.

ORGAN TATA KELOLA Perusahaan

1. UU Nomor: 40 Tahun 2007
2. Anggaran Dasar Perseroan
3. Rapat Umum Pemegang Saham
4. Dewan Komisaris
5. Direksi Perseroan
6. Peraturan-peraturan Perusahaan

KEGIATAN MANAJEMEN Untuk Mendukung Kegiatan Perseroan

1. Pelaksanaan RUPS (Fisik dan Sirkuler tahun 2016)
2. RAGAB
3. Pemenuhan SK Direksi dan Ketentuan Perusahaan Yang Lain
4. Rapat Senior Leader
5. Penyusunan RJPP 2015 - 2018
6. Sistem Manajemen Mutu Terpadu (ISO 9001:2008, OSHAS, K3)
7. Sertifikasi ISO 9001:2008
8. Penyusunan Laporan KPKU Kinerja 2016
(malcolm Baldrige)



Rapat Umum Pemegang Saham, Tahun Buku 2015



TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

128 Tanggung Jawab Sosial

129 Tanggung Jawab Lingkungan





Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pelaksanaan pembangunan jalan tol Bali Mandara tidak terlepas dari kajian sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam menjalankan aktifitasnya, perseroan mendasarkan pada triple bottom line: people, planet, dan profit

Tanggung Jawab Sosial

- Upakara Persembahyangan setiap hari (banten di Kantor JBT, Kantor Operasional, Gerbang Tol, dan Padmasari)
- Sarana Persembahyangan setiap setiap purnama, tilem Kajeng Kliwon
- Sarana Persembahyangan Insidentil (upacara Pecaruan, Tumpak Landep, Pakelem)
- Rangkaian Kegiatan Nyepi 2015 - upacara Pecaruan Hari Suci Nyepi dan Melasti - bantuan tenda untuk kegiatan melasti, bantuan partisipasi pembuatan ogoh-ogoh, bantuan kepada Pecalang

Tanggung Jawab Lingkungan

Kompensasi untuk pemeliharaan dan pengembangan mangrove melalui perjanjian kolaborasi

Pada tahun 2016, Perseroan menunaikan kewajiban membayar biaya kompensasi untuk pemeliharaan dan pelestarian kawasan hutan mangrove sebesar Rp 233 juta sebagaimana tertuang dalam kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Perseroan berkenaan dengan penggunaan sebagian kawasan hutan mangrove melalui Perjanjian Nomor: 075/13/PKS/B.PEM/IX/2013 (010/SPK-JBT/IX/2013) tanggal 9 September 2013 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai terkait pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Bena.

Perjanjian Kolaborasi ini ditetapkan oleh Menteri Kehutanan RI sebagai prasyarat penggunaan kawasan hutan mangrove yang dilintasi trase jalan tol.





PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

134 Komposisi Karyawan

135 Program SDM





Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

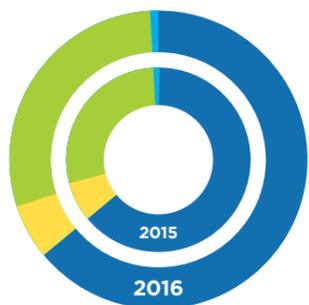
Untuk mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan, saat ini PT. Jasamarga Bali Tol berusaha mengoptimalkan pendayagunaan SDM yang ada.

Perubahan terbaru pada komposisi tenaga kerja adalah perubahan alih tugas dari tenaga pengoperasian Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) ke JBT, serta peningkatan status dari PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) ke PKWTT (Pekerjaan Waktu Tidak Tertentu).

Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan per 31 Desember 2016 adalah 143 orang, sedangkan jumlah karyawan pada tahun 2015 adalah 131 orang.

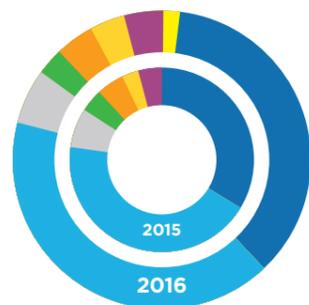
Komposisi Karyawan

Komposisi Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan



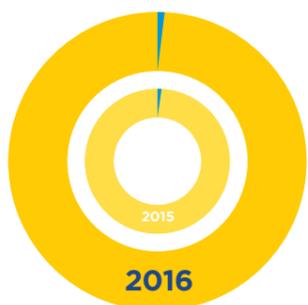
	2015	2016
S2	1 = 1%	1 = 1%
S1	37 = 28%	41 = 29%
Diploma	9 = 7%	9 = 6%
SMA	84 = 64%	92 = 64%
TOTAL	131 = 100%	143 = 100%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia



	2015	2016
<20 Tahun	0 = 0%	3 = 2%
20 - 25 Tahun	44 = 34%	51 = 36%
26 - 30 Tahun	58 = 44%	58 = 41%
31 - 35 Tahun	9 = 7%	9 = 6%
36 - 40 Tahun	5 = 4%	4 = 3%
41 - 45 Tahun	6 = 5%	6 = 4%
46 - 50 Tahun	4 = 3%	6 = 4%
> 51 Tahun	5 = 4%	6 = 4%
TOTAL:	131 = 100%	143 = 100%

Komposisi Karyawan berdasarkan Status



	2015	2016
Karyawan Tetap	129	141
Karyawan Tidak Tetap	2	2
Total	131	143

Program SDM

Pendidikan dan Pelatihan

Pada tahun 2016 Manajemen telah memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan pendidikan, keterampilan dan kompetensi karyawan yaitu:

1. Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
2. Workshop Penerapan GCG Berkelanjutan
3. Training SMK3 OHSAS 180001 & PP No. 50/2012
4. Developing & Managing Personality at Work



Developing & Managing Personality at Work

Program Kesejahteraan

1. Pada bulan Juli 2016 telah dilaksanakan kenaikan gaji berkala,
2. Memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 2 (dua) kali penghasilan,
3. Pemberian Insentif masa kerja tahun 2015 sebesar 2 kali penghasilan,
4. Telah dilaksanakan Employee Gathering pada bulan Nopember 2016 di Alam Rafting Telaga Waja - Karangasem, Bali yang di ikuti oleh 150 orang (karyawan & rekanan).



Employee
Gathering



Program Kesehatan

1. Melakukan kerjasama pelayanan kesehatan bagi Komisaris, Direksi, serta karyawan dan keluarganya dengan :
 - a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
 - b. Lembaga Asuransi Mandiri In Health;
2. Program Uji Kesehatan Berkala (UKB) bagi Karyawan yang dilaksanakan 1 tahun sekali.





DATA PERUSAHAAN

141 Susunan Pemegang Saham

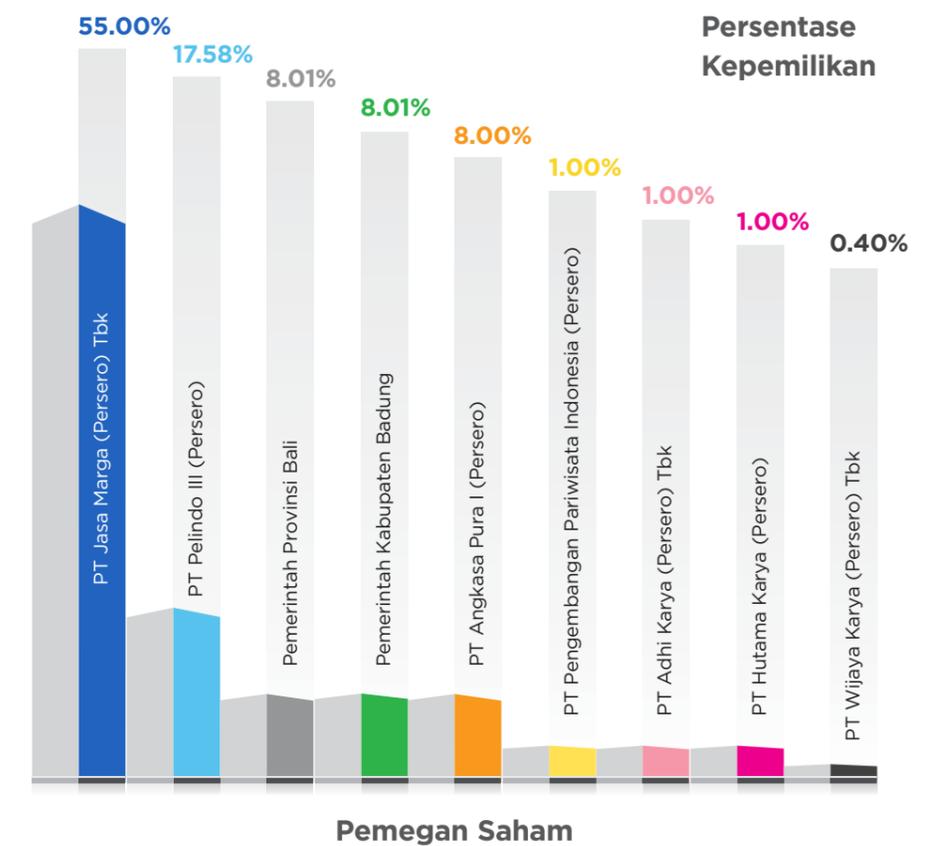
142 Daftar Kunjungan





Susunan Pemegang Saham

Susunan Pemegang Saham sebagai berikut:



DAFTAR Kunjungan

14
JANUARI
2016



Kunjungan Mahasiswa UGM

11
MEI
2016



Kunjungan Universitas Mercu Buana

20-24
FEBRUARI
2016



Kunjungan Anjuran Koperasi LLM Berhad, Malaysia.

24
MEI
2016



Kunjungan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

14
APRIL
2016



Kunjungan Mahasiswa UNS, Surakarta

26
MEI
2016



Kunjungan Divisi Risk Manajemen

10
JUNI
2016



Kunjungan DPD RI
I Gusti Arya Wedakarna

10
OKTOBER
2016



Kunjungan
Penilaian Pajak

27
JULI
2016



Kunjungan ITB Bandung

10
NOVEMBER
2016



Kunjungan DPRD Bogor
dan Provinsi

24
SEPTEMBER
2016



Kunjungan Kerja
Komisaris dan Direksi
PT Jasa Marga (persero) Tbk.

13
DESEMBER
2016



Kunjungan
Komisi V DPR RI



TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

148 Kontrak Manajemen

152 Realisasi KPI

157 Tanggung Jawab Manajemen



**KONTRAK MANAJEMEN
TENTANG TARGET UKURAN KINERJA UTAMA DAN PENCAPAIAN TARGET
REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (“RKAP”) TAHUN 2016
ANTARA
PEMEGANG SAHAM, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT JASAMARGA BALI TOL**

Nomor: 07/JBT/KON-KPI/XI/2016

Pada hari ini, Rabu tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas (12-10-2016), Pemegang Saham PT Jasamarga Bali Tol yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, Dewan Komisaris PT Jasamarga Bali Tol yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** dan Direksi PT Jasamarga Bali Tol yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**, berdasarkan:

1. Bahwa Revisi RKAP tahun 2016 Perseroan telah disusun oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan telah mempertimbangkan semua risiko yang terukur.
2. Bahwa Revisi RKAP tahun 2016 telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan persetujuan pemegang saham dengan Keputusan Pemegang Saham Perseroan tanggal 12 Oktober 2016.
3. Berdasarkan surat PT Jasa Marga (Persero) Tbk nomor: AA.KU01.318 tanggal 31 Maret 2011 mengenai perlu diterapkannya pengukuran kinerja melalui Key Performance Indicator (KPI) yang dilaksanakan mulai tahun 2012.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk menandatangani Kontrak Manajemen tentang Target Ukuran Kinerja Utama dan Pencapaian Target RKAP tahun 2016 yang selanjutnya disebut Kontrak Manajemen sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menetapkan Ukuran Kinerja Utama (*Key Performance Indicator/KPI*) beserta bobot dan target sebagai alat untuk memantau pencapaian sasaran RKAP tahun 2016 sebagaimana lampiran Kontrak Manajemen ini.

Hal 1 dari 4

Pasal 2

PIHAK KEDUA akan melakukan pemantauan, pengukuran dan evaluasi atas pencapaian target-target KPI Tahun 2016 tersebut di atas yang dilakukan **PIHAK KETIGA**.

Pasal 3

PIHAK KETIGA berjanji akan mengupayakan pencapaian target-target RKAP tahun 2016 tersebut termasuk target-target Ukuran Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) dengan indikator, pembobotan serta target kuantitatifnya sebagaimana terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II Kontrak Manajemen ini.

Pasal 4

a) Sehubungan dengan kesanggupan **PIHAK KETIGA** untuk mengupayakan pencapaian target-target RKAP tahun 2016 sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas, maka secara periodik baik triwulanan dan tahunan, **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan pelaksanaan pencapaian target-target tersebut serta memberikan penjelasan secara rinci apabila terjadi deviasi atau penyimpangan atas pencapaiannya dalam laporan Kinerja Perseroan.

b) Laporan Kinerja Perseroan triwulanan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah triwulan terlampaui dan Laporan Kinerja Perseroan tahunan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun yang bersangkutan terlampaui.

Pasal 5

Sehubungan dengan pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 di atas, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan penghargaan atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Kontrak Manajemen ini dibuat oleh Para Pihak dengan penuh kesadaran dan itikad baik serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hal 2 dari 4

PIHAK PERTAMA

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.


M. NAJIB FAUZAN

PT Pelindo III (Persero)


HUSEIN DAJIH

Pemerintah Kabupaten Badung


Drs. I Ketut Sutrisna, SH

PT Angkasa Pura I (Persero)


M. ASRORI

Pemerintah Provinsi Bali


CHUSOH
(NABUATH LABA)

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)


W. KARIJAKA

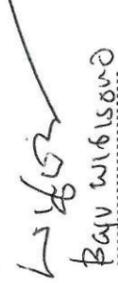
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.


PRANELLY
ARIEFF

PT Hutama Karya (Persero)

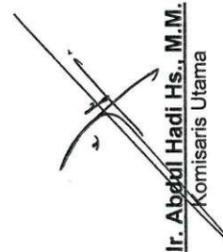

WIDI SARWO

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.


BAYU WILSONO

Hal 3 dari 4

PIHAK KEDUA


Ir. Abadi Hadi Hs., M.M.
Komisaris Utama


U. Saefudin Noer
Komisaris


Robert Daniel Waloni
Komisaris


Ir. Wawan Blayu Suarijaya
Komisaris


Kompyang Raka Swandika, SH, MH.
Komisaris


Ir. I Gusti Putu Nuriatha, MM
Komisaris



Ir. Akhmad Tito Karim, M.M.
Direktur Utama

PIHAK KETIGA



Drs. Ronny Haryanto
Direktur Keuangan



Ali Sodikin, M.Mar
Direktur Teknik dan Operasi

Hal 4 dari 4

UKURAN KINERJA UTAMA PT JASAMARGA BALI TOL
TAHUN 2016
ANAK PERUSAHAAN TAHAP OPERASI

PERSPEKTIF	KEY PERFORMANCE INDICATOR	FORMULA	PERIODE PENGUKURAN	SATUAN	BOBOT	Realisasi 2016		SCORE	
						Target 2016 1 Tahun	Realisasi 2016 1 Tahun		Renc
KEUANGAN DAN PASAR	1 Pertumbuhan EBITDA	$\frac{\text{Realisasi EBITDA Tahun Berjalan} - \text{Realisasi EBITDA Tahun Sebelumnya} \times 100\%}{\text{Realisasi EBITDA Tahun Sebelumnya}}$	Triwulanan	Persentase	8	15,48%	22,80%	32	40
	2 Pertumbuhan Pendapatan Tol	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Tol Tahun Berjalan} - \text{Realisasi Pendapatan Tol Tahun Sebelumnya} \times 100\%}{\text{Realisasi Pendapatan Tol Tahun Sebelumnya}}$	Triwulanan	Persentase	9	13,90%	14,34%	36	45
	3 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Usaha terhadap Beban Usaha	$\frac{\text{Pendapatan Usaha Tahun Berjalan} - \text{Pendapatan Usaha Tahun Sebelumnya}}{\text{Beban Usaha Tahun Berjalan} - \text{Beban Usaha Tahun Sebelumnya}}$	Triwulanan	Persentase	9	33,4%	11,34%	36	45
	4 Indeks Kepuasan Pelanggan	Sesuai dengan Metode CSI yang Digunakan	Semesteran	Indeks	6	4	4,57	24	30
FOKUS PELANGGAN	5 Pencapaian Volume Lalu Lintas Transaksi	$\frac{\text{Realisasi Volume Lalu Lintas Transaksi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$	Triwulanan	Persentase	7	100%	101%	28	35
	6 Pemenuhan SPM	SPM sudah terpenuhi atau belum terpenuhi	Semesteran	Indeks	7	1	1	35	35
EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES	7 Kecepatan Tempuh Rata-rata di Jalan Tol Dibandungkan Jalan Non-Tol	$\frac{\text{Kecepatan Tempuh Rata-rata di Jalan Tol}}{\text{Kecepatan Tempuh Rata-rata di Jalan non-tol}}$	Semesteran	Indeks	11	1,6	2,5	44	55
	8 Program Peningkatan Pelayanan	"Realisasi Jumlah Program" / "Rencana Jumlah Program" x 100%	Semesteran	Persentase	11	100%	100%	44	44
FOKUS TENAGA KERJA	9 Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{Pendapatan Usaha} \times 100\%}{\text{Jumlah Karyawan}}$	Triwulanan	Persentase	6	100%	101%	24	30
	10 Pengendalian Formasi Non Struktural	$\frac{\text{Pendapatan Usaha} \times 100\%}{\text{Operasional} / \text{Rencana} \times 100\%}$	Triwulanan	Persentase	5	100%	100%	25	25
	11 Kompetensi Teknis dan Non Teknis (Hard Skill & Soft Skill)	"Realisasi Jumlah Hari Pelatihan" x 100% / Rencana	Triwulanan	Persentase	5	100%	125%	20	25
KEPEMIMPINAN, TATAKELOLA & TANGGUNG JAWAB KEMASTARAKATAN	12 KPKU Score	Pencapaian Skor KPKU	Tahunan	Score	8	345	432	32	40
	13 Pemenuhan Kebutuhan Assessment GCG	$\frac{\text{Realisasi Pemenuhan Assessment GCG} / \text{Rencana} \times 100\%}{\text{Rencana}}$	Tahunan	Persentase	8	100%	100%	32	32
TOTAL BOBOT					100			412	481

Ir. Akhmad Tito Karim, M.M.
Direktur Utama

DATA DUKUNG UKURAN KINERJA UTAMA PT JASAMARGA BALI TOL

TAHUN 2016
ANAK PERUSAHAAN TAHAP OPERASI

PERSPEKTIF	KEY PERFORMANCE INDICATOR	RENCANA s.d TW - 4	REALISASI		KETERANGAN	PERIODE PENGUKURAN	SATUAN	BOBOT	Rating 2015	
			s.d TW - 4	14.34%					KPI >	R% >
KEUANGAN DAN PASAR	1 Pertumbuhan EBITDA	89,807,875,726	98,321,854,656	108.3%	EBITDA Tahun Berjalan	Triwulanan	Persentase	8	KPI >	R% >
		75,906,071,305	75,906,071,305	100.0%	EBITDA Tahun Sebelumnya				R% * 95% < KPI <=	R% <=
		13,901,804,421	22,415,783,351	161.9%	Pertumbuhan EBITDA				R% * 90% < KPI <=	R% * 95%
		15.48%	22.80%	147.4%					R% * 85% < KPI <=	R% * 90%
KEUANGAN DAN PASAR	2 Pertumbuhan Pendapatan Tol	142,522,913,500	143,250,846,206	101.3%	Total Pendapatan Tol Tahun Berjalan	Triwulanan	Persentase	9	KPI >	R% >
		122,710,788,907	122,710,788,907	100.0%	Total Pendapatan Tol Tahun Sebelumnya				R% * 95% < KPI <=	R% <=
		19,812,124,593	20,540,057,299	103.7%	Total Pertumbuhan Pendapatan Tol				R% * 90% < KPI <=	R% * 95%
		13.90%	14.34%	103.1%					R% * 85% < KPI <=	R% * 90%
KEUANGAN DAN PASAR	3 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Usaha terhadap Beban Usaha	124,427,357,205	124,427,357,205	100.0%	Pendapatan Usaha Tahun Sebelumnya	Triwulanan	Persentase	9	KPI >	R% >
		144,268,217,363	145,026,342,854	100.6%	Pendapatan Usaha Tahun Berjalan				R% * 95% < KPI <=	R% <=
		48,521,285,900	48,521,285,900	100.0%	Beban Usaha Tahun Sebelumnya				R% * 90% < KPI <=	R% * 95%
		54,460,341,637	46,704,488,198	85.8%	Beban Usaha Tahun Berjalan				R% * 85% < KPI <=	R% * 90%
		334%	113.4%	Rasio (Di Luar Margin Konstruksi, Amortisasi, Depresiasi, dan Provisi Overlay)						
FOKUS PELANGGAN	4 Indeks Kapuasan Pelanggan	4	4.57	114.3%	Hasil Survei Customer Satisfaction Index (CSI) dengan Skala 1 - 6	Semesteran	Indeks	6	KPI >	R% >
									R% * 95% < KPI <=	R% <=
FOKUS PELANGGAN	5 Pencapaian Volume Lalu Lintas Transaksi	17,272,032	17,462,256	101.1%	Volume Lalu Lintas Transaksi Triwulanan APJT	Triwulanan	Persentase	7	KPI >	R% >
									R% * 95% < KPI <=	R% <=

FOKUS PELANGGAN	6	Pemenuhan SPM	1	1	SPM terpenuhi = 1 SPM tidak terpenuhi = 0	Semesteran	Indeks	7	KPI = KPI = 0	5
	7	Kecapatan Tempuh Rata-rata di Jalan Tol Dibanding Jalan Non-Tol	1.6	2.5	Jumlah Ruas Terkait Standar Pelayanan Minimum Kecapatan Tempuh Rata-rata: 1. JT APJT : > kali kecapatan tempuh rata-rata jalan non-tol (Atteri) 2. Jalan Arteri (Non Tol) : > kali kecapatan tempuh rata-rata jalan tol APJT	Semesteran	Indeks	11	KPI > KPI = KPI <	5 4
EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES	8	Program Peningkatan Pelayanan	2	2	Program-program peningkatan pelayanan : 1. Pembuatan U Turn Akses Benoa 2. Pemasangan ALB	Semesteran	Persentase	11	R * 95% < KPI < R R * 90% < KPI < R * 95% R * 85% < KPI < R * 90%	5 4 3 2
	9	Productivitas Tenaga Kerja	144,268,217,363	145,026,342,854	Pendapatan Usaha (Pendapatan Tol - Pendapatan Usaha Lain) Jumlah Tenaga Kerja (seluruh karyawan APJT termasuk Pengawasan, PKWT & outsourcing) Produktivitas Tenaga Kerja	Triwulanan	Persentase	6	KPI < R * 85% KPI = R% R% * 95% < KPI < R% R% * 90% < KPI < R * 95% R% * 85% < KPI < R * 90%	5 4 3 2
FOKUS TENAGA KERJA	10	Pengendalian Formasi Non Struktural	105	105	Rencana Jumlah Karyawan Operasional Realisasi Jumlah Karyawan Operasional	Triwulanan	Persentase	5	KPI < R * 85% KPI > R R * 95% < KPI < R R * 90% < KPI < R * 95% R * 85% < KPI < R * 90%	5 4 3 2
	11	Human Capital Readiness - Pemenuhan Kompetensi Teknis dan Non Teknis (Hard Skill & Soft Skill)	4	5	Pelatihan / Kursus / Training / Coaching & Mentoring	Triwulanan	Persentase	5	R * 95% < KPI < R R * 90% < KPI < R * 95% R * 85% < KPI < R * 90%	5 4 3 2

KEPEMIMPINAN, TATAKELOLA & TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN	12	KPKU Score	345	432	KPKU Score APJT * <i>*) Catatan : Untuk AP yang baru beroperasi dan belum keluar skor KPKU nya, maka indikator ia diisi dengan upaya-upaya persiapan KPKU</i>	Tahunan	Score	8	KPI > R% R% * 95% < KPI < R% R% * 90% < KPI < R% * 95% R% * 85% < KPI < R% * 90% KPI < R% * 85%	5 4 3 2 1
	13	Pemenuhan Ketentuan Assessment GCG	100%	100%	Pemenuhan GCG : 1. Penandatanganan Pakta Integritas Karyawan Pengawasan Jasa Marga 2. Pelaporan Penerimaan Gratifikasi Karyawan Unit Kerja 3. Tindak lanjut Hasil Temuan Audit Internal maupun Eksternal 4. Monitoring Tindak lindung Rencana Pengelolaan Risiko (RPR) 5. Pemenuhan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku 6. Kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi dan ketepatan mutu 7. Zero accident dan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Tahunan	Persentase	8	KPI > R R * 95% < KPI < R R * 90% < KPI < R * 95% R * 85% < KPI < R * 90% KPI < R * 85%	5 4 3 2 1
TOTAL BOBOT								100		

Ir. Akhmad Tito Karim, M.M.
Direktur Utama

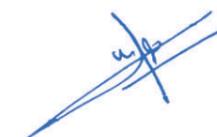
TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN TAHUNAN 2016

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Atas Laporan Tahunan 2016 **PT JASAMARGA BALI TOL**

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan **PT JASAMARGA BALI TOL** Tahun 2016 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Denpasar, Mei 2017



ABDUL HADI HASBULLAH
Komisaris Utama



U. SAEFUDIN NOER
Komisaris



ROBERT DANIEL WALONI
Komisaris



I WAYAN BLAYU SUARJAYA
Komisaris



I GUSTI PUTU NURIATHA
Komisaris



KOMPYANG RAKA SWANDIKA
Komisaris



AKHMAD TITO KARIM
Direktur Utama



ALI SODIKIN
Direktur Teknik dan Operasi



RONNY HARYANTO
Direktur Keuangan



LAPORAN KEUANGAN

161 Laporan Keuangan





Laporan Keuangan

PT JASAMARGA BALI TOL

Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT JASAMARGA BALI TOL**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | | |
|---|-----------------|---|--|
| 1 | Nama | : | Ir. Akhmad Tito Karim, MM |
| | Alamat kantor | : | Ikatan Plaza, Jln. By Pass I Gusti Ngurah Rai No 505,
Pemogan 80221, Denpasar, Bali |
| | Alamat domisili | : | JL Pandu Dewata Blok 3 No 11 Bayu Ringin Jaya
Bekasi Selatan |
| | Nomor telepon | : | (0361) 725326 |
| | Jabatan | : | Direktur Utama |
| 2 | Nama | : | Ronny Haryanto |
| | Alamat kantor | : | Ikatan Plaza, Jln. By Pass I Gusti Ngurah Rai No 505,
Pemogan 80221, Denpasar, Bali |
| | Alamat domisili | : | JL Tebet Timur Dalam VI Tebet Timur Jakarta |
| | Nomor telepon | : | (0361) 725326 |
| | Jabatan | : | Direktur Keuangan |

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut;
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Denpasar, 30 Januari 2017



Ir. Akhmad Tito Karim, MM
Direktur Utama

Ronny Haryanto
Direktur Keuangan

**PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2016
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan.....	1-2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan.....	6-50

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-3064/PSS/2017

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jasamarga Bali Tol

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jasamarga Bali Tol terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-3064/PSS/2017 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jasamarga Bali Tol tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Purwantono, Sungkoro dan Surja



E. Batara Manurung, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0693

30 Januari 2017

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2b,2c,2k, 4,31	126.176.003.244	166.864.730.658
Dana ditetapkan penggunaannya - bagian lancar	2b,2c,2k, 5,29,31	9.339.286.602	4.889.450.871
Piutang usaha - pihak ketiga	2k,6,31	68.818.182	316.800.000
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2k,31	9.928.774	12.931.262
Biaya dibayar dimuka - neto	2d,7	2.771.357.063	2.731.389.598
Biaya yang ditangguhkan		900.000.000	-
Pendapatan akan diterima	2k,8,31	358.926.027	529.230.247
TOTAL ASET LANCAR		139.624.319.892	175.344.532.636
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - neto	2e,2g,9	3.090.068.823	3.515.638.507
Aset takberwujud - neto			
Hak pengusahaan jalan tol	2f,2g,10	1.743.736.348.407	1.756.304.198.906
Lainnya	2f,2g,11	6.475.341.674	5.065.924.476
Dana ditetapkan penggunaannya - bagian tidak lancar	2b,2c,2k, 5,29,31	45.404.358.005	44.597.415.470
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		1.798.706.116.909	1.809.483.177.359
TOTAL ASET		1.938.330.436.801	1.984.827.709.995
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	2c,2k,12, 29,31	-	314.000.339
Pihak ketiga	2k,12,31 2c,2k,13,	3.576.451.498	4.097.674.624
Utang lain-lain - pihak berelasi	29,31	5.299.277.661	5.299.277.661
Utang pajak	2i,18a	4.105.460.077	2.881.588.950
Beban akrual	2k,14,31	9.172.264.913	9.208.252.333
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang konsultan	2k, 15,31	-	2.745.609.200
Utang retensi	2c,2k,16,31 2c,2k,17,	36.704.129.762	36.587.754.035
Utang bank	29,31	24.890.824.525	12.348.163.570
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		83.748.408.436	73.482.320.712

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
(lanjutan)			
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan	2i,18b	54.158.265.712	34.895.730.946
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank	2c,2k,17, 29,31	1.211.320.807.409	1.226.291.752.922
Provisi pelapisan jalan tol		14.604.206.100	-
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2j,19	881.755.707	397.874.000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		1.280.965.034.928	1.261.585.357.868
TOTAL LIABILITAS		1.364.713.443.364	1.335.067.678.580
EKUITAS			
Modal saham			
Modal dasar - 745.434 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 745.434 lembar saham	20	745.434.000.000	745.434.000.000
Tambahan modal disetor	21	112.101.694.074	112.101.694.074
Saldo defisit		(283.813.782.742)	(207.748.425.659)
Beban komprehensif lain			
Kerugian aktuarial liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2j,19	(104.917.895)	(27.237.000)
TOTAL EKUITAS		573.616.993.437	649.760.031.415
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		1.938.330.436.801	1.984.827.709.995

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
 (Disajikan dalam rupiah)

	Catatan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2016	2015
PENDAPATAN			
Pendapatan tol	2l,22	143.250.846.206	122.710.788.907
Pendapatan konstruksi	2f,2l,23	2.082.699.470	4.265.894.476
Pendapatan usaha lainnya	2l,24	1.775.496.648	1.716.568.298
Total		147.109.042.324	128.693.251.681
BEBAN PENDAPATAN			
Beban tol	2l,25	(55.334.170.628)	(40.802.814.920)
Beban konstruksi	2f,2l,23	(2.071.648.733)	(4.202.851.700)
Total		(57.405.819.361)	(45.005.666.620)
LABA BRUTO		89.703.222.963	83.687.585.061
Beban umum dan administrasi	2l,26	(19.734.276.853)	(20.257.301.517)
LABA USAHA		69.968.946.110	63.430.283.544
Pendapatan keuangan	2l,28	10.125.498.066	15.243.264.275
Pendapatan lain-lain - neto	2l	2.520.702.733	5.322.251
Biaya keuangan	17,27	(139.417.969.226)	(150.883.378.565)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(56.802.822.317)	(72.204.508.495)
BEBAN PAJAK TANGGUHAN	2i,18b	(19.262.534.766)	(19.811.130.487)
RUGI TAHUN BERJALAN		(76.065.357.083)	(92.015.638.982)
BEBAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:			
Rugi aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang		(77.680.895)	(27.237.000)
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(76.143.037.978)	(92.042.875.982)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam rupiah)

	Catatan	Modal saham	Tambahannya modal disetor	Defisit	Beban komprehensif lain	Total
Saldo tanggal 31 Desember 2014		745.434.000.000	112.101.694.074	(115.732.786.677)	-	741.802.907.397
Rugi tahun berjalan		-	-	(92.015.638.982)		(92.015.638.982)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	19	-	-	-	(27.237.000)	(27.237.000)
Saldo tanggal 31 Desember 2015		745.434.000.000	112.101.694.074	(207.748.425.659)	(27.237.000)	649.760.031.415
Rugi tahun berjalan		-	-	(76.065.357.083)	-	(76.065.357.083)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	19	-	-	-	(77.680.895)	(77.680.895)
Saldo tanggal 31 Desember 2016		745.434.000.000	112.101.694.074	(283.813.782.742)	(104.917.895)	573.616.993.437

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

PT JASAMARGA BALI TOL
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam rupiah)

	Catatan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pendapatan tol dan sewa lahan		143.250.846.206	124.427.357.205
Penerimaan kas dari pendapatan lainnya		1.775.496.648	5.322.250
Pengeluaran untuk pemasok		(37.131.159.476)	(94.654.768.284)
Pembayaran kepada karyawan		(18.173.297.222)	(14.452.165.721)
Kas neto diperoleh dari operasi		89.721.886.156	15.325.745.450
Penerimaan bunga		10.256.466.285	15.498.350.850
Pembayaran bunga		(139.849.181.897)	(151.133.124.359)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi		(39.870.829.456)	(120.309.028.059)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penambahan aset takberwujud	10,11	(924.954.731)	(5.035.002.976)
Penambahan aset tetap	9	(18.300.000)	(96.075.700)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(943.254.731)	(5.131.078.676)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan pinjaman bank	17	7.900.000.000	38.183.145.126
Pembayaran pinjaman bank		(7.774.643.227)	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		125.356.773	38.183.145.126
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(40.688.727.414)	(87.256.961.609)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4	166.864.730.658	254.121.692.267
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4	126.176.003.244	166.864.730.658

Informasi tambahan atas aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas diungkapkan dalam Catatan 32.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Jasamarga Bali Tol ("Perusahaan") berkedudukan di Denpasar, Bali, berdasarkan Akta No: 02 tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-57740.AH.01.01.TH 2011 tanggal 25 Nopember 2011.

Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir diaktakan dalam akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H, No. 104 tanggal 28 April 2015 mengenai perubahan susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0928711 tanggal 30 April 2015.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam bidang pengusahaan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Melakukan pekerjaan perencanaan.
- b. Membangun jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan, dan fasilitas jalan tol.
- c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, termasuk memungut dan menggunakan uang tol.
- d. Menggunakan ruang milik jalan tol untuk usaha lain yang berkaitan dengan pengoperasian jalan tol, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau persetujuan pihak yang berwenang.
- e. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d.

Perusahaan telah memperoleh izin melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 375/KPTS/2013 tanggal 18 September 2013, dimana hak konsesi diberikan kepada Perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan konstruksi, operasi dan pemeliharaan atas jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa selama 45 tahun, terhitung mulai bulan Oktober 2013.

Setelah berakhirnya hak konsesi, jalan tol akan diserahkan kepada Pemerintah/Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tanpa adanya kewajiban Pemerintah untuk membayar senilai uang atau dalam bentuk apapun kepada Perusahaan. Hal tersebut dipertegas dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) antara Perusahaan dengan Departemen Pekerjaan Umum.

b. Dewan komisaris, direksi dan karyawan

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasamarga Bali Tol No. 11 tanggal 1 Juni 2016, terkait perubahan data susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ir. Abdul Hadi Hasbullah, MM
Komisaris	: U. Saefudin Noer
Komisaris	: Ir. Robert Daniel Wailoni
Komisaris	: Ir. I Wayan Blayu Suarjaya
Komisaris	: Ir. I Gusti Putu Nuriatha, MM
Komisaris	: Kompyang Raka Suwandika, SH, MH

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan komisaris, direksi dan karyawan (lanjutan)

Direksi

Direktur Utama : Ir. Akhmad Tito Karim, MM
Direktur Teknik dan Operasional: Ali Sodikin, M.Mar
Direktur Keuangan : Drs. Ronny Haryanto

Susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Abdul Hadi Hasbullah, MM
Komisaris : U. Saefudin Noer
Komisaris : Ir. Robert Daniel Wailoni
Komisaris : Ir. I Wayan Blayu Suarjaya
Komisaris : Ir. I Gusti Putu Nuriatha, MM
Komisaris : I Wayan Suambara, SH, MM

Direksi

Direktur Utama : Ir. Akhmad Tito Karim, MM
Direktur Teknik dan Operasional: Ir. Rismarture Sidabutar, MM
Direktur Keuangan : Drs. Ronny Haryanto

Jumlah karyawan tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebanyak 140 orang dan 125 orang (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK").

Selain laporan arus kas, laporan keuangan disusun berdasarkan asas akrual, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung, dengan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

b. Setara kas

Deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan yang tidak dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai "Setara kas".

Bank yang ditetapkan penggunaannya untuk digunakan sebagai jaminan tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari "Kas dan setara kas" melainkan disajikan sebagai bagian dari "Dana ditetapkan penggunaannya - bagian lancar dan tidak lancar".

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang terkait.

d. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

e. Aset tetap

Perusahaan menggunakan model biaya dalam pengukuran aset tetapnya. Aset tetap, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan aset tetap termasuk: (a) harga pembelian, (b) setiap biaya yang diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi masa kini. Pada saat pemeliharaan dan perbaikan yang signifikan dilakukan, biaya tersebut diakui ke dalam nilai tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dibebankan langsung pada operasi tahun berjalan.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset, sebagai berikut:

	Tahun
Peralatan operasi dan kantor	5
Kendaraan	5
Perangkat lunak	3
Sarana informasi jalan tol	10

Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Aset dalam penyelesaian merupakan proyek dalam pelaksanaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai selisih antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dan amortisasi aset tetap ditelaah dan disesuaikan secara prospektif, apabila diperlukan, pada setiap akhir tahun buku.

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Perjanjian konsesi jasa

Perusahaan telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22).

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Perusahaan membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset takberwujud yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian ruas jalan tol. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi jalan tol diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") tanpa syarat.

Aset konsesi yang diberikan kepada Perusahaan dapat dipindahkan dengan persetujuan Pemerintah/BPJT. Hak konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/BPJT pada saat akhir masa konsesi dan pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan hak konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selama periode hak perusahaan jalan tol, aset hak perusahaan jalan tol dapat dikeluarkan dari laporan posisi keuangan Perusahaan jika jalan tol diserahkan (dikuasakan) kepada pihak lain atau Pemerintah/BPJT mengubah status jalan tol menjadi jalan non-tol atau tidak ada manfaat ekonomi yang dapat diharapkan dari penggunaannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset konsesi diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Selain itu, Perusahaan mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" (PSAK 34), dan PSAK 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Perusahaan menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Perusahaan diakui pada nilai wajar.

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan jalan tol atau peningkatan kapasitas jalan tol yang meliputi pengadaan tanah, studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan jalan tol, termasuk biaya pembangunan jalan akses ke jalan tol, jalan alternatif dan fasilitas jalan umum yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman lain yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut telah selesai dan aset konsesi telah siap untuk dioperasikan.

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Perusahaan mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset takberwujud dimana Perusahaan menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Perusahaan mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya.

Biaya konstruksi merupakan harga pokok dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian (*qualifying assets*), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam tahun berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Metode amortisasi hak perusahaan jalan tol

Aset konsesi diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. aset hak perusahaan jalan tol yang termasuk jalan dan jembatan tol diamortisasi dengan menggunakan metode unit pemakaian berdasarkan volume lalu lintas;
2. aset hak perusahaan jalan tol selain jalan dan jembatan tol diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus.

Provisi pelapisan jalan tol

Dalam pengoperasian jalan tol, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yaitu antara lain dengan melakukan pelapisan ulang jalan tol secara berkala. Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi seiring dengan penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi pelapisan ulang jalan tol diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini.

Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan, atau pembuatan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan digunakan sesuai tujuannya atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya aset. Semua biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar sesuai maksud penggunaannya selesai secara substansial.

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "rugi penurunan nilai", jika ada.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, transaksi pasar terkini dijadikan sebagai acuan, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, digunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah disesuaikan, bersih dari penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

h. Sewa

Perusahaan menerapkan PSAK 30 (Revisi 2011), "Sewa". PSAK ini menetapkan bahwa klasifikasi dari setiap elemen sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi secara terpisah bagi suatu perjanjian sewa yang mengandung elemen tanah dan bangunan.

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa, atau perjanjian yang mengandung sewa, didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Sewa (lanjutan)

Pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewa pembiayaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa.

Aset sewa pembiayaan yang dimiliki oleh *lessee* dengan dasar sewa pembiayaan disusutkan secara konsisten dengan metode yang sama yang digunakan untuk aset yang dimiliki sendiri, atau disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaat aset sewa pembiayaan, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

i. Perpajakan

Perusahaan telah menetapkan PSAK 46 (Revisi 2013), "Pajak Penghasilan".

Pajak penghasilan non-final - pajak kini

Aset dan liabilitas pajak penghasilan kini untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya diukur pada jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak pertambahan nilai (PPN)

Pendapatan, beban dan aset diakui setelah dikurangi dengan jumlah PPN, kecuali:

- Ketika PPN yang terjadi sehubungan dengan pembelian aset atau jasa tidak dapat diklaim kepada kantor pajak, dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai beban.
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk PPN.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada akhir tahun pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat penghasilan kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan dapat digunakan.

Penelaahan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar penghasilan kena pajak mendatang akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disaling-hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

j. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja jangka pendek (jika ada) ketika jasa diberikan oleh karyawan dan imbalan atas jasa tersebut akan dibayarkan dalam waktu dua belas bulan setelah jasa tersebut diberikan.

Imbalan paska-kerja

Perusahaan membukukan liabilitas program imbalan kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2013), liabilitas atas masa kerja lalu diestimasi dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan estimasi liabilitas tersebut.

Biaya jasa kini diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Biaya jasa lalu sebagai dampak perubahan asumsi aktuarial bagi karyawan aktif diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif selama sisa masa kerja rata-rata karyawan tersebut. Imbalan kerja atas pemutusan hubungan kerja diakui sebagai liabilitas dan beban pada saat terjadi.

Karyawan Perusahaan saat ini terdiri dari karyawan tetap dan karyawan yang diperbantukan dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

k. Instrumen Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian" (PSAK 50), PSAK 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" (PSAK 55) serta PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" (PSAK 60).

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir tahun pelaporan.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal investasi tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut di tambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2016, aset keuangan Perusahaan mencakup kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, dana ditetapkan penggunaannya dan pendapatan akan diterima yang seluruhnya dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun pada saat proses amortisasi.

Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Perusahaan telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "*pass-through*", dan salah satu diantara (a) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

Penurunan nilai

Pada setiap akhir periode pelaporan Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan kelompok usaha menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi).

Nilai tercatat aset keuangan dikurangi melalui penggunaan akun cadangan dan jumlah kerugian diakui dalam laba rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Pinjaman yang diberikan dan piutang, beserta dengan penyisihan terkait, dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan atas pemulihan di masa depan dan semua agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Perusahaan. Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laba rugi.

2. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangannya pada saat pengakuan awal.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal dan pengukuran (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2016, liabilitas keuangan Perusahaan mencakup utang usaha, utang retensi, utang lain-lain, beban akrual, utang bank, provisi pelapisan jalan tol dan liabilitas jangka panjang yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan diakui dalam laba atau rugi.

3. Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

4. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau harga yang diminta pada penutupan bisnis pada akhir tahun pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (*arm's length market transactions*), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskontokan, atau model penilaian lainnya.

Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara handal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan tol

Pendapatan dari hasil pengoperasian jalan tol Perusahaan diakui pada saat penjualan karcis tol. Pendapatan tol dari hasil kerjasama pengoperasian jalan tol dengan investor dengan kuasa penyelenggaraan diakui pada saat penjualan karcis tol setelah dikurangi bagian investor tersebut. Pembayaran kepada investor tanpa kuasa penyelenggaraan dicatat sebagai angsuran liabilitas kerjasama operasi. Selisih antara jumlah pembayaran ini dengan angsuran liabilitas kerjasama operasi dicatat sebagai beban atau penghasilan kerjasama operasi.

Pendapatan sewa

Pendapatan sewa lahan diakui sebagai pendapatan sesuai masa sewa.

Pendapatan konstruksi dan beban konstruksi

Perusahaan mengakui aset takberwujud atas jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan dimana Perusahaan menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Pada fase konstruksi, Perusahaan mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan basis kontrak biaya-plus. Beban konstruksi diakui sejak kegiatan konstruksi dimulai sampai dengan proses pembangunan aset selesai dan siap untuk digunakan.

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga diakui pada saat terjadinya sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku dengan dasar akrual.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya.

m. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dimana ada kemungkinan besar bahwa untuk penyelesaian kewajiban tersebut diperlukan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik saat ini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut dibatalkan.

n. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomi.

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan laporan keuangan. Namun, ketidakpastian atas asumsi dan estimasi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang terdampak pada masa mendatang.

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan:

- Pengelompokan aset keuangan dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan pengelompokan aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam PSAK 55 terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti yang diungkapkan pada Catatan 2k.

- Perjanjian konsesi jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

BPJT memberikan hak, kewajiban dan keistimewaan kepada Perusahaan termasuk kewenangan dalam pendanaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan jalan tol (Catatan 2f). Pada akhir masa konsesi jasa, Perusahaan harus menyerahkan jalan tol kepada BPJT tanpa biaya, dalam keadaan beroperasi dan kondisi yang baik, termasuk setiap dan semua tanah yang diperlukan, pekerjaan, fasilitas jalan dan peralatan tol yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian fasilitas jalan tol.

Perusahaan berpendapat bahwa PPJT memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

Perusahaan diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama tahun berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan mengakui pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi masing-masing sebesar Rp2.082.699.470 dan Rp4.265.894.476 (Catatan 23).

Perusahaan mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK 34. Perusahaan mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima dan menambahkan margin, berdasarkan estimasi terbaik manajemen yang dihitung dengan model tertentu, pada saat penentuan tarif awal jalan tol sebelum jalan tol dioperasikan.

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun berikutnya diungkapkan dibawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

- Instrumen keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, nilai perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan.

Nilai tercatat dari aset keuangan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp181.357.320.833 dan Rp217.210.558.508, sedangkan nilai tercatat liabilitas keuangan pada nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.305.567.961.867 dan Rp1.296.892.484.684 (Catatan 31).

- Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 10 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat neto atas aset tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp3.090.068.823 dan Rp3.515.638.507 (Catatan 9).

- Amortisasi hak pengusahaan jalan tol

Berdasarkan penelaahan dan penilaian manajemen Perusahaan, mulai tanggal 1 Januari 2015, Perusahaan memutuskan untuk mengganti metode amortisasi hak pengusahaan jalan tol - jalan jembatan dari metode garis lurus selama masa konsesi menjadi metode "*Pola konsumsi jalan tol yang diakibatkan oleh lalu lintas*". Perubahan metode amortisasi ini diterapkan secara prospektif. Nilai tercatat neto atas hak pengusahaan jalan tol Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.743.736.348.407 dan Rp1.756.304.198.906 (Catatan 10).

- Estimasi volume lalu lintas

Dalam menentukan amortisasi hak pengusahaan jalan tol, manajemen memproyeksikan volume lalu lintas setelah tahun berjalan selama sisa periode perjanjian konsesi. Volume lalu lintas diproyeksikan berdasarkan jumlah kendaraan dan disesuaikan dengan perbandingan terhadap volume lalu lintas aktual. Namun seiring berjalannya waktu, volume lalu lintas aktual dapat berbeda dengan estimasi tersebut, bergantung pada perubahan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tarif tol dan volume lalu lintas.

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

- Estimasi volume lalu lintas (lanjutan)

Manajemen melakukan penilaian secara periodik terhadap total proyeksi volume lalu lintas. Perusahaan akan menunjuk suatu konsultan lalu lintas profesional independen untuk melakukan studi lalu lintas profesional independen dan membuat penyesuaian yang tepat apabila terdapat perbedaan yang material antara proyeksi volume lalu lintas dan volume lalu lintas aktual.

- Provisi pelapisan jalan tol

Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi seiring dengan penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini pada tanggal pelaporan.

- Aset konsesi dalam pengerjaan

Umur konsesi atas hak konsesi jalan tol mulai berlaku efektif sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh BPJT, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum kegiatan konstruksi dimulai atau biaya pra konstruksi jalan tol, termasuk biaya pembebasan lahan atau tanah ditanggihkan sehingga belum dihitung margin konstruksinya.

- Imbalan kerja

Penentuan kewajiban Perusahaan untuk menyediakan imbalan kerja bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung nilai-nilai tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan oleh Perusahaan langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan atas asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material atas estimasi liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp881.755.707 dan Rp397.874.000 (Catatan 19).

- Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan liabilitas atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Rincian atas sifat dan nilai tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 18b.

- Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak masa yang akan datang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2016	2015
Kas - rupiah	156.467.308	209.596.860
Bank - rupiah		
Pihak berelasi (Catatan 29)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18.019.535.936	3.105.133.798
Deposito berjangka - rupiah		
Pihak ketiga		
PT Bank Mandiri Taspen Pos	42.000.000.000	39.000.000.000
PT Bank Bukopin Tbk	19.500.000.000	24.000.000.000
Sub total	61.500.000.000	63.000.000.000
Pihak berelasi (Catatan 29)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.500.000.000	53.500.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	36.000.000.000	35.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	-	12.050.000.000
Sub total	46.500.000.000	100.550.000.000
Total deposito berjangka	108.000.000.000	163.550.000.000
Total kas dan setara kas	126.176.003.244	166.864.730.658

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka masing-masing antara 6,5% sampai dengan 8,5% dan 7,5% sampai dengan 9,25%.

5. DANA DITETAPKAN PENGGUNAANNYA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2016	2015
Dana ditetapkan penggunaannya - bagian lancar:		
Pihak berelasi (Catatan 29)		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - <i>Escrow</i> pendapatan	6.443.000.135	4.164.990.576
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Tol tunai	1.349.490.313	428.983.113
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - <i>E-toll card</i>	1.015.407.774	96.039.526
PT Bank Mandiri - DSRA KMK	408.527.590	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - <i>E-toll card</i>	122.650.970	3.198.345
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Konstruksi	209.819	209.819
PT Bank BRI - <i>E-Toll Card</i>	-	196.029.492
Sub total	9.339.286.602	4.889.450.871

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. DANA DITETAPKAN PENGGUNAANNYA (lanjutan)

Akun ini terdiri dari: (lanjutan)

	31 Desember	
	2016	2015
Dana ditetapkan penggunaannya - bagian tidak lancar:		
Pihak berelasi (Catatan 29)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Cadangan bayar utang	16.422.017.901	16.063.256.142
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Cadangan bayar utang	12.134.824.449	11.949.007.383
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Cadangan bayar utang	12.122.028.872	11.934.423.784
Sub total	40.678.871.222	39.946.687.309
Pihak ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk- Cadangan bayar utang	4.725.486.783	4.650.728.161
Sub total	45.404.358.005	44.597.415.470
Total	54.743.644.606	49.486.866.341

6. PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan piutang usaha Perusahaan atas pendapatan sewa lahan dari PT Pertamina Lubricants.

7. BIAYA DIBAYAR DIMUKA - NETO

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2016	2015
Asuransi	1.454.891.896	1.531.455.367
Sewa	992.816.667	1.044.176.852
Lain-lain	323.648.500	155.757.379
Neto	2.771.357.063	2.731.389.598

8. PENDAPATAN AKAN DITERIMA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2016	2015
Bunga deposito	358.926.027	489.894.247
Sewa lahan	-	39.336.000
Total	358.926.027	529.230.247

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL - NETO

Aset hak pengusahaan jalan tol merupakan hak konsesi dari Pemerintah Republik Indonesia berupa pengusahaan jalan tol yang diberikan kepada Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Biaya perolehan					
Jalan dan jembatan	1.733.448.701.667	-	-	-	1.733.448.701.667
Plaza tol	24.495.045.709	-	-	-	24.495.045.709
Penerangan jalan umum	50.756.114.503	-	-	-	50.756.114.503
Peralatan jalan tol	11.705.050.702	-	-	-	11.705.050.702
Total	1.820.404.912.581	-	-	-	1.820.404.912.581
Akumulasi amortisasi					
Jalan dan jembatan	57.837.610.791	9.257.389.746	-	-	67.095.000.537
Plaza tol	979.738.082	562.537.171	-	-	1.542.275.253
Penerangan jalan umum	3.343.169.211	1.493.321.112	-	-	4.836.490.323
Peralatan jalan tol	1.940.195.591	1.254.602.470	-	-	3.194.798.061
Total	64.100.713.675	12.567.850.499	-	-	76.668.564.174
Nilai buku neto	1.756.304.198.906				1.743.736.348.407

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Biaya perolehan					
Jalan dan jembatan	1.733.448.701.667	-	-	-	1.733.448.701.667
Plaza tol	24.495.045.709	-	-	-	24.495.045.709
Penerangan jalan umum	50.756.114.503	-	-	-	50.756.114.503
Peralatan jalan tol	8.406.676.702	3.298.374.000	-	-	11.705.050.702
Total	1.817.106.538.581	3.298.374.000	-	-	1.820.404.912.581
Akumulasi amortisasi					
Jalan dan jembatan	49.200.245.943	8.637.364.848	-	-	57.837.610.791
Plaza tol	417.200.911	562.537.171	-	-	979.738.082
Penerangan jalan umum	1.849.848.099	1.493.321.112	-	-	3.343.169.211
Peralatan jalan tol	1.050.834.588	889.361.003	-	-	1.940.195.591
Total	52.518.129.541	11.582.584.134	-	-	64.100.713.675
Nilai buku neto	1.764.588.409.040				1.756.304.198.906

Seluruh beban amortisasi hak pengusahaan jalan tol dialokasikan sebagai beban pendapatan tol (Catatan 25).

Pada tahun 2016, Perusahaan telah mengasuransikan aset konsesi atas hak pengusahaan jalan tol terkait pengoperasian jalan tol terhadap risiko kehilangan pendapatan, tidak dapat digunakan, kerusakan dan termasuk yang diakibatkan oleh huru-hara, sabotase, terorisme dan keadaan kahar (*force majeure*) serta risiko lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dan Pihak Kreditur kepada PT Tugu Pratama Indonesia dengan total nilai pertanggungannya sebesar Rp1.616.876.588.024. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungannya cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL - NETO (lanjutan)

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai hak pengusahaan jalan tol pada tanggal 31 Desember 2016.

11. ASET TAKBERWUJUD LAINNYA - NETO

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
<u>Biaya perolehan</u>					
Kantor pra-konstruksi	4.265.894.476	2.082.699.468	-	(471.587.270)	5.877.006.674
Perangkat lunak	965.085.000	120.000.000	-	-	1.085.085.000
Total	5.230.979.476	2.202.699.468	-	(471.587.270)	6.962.091.674
<u>Akumulasi amortisasi</u>					
Perangkat lunak	165.055.000	321.695.000	-	-	486.750.000
Nilai buku neto	5.065.924.476				6.475.341.674
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<u>Biaya perolehan</u>					
Kantor pra-konstruksi	-	4.265.894.476	-	-	4.265.894.476
Perangkat lunak	-	469.920.000	-	495.165.000	965.085.000
Total	-	4.735.814.476	-	495.165.000	5.230.979.476
<u>Akumulasi amortisasi</u>					
Perangkat lunak	-	151.300.417	-	13.754.583	165.055.000
Nilai buku neto	-				5.065.924.476

Seluruh beban amortisasi aset takberwujud lainnya dialokasikan sebagai beban umum dan administrasi (Catatan 26).

12. UTANG USAHA

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2016	2015
Pihak berelasi - rupiah (Catatan 29)		
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ)	-	208.000.339
Dinas Kehutanan Provinsi Bali	-	106.000.000
Sub total	-	314.000.339
Pihak ketiga - rupiah		
PT Husada Putra Pratama	408.564.000	918.409.600
PT LAPI ITB	660.300.000	-
CV Surya Prana	264.053.000	-
Politeknik Negeri Bali	220.680.000	-
PT Metropolitan Jaya	200.000.000	258.748.800
PT Delameta Bilano	167.627.875	272.646.881
PT Kurnia Mega	71.914.378	122.373.382

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. UTANG USAHA (lanjutan)

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember	
	2016	2015
Pihak ketiga - rupiah (lanjutan)		
CV Tiga Satoe	-	928.818.000
CV Eka Putra	-	376.774.000
PT Satya Putra Mandiri	-	163.198.000
Lain-lain	1.583.312.245	1.056.705.961
Sub total	3.576.451.498	4.097.674.624
Total	3.576.451.498	4.411.674.963

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2016	2015
Belum jatuh tempo	-	-
1 sampai dengan 30 hari	2.431.418.503	626.420.653
31 sampai dengan 60 hari	-	3.785.254.306
61 sampai dengan 90 hari	-	-
91 sampai dengan 120 hari	-	-
> 120 hari	3.755.877.568	1.893.145.799
Total utang usaha	6.187.296.071	6.304.820.758

13. UTANG LAIN-LAIN

Rincian utang lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2016	2015
Pihak berelasi - rupiah (Catatan 29):		
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	4.870.744.275	4.870.744.275
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	188.571.064	188.571.064
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	126.053.581	126.053.581
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	113.908.741	113.908.741
Total	5.299.277.661	5.299.277.661

Berdasarkan surat keterangan No. 44/NOT/II/2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Leolin Jayayanti, utang lain-lain pihak berelasi merupakan utang biaya pra operasi dari pemegang saham sebesar Rp5.617.277.661 dikurangi piutang setoran modal PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp318.000.000.

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember	
	2016	2015
Biaya bunga	7.105.701.323	7.455.640.964
Insentif karyawan, direksi dan komisaris	1.803.297.059	1.566.295.600
Biaya umum	186.197.104	170.984.462
Lainnya	77.069.426	15.331.307
Total	9.172.264.913	9.208.252.333

15. UTANG KONSULTAN

Merupakan utang kepada konsultan sehubungan dengan pembangunan jalan Tol Ruas Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa dan bangunan lain dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember	
	2016	2015
Pihak ketiga		
PT Narada Karya	-	712.596.500
Pusat Penelitian Lingkungan Hidup	-	711.300.000
PT Eskapindo Matra	-	648.879.000
PT Fartono Pondas	-	469.608.700
PT Dana Sulastra Cipta	-	203.225.000
Total	-	2.745.609.200

16. UTANG RETENSI

Utang retensi merupakan akumulasi uang jaminan yang dipotong dari tagihan kontraktor dan konsultan sehubungan dengan jaminan pemeliharaan pembangunan jalan tol. Uang jaminan tersebut akan dibayarkan kembali kepada kontraktor dan konsultan setelah masa pemeliharaan telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember	
	2016	2015
Utang retensi yang jatuh tempo dalam setahun		
Pihak berelasi (Catatan 29)		
Wika-Adhi-Hutama JO	18.282.640.321	18.282.640.321
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	17.971.943.076	17.971.943.076
Sub total	36.254.583.397	36.254.583.397

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG RETENSI (lanjutan)

	31 Desember	
	2016	2015
Pihak ketiga		
PT Strarindo Cleaning	160.490.000	160.490.000
PT Delameta Bilano	142.637.115	142.637.115
PT Eskapindo Matra	71.106.750	24.758.250
PT Narada Karya	41.940.250	-
CV Tiga Satoe	23.210.000	-
PT Dana Sulastra	10.162.250	-
CV Eka Putra	-	5.285.273
Sub total	449.546.365	333.170.638
Total	36.704.129.762	36.587.754.035
Total utang retensi yang jatuh tempo dalam satu tahun	36.704.129.762	36.587.754.035

17. UTANG BANK

	31 Desember	
	2016	2015
<u>Kredit sindikasi</u>		
Pihak berelasi (Catatan 29)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	294.146.263.377	296.004.443.575
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	294.146.263.377	296.004.443.575
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	294.146.263.377	296.004.443.575
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	68.942.596.106	69.378.120.135
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	66.100.283.901	66.517.852.475
Sub total	1.017.481.670.138	1.023.909.303.335
Pihak ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk	132.200.567.805	133.035.704.970
Total kredit sindikasi	1.149.682.237.943	1.156.945.008.305
<u>Utang bunga IDC</u>		
Pihak berelasi (Catatan 29)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.770.684.020	20.901.646.716
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.770.684.020	20.901.646.716
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	20.770.684.020	20.901.646.716
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4.868.274.933	4.898.970.230
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	4.667.569.444	4.696.999.285
Sub total	71.847.896.437	72.300.909.663
Pihak ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk	9.335.138.885	9.393.998.524
Total utang bunga IDC	81.183.035.322	81.694.908.187
Total	1.230.865.273.265	1.238.639.916.492

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK (lanjutan)

	31 Desember	
	2016	2015
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(2.553.641.331)	-
Total utang bank KI	1.228.311.631.934	1.238.639.916.492
<u>Kredit modal kerja</u>		
Pihak berelasi (Catatan 29)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.900.000.000	-
Total utang bank	1.236.211.631.934	1.238.639.916.492
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	24.890.824.525	12.348.163.570
Utang bank jangka panjang - neto	1.211.320.807.409	1.226.291.752.922

Perjanjian fasilitas kredit investasi

Pada tanggal 22 Juni 2012, Perusahaan telah menandatangani perjanjian kredit sindikasi No. 79 sebesar Rp1.739.300.000.000 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) untuk pembiayaan pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa.

Terdapat Addendum I atas perjanjian kredit sindikasi No. 79 tanggal 22 Juni 2012. Addendum I No. 72 mengubah jangka waktu penarikan kredit dimana Perusahaan dapat melakukan penarikan kredit dalam jangka waktu maksimal sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 yang sebelumnya maksimal sampai dengan tanggal 21 Desember 2014.

Tujuan penggunaan kredit untuk membiayai pengadaan tanah dan konstruksi jalan tol serta membiayai 70% liabilitas pembayaran bunga dalam periode konstruksi. Suku bunga tetap (*fixed rate*) selama satu tahun sebesar 10% per tahun yang dihitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit. Setelah pengenaan *fixed rate* selama satu tahun, Perusahaan wajib membayar bunga kepada para kreditur dengan suku bunga acuan ditambah margin 5% per tahun. Maksimum kredit sebesar Rp1.622.000.000.000 termasuk IDC sebesar Rp117.300.000.000. Jangka waktu kredit berdasarkan perjanjian kredit ini adalah maksimum 15 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini termasuk masa tenggang dengan jaminan berupa tagihan atas pendapatan tol dan pendapatan usaha lainnya yang akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.484.780.000.000. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, saldo utang bank Perusahaan adalah sebesar Rp1.230.865.273.265.

Selama tahun 2016, total angsuran pokok yang telah dibayarkan oleh Perusahaan adalah sebesar Rp7.774.643.226 dengan rincian sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.989.142.894
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.989.142.894
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.989.142.894
PT Bank Central Asia Tbk	893.996.805
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	466.219.336
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	446.998.403
Total	7.774.643.226

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK (lanjutan)

Perjanjian fasilitas kredit investasi (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan harus membuka rekening penampungan yang dananya ditetapkan penggunaannya pada bank-bank *Joint Mandated Lead Arranger* (JMLA), yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI dan BCA (Catatan 5).

Berdasarkan perjanjian, persyaratan tertentu mewajibkan Perusahaan untuk, antara lain, menyalurkan pendapatan tol dan pendapatan usaha lain ke rekening pengumpulan, menjaga *financial covenant* atau mempunyai kondisi keuangan yang baik yang tercermin didalam laporan keuangan Perusahaan seperti: (i) maksimal *Debt to Equity Ratio* (DER) sebesar 70:30; dan (ii) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) > 1x (lebih besar dari satu kali) selama masa pengoperasian serta tidak memperbolehkan untuk, antara lain, merubah komposisi kepemilikan saham Perusahaan, mengubah bentuk, status hukum dan lingkup kegiatan usaha Perusahaan, memperoleh kredit atau fasilitas baru dalam bentuk pinjaman dari pihak lain kecuali dari Para Pemegang Saham Perusahaan, melakukan perubahan PPJT, mengalihkan serta menjaminkan sebagian atau semua aset, konsolidasi atau penggabungan usaha dengan perusahaan lain, membagikan dividen dan melakukan pembayaran utang kepada para pemegang saham.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan tidak dapat memenuhi salah satu pembatasan rasio keuangan, akan tetapi Perusahaan telah mendapatkan surat *waiver* dari para kreditur sebelum tanggal 31 Desember 2016.

Kredit modal kerja

Pada tanggal 7 Juni 2016, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) No. 15 dengan pagu kredit sebesar Rp45.000.000.000 dan bunga sebesar 10,5% dengan jangka waktu selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan 7 Juni 2017. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, saldo utang KMK perusahaan adalah sebesar Rp 7.900.000.000. Terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2016 sesuai surat Bank Mandiri Nomor CBG.CB2/332/2016 suku bunga KMK berubah menjadi 9,25%.

Berdasarkan perjanjian, persyaratan tertentu tidak memperbolehkan Perusahaan untuk, antara lain, menerima pinjaman dari pihak lain, menjadi penjamin terhadap pihak ketiga, mengadakan penyertaan baru atau turut membiayai perusahaan lain, membagikan bonus atau dividen, membayar hutang kepada pemegang saham, menjaminkan perusahaannya, mengadakan merger/akuisisi/menjual aset dan mengadakan ekspansi usaha atau investasi baru, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

18. PERPAJAKAN

a. Utang pajak terdiri dari:

	31 Desember	
	2016	2015
Pajak Bumi dan Bangunan	3.755.877.568	1.893.145.795
Pajak penghasilan		
Pasal 4 (2)	442.000	656.066.791
Pasal 21	309.031.448	308.931.255
Pasal 23	33.227.243	23.445.109
Pajak Pertambahan Nilai	6.881.818	-
Total	4.105.460.077	2.881.588.950

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015
Pajak tangguhan	(19.262.534.766)	(19.811.130.487)
Total	(19.262.534.766)	(19.811.130.487)

Pajak kini

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan rugi fiskal:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015
Rugi sebelum pajak penghasilan	(56.802.822.317)	(72.204.508.496)
<u>Beda temporer</u>		
Imbalan kerja	483.881.707	235.494.000
Beban akrual insentif	237.001.459	364.080.754
Beban penyusutan aset tetap	149.189.007	119.368.037
Amortisasi aset takberwujud hak perusahaan jalan tol	(78.452.395.130)	(80.839.917.563)
Sub total	(77.582.322.958)	(80.120.974.772)
<u>Beda tetap</u>		
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Beban konstruksi	2.071.648.733	4.202.851.700
Biaya representasi dan sumbangan	1.122.917.425	793.663.100
Biaya natura	1.174.924.655	687.120.211
Biaya pajak penghasilan pasal 21	672.445.471	515.411.136
Biaya mess	104.450.000	112.497.000
Pendapatan jasa giro dan deposito yang telah dikenakan pajak final	(10.125.498.066)	(15.243.264.275)
Pendapatan konstruksi	(2.082.699.470)	(4.265.894.476)
Pendapatan sewa lahan	(1.772.909.148)	(1.691.474.548)
Sub total	(8.834.720.399)	(14.889.090.152)
Rugi fiskal tahun berjalan	(143.219.865.674)	(167.214.573.420)
Akumulasi rugi fiskal:		
Tahun 2011	-	(241.013.264)
Tahun 2012	(6.711.587.596)	(6.711.587.596)
Tahun 2013	(54.622.055.949)	(54.622.055.949)
Tahun 2014	(168.468.260.924)	(168.468.260.924)
Tahun 2015	(167.214.573.420)	-

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan rugi fiskal: (lanjutan)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015
Total akumulasi rugi fiskal	(397.016.477.889)	(230.042.917.733)
Akumulasi rugi fiskal akhir tahun	(540.236.343.563)	(397.257.491.153)

Tidak terdapat beban pajak penghasilan yang diakui pada tahun 2016 dan 2015, sebagaimana disajikan di atas karena Perusahaan mengalami rugi fiskal.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan sebagai berikut:

	1 Januari 2016	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan ke ekuitas	31 Desember 2016
Aset (liabilitas) pajak tangguhan				
Rugi fiskal	99.319.017.414	35.804.966.419	-	135.123.983.833
Beban akrual insentif	391.573.900	-	-	391.573.900
Imbalan kerja	96.671.750	-	-	96.671.750
Penyusutan aset tetap	25.195.472	-	-	25.195.472
Amortisasi aset takberwujud hak perusahaan jalan tol	(35.409.172.068)	(19.262.534.766)	-	(54.671.706.834)
	<u>64.423.286.468</u>	<u>16.542.431.653</u>	<u>-</u>	<u>80.965.718.121</u>
Estimasi rugi fiskal yang tidak dapat dikompensasikan	(99.319.017.414)	(35.804.966.419)	-	(135.123.983.833)
Liabilitas pajak tangguhan - neto	<u>(34.895.730.946)</u>	<u>(19.262.534.766)</u>	<u>-</u>	<u>(54.158.265.712)</u>
	1 Januari 2015	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan ke ekuitas	31 Desember 2015
Aset (liabilitas) pajak tangguhan				
Rugi fiskal	57.510.729.433	41.808.287.981	-	99.319.017.414
Beban akrual insentif	300.553.712	91.020.188	-	391.573.900
Imbalan kerja	28.719.250	58.873.500	9.079.000	96.671.750
Penyusutan aset tetap	(4.646.537)	29.842.009	-	25.195.472
Pendapatan sewa lahan	(32.868.000)	32.868.000	-	-
Pendapatan bunga deposito	(186.245.206)	186.245.206	-	-
Amortisasi aset takberwujud hak perusahaan jalan tol	(15.199.192.678)	(20.209.979.390)	-	(35.409.172.068)
	<u>42.417.049.974</u>	<u>21.997.157.494</u>	<u>9.079.000</u>	<u>64.423.286.468</u>
Estimasi rugi fiskal yang tidak dapat dikompensasikan	(57.510.729.433)	(41.808.287.981)	-	(99.319.017.414)
Liabilitas pajak tangguhan - neto	<u>(15.093.679.459)</u>	<u>(19.811.130.487)</u>	<u>9.079.000</u>	<u>(34.895.730.946)</u>

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Pada tahun 2016, manajemen Perusahaan memutuskan untuk tidak membukukan aset pajak tangguhan karena ketidakpastian rugi fiskal dapat dipulihkan di masa yang akan datang.

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

Perusahaan menghitung dan membukukan estimasi imbalan kerja untuk seluruh karyawannya sesuai dengan UU No. 13 pasal 156 tahun 2003. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut adalah 130 karyawan untuk tahun 2016.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tahun 2016 dihitung dengan metode “*Projected-Unit-Credit*” oleh aktuaris independen, PT Padma Radya Aktuarial, berdasarkan laporannya No. 048/I/17/PRA-RM tanggal 6 Januari 2017.

Asumsi aktuarial utama yang digunakan oleh aktuaris Perusahaan untuk menghitung imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016
Usia pensiun normal	56 Tahun
Tingkat diskonto	8,25%
Tingkat kenaikan gaji	6%
Tingkat kematian tahunan	Tabel Mortalita Indonesia 2011(TMI III)
Tingkat cacat	10% dari TMI III
Tingkat pengunduran diri	6% (usia 20-29 Tahun)
	3% (usia 30-34 Tahun)
	1,8% (usia 35-39 Tahun)
	1,2% (usia 40-50 Tahun)
	0,6% (usia 51-52 Tahun)
	0% (usia > 52 Tahun)

Nilai yang tercatat di laporan posisi keuangan yang timbul dari imbalan paska-kerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2016	2015
Nilai kini liabilitas	881.755.707	397.874.000
Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan	881.755.707	397.874.000

Mutasi nilai kini dari liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	31 Desember	
	2016	2015
Saldo awal tahun	397.874.000	114.876.000
Dibebankan ke laba rugi komprehensif	406.200.812	235.495.000
Pengukuran kembali dalam penghasilan komprehensif lain	77.680.895	47.503.000
Saldo liabilitas akhir tahun	881.755.707	397.874.000

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

Beban imbalan paska-kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015
Beban jasa kini	370.869.999	225.730.000
Beban bunga	35.330.813	9.765.000
Beban imbalan kerja - neto	406.200.812	235.495.000

Analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Nilai kini kewajiban imbalan pasti

Asumsi tingkat diskonto

+ 1,00%	792.904.974
- 1,00%	986.657.817

Asumsi tingkat kenaikan gaji

+ 1,00%	987.014.581
- 1,00%	791.260.780

Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja karyawan telah cukup sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-undang Ketenagakerjaan.

20. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Total saham (Lembar)	Total Rp	Kepemilikan %
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	409.993	409.993.000.000	55,00
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	131.048	131.048.000.000	17,58
Pemerintah Provinsi Bali	59.707	59.707.000.000	8,01
Pemerintah Kabupaten Badung	59.707	59.707.000.000	8,01
PT Angkasa Pura I (Persero)	59.635	59.635.000.000	8,00
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	7.454	7.454.000.000	1,00
PT Hutama Karya (Persero)	7.454	7.454.000.000	1,00
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) (<i>Indonesia Tourism Development</i>)	7.454	7.454.000.000	1,00
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2.982	2.982.000.000	0,40
Total	745.434	745.434.000.000	100,00

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	31 Desember	
	2016	2015
Agio saham	76.309.105.208	76.309.105.208
Tambahan modal disetor lainnya	35.792.588.866	35.792.588.866
Total	112.101.694.074	112.101.694.074

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Agio saham

Agio saham merupakan selisih setoran pemegang saham (Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung) diatas nilai nominal saham.

Tambahan modal disetor lainnya

Berdasarkan akta No. 1 tanggal 11 Desember 2013 oleh Notaris Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, S.H., terdapat kelebihan setoran modal diatas modal dasar atau modal ditempatkan oleh para pemegang saham sebesar Rp35.792.588.866. Sambil menunggu keputusan lebih lanjut maka kelebihan setoran modal pemegang saham tersebut disajikan sebagai tambahan modal disetor lainnya, yang terinci sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah
1.	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	18.039.000.000
2.	PT Angkasa Pura I (Persero)	14.908.370.000
3.	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2.551.744.970
4.	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	146.000.000
5.	PT Hutama Karya (Persero)	146.000.000
6.	Pemerintah Provinsi Bali	566.948
7.	Pemerintah Kabupaten Badung	566.948
8.	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) <i>(Indonesia Tourism Development)</i>	340.000
Total		35.792.588.866

22. PENDAPATAN TOL

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, total pendapatan tol masing-masing sebesar Rp143.250.846.206 dan Rp122.710.788.907.

Berdasarkan Kepmen PU Nomor: 507/KPTS/M/2015 tanggal 28 Oktober 2015 untuk ruas Nusa Dua Ngurah Rai - Benoa dan berlaku sejak 7 (tujuh) hari setelah diresmikan, tarif terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Ruas	Golongan					
		I	II	III	IV	V	VI
1.	Nusa Nua - Ngurah Rai - Benoa	11.000	16.500	22.000	27.500	33.000	4.500

Berdasarkan Kepmen PU Nomor: 375/KPTS/M/2013 tanggal 18 September 2013 untuk ruas Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa dan berlaku sejak 7 (tujuh) hari setelah diresmikan, tarif terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Ruas	Golongan					
		I	II	III	IV	V	VI
1.	Nusa Nua - Ngurah Rai - Benoa	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	4.000

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan fasilitas jalan tol (Ruas Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa). Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode *cost-plus*, yang mana seluruh biaya yang dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset tambahan dengan marjin tertentu.

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015
Pendapatan konstruksi	2.082.699.470	4.265.894.476
Beban konstruksi	(2.071.648.733)	(4.202.851.700)
Marjin konstruksi	11.050.737	63.042.776

24. PENDAPATAN USAHA LAINNYA

Rincian pendapatan usaha lainnya adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015
Sewa lahan	1.771.559.148	1.691.474.548
Lainnya	3.937.500	25.093.750
Total	1.775.496.648	1.716.568.298

25. BEBAN PENDAPATAN TOL

Rincian beban pendapatan tol adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015
Beban pengumpulan jalan tol:		
Gaji dan tunjangan	5.153.241.459	2.912.785.125
Beban pengumpulan tol lainnya	2.061.664.747	1.090.446.300
Perbaikan dan pemeliharaan aset tetap	1.919.245.931	1.484.025.408
Beban perlengkapan operasional lainnya	779.103.140	99.231.304
Beban pengumpulan tol <i>outsourcing</i>	600.000.000	4.696.978.297
Sewa kendaraan dan peralatan tol	439.659.998	641.175.000
Bahan bakar, listrik dan air	242.776.318	244.484.425
Beban perjalanan dinas dalam negeri	181.283.886	-
Sub total	11.376.975.479	11.169.125.859

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. BEBAN PENDAPATAN TOL (lanjutan)

Rincian beban pendapatan tol adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015
Beban pelayanan pemakaian jalan tol:		
Bahan bakar, listrik dan air	2.585.226.667	2.498.460.683
Sewa kendaraan patroli	2.576.495.800	2.140.173.598
Gaji dan tunjangan	2.157.127.675	897.765.177
Beban pemeliharaan	695.461.780	247.676.280
Beban petugas patroli	557.098.000	2.841.150.159
Beban pelayanan pemakaian jalan tol lainnya	142.776.400	41.173.500
Sub total	8.714.186.322	8.666.399.397
Beban pemeliharaan jalan tol:		
Provisi pelapisan jalan tol	14.604.206.100	-
Amortisasi hak perusahaan jalan tol (Catatan 10)	12.567.850.499	11.582.584.134
Beban asuransi jalan dan jembatan tol	3.591.112.654	3.780.118.604
Insentif, cuti dan tunjangan	1.671.563.096	745.658.922
Beban konsultan teknik	936.180.500	198.825.000
Beban pemeliharaan	819.818.940	3.628.779.927
Beban penyusutan (Catatan 9)	661.081.667	641.960.000
Sewa kendaraan	204.750.000	165.246.415
Beban bahan bakar	186.445.371	224.116.662
Sub total	35.243.008.827	20.967.289.664
Total	55.334.170.628	40.802.814.920

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015
Gaji dan tunjangan	9.597.665.997	10.104.425.925
Sewa	2.291.990.636	2.214.589.143
Pajak bumi dan bangunan	1.862.731.773	1.893.145.795
Perjalanan dinas dalam negeri	1.372.471.574	1.650.903.507
Konsultan	684.712.775	883.959.195
Representasi	600.000.000	423.233.100
Beban rapat kerja dan rapat dinas	460.426.499	465.381.158
Beban langganan karcis pegawai	415.359.563	306.229.000
Biaya listrik, air dan telpon	393.279.044	419.656.040
Biaya amortisasi (Catatan 11)	321.695.000	151.300.417
Beban foto copy dan percetakan	250.244.205	225.096.363
Beban pelatihan	233.000.000	212.000.000
BBM kendaraan	210.769.500	216.859.250

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015
Penyusutan (Catatan 9)	209.126.017	176.468.403
Beban publikasi	148.657.500	38.745.000
Biaya pembelian dan pemeliharaan	98.266.645	110.057.695
Beban alat tulis kantor	87.357.954	108.513.178
Beban peresmian dan perayaan	46.272.800	41.784.000
Beban rumah tangga	16.061.170	243.866.578
Lain-lain	434.188.201	371.087.770
Total	19.734.276.853	20.257.301.517

Manajemen berpendapat bahwa saldo beban umum dan administrasi telah mendapatkan otorisasi dan digunakan untuk keperluan operasional Perusahaan.

27. BEBAN KEUANGAN

Akun ini merupakan bunga pinjaman bank KI dan IDC pada tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp139.417.969.226 dan Rp150.883.378.565.

28. PENDAPATAN KEUANGAN

Rincian pendapatan keuangan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015
Deposito berjangka	9.062.449.464	14.122.373.422
Jasa giro	1.063.048.602	1.120.890.853
Total	10.125.498.066	15.243.264.275

29. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI

Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

	Total		Presentase (%) dari total aset/liabilitas	
	2016	2015	2016	2015
Kas dan setara kas				
Bank				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18.019.535.936	3.105.133.798	0,93	0,16
Deposito berjangka				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.500.000.000	53.500.000.000	0,54	2,70
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	36.000.000.000	35.000.000.000	1,86	1,76

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Total		Presentase (%) dari total aset/liabilitas	
	2016	2015	2016	2015
Deposito berjangka (lanjutan)				
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	-	12.050.000.000	0,00	0,61
Sub total	46.500.000.000	100.550.000.000	2,40	5,07
Total	64.519.535.936	103.655.133.798	3,33	5,23
Dana ditetapkan penggunaannya				
Bagian lancar				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Escrow pendapatan	6.443.000.135	4.164.990.576	0,33	0,21
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Tol tunai	1.349.490.313	428.983.113	0,07	0,02
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk <i>E-toll card</i>	1.015.407.774	96.039.526	0,05	0,00
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - <i>E-toll card</i>	122.650.970	3.198.345	0,01	0,00
PT Bank Mandiri – DSRA KMK	408.527.590	-	0,02	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Konstruksi	209.819	209.819	0,00	0,00
PT Bank BRI (Persero) Tbk - <i>E-toll card</i>	-	196.029.492	-	0,01
Sub total	9.339.286.602	4.889.450.871	0,48	0,24
Bagian tidak lancar				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Cadangan bayar hutang	16.422.017.901	16.063.256.142	0,85	0,81
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Cadangan bayar hutang	12.134.824.449	11.949.007.383	0,63	0,60
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Cadangan bayar hutang	12.122.028.872	11.934.423.784	0,63	0,60
Sub total	40.678.871.222	39.946.687.309	2,10	2,01
Total	50.018.157.824	44.836.138.180	2,58	2,25
Utang usaha				
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ)	-	208.000.339	-	0,02
Dinas Kehutanan Provinsi Bali	-	106.000.000	-	0,01
Total	-	314.000.339	-	0,03
Utang lain-lain				
Pemegang saham				
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	4.870.744.275	4.870.744.275	0,36	0,36
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	188.571.064	188.571.064	0,01	0,01
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	126.053.581	126.053.581	0,01	0,01
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) (<i>Indonesia Tourism Development</i>)	113.908.741	113.908.741	0,01	0,01
Total	5.299.277.661	5.299.277.661	0,39	0,39
Utang bank				
Kredit sindikasi				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	294.146.263.377	296.004.443.575	21,55	22,17
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	294.146.263.377	296.004.443.575	21,55	22,17
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	294.146.263.377	296.004.443.575	21,55	22,17
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	68.942.596.106	69.378.120.135	5,05	5,20
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	66.100.283.901	66.517.852.475	4,84	4,98
Sub total	1.017.481.670.138	1.023.909.303.335	74,54	76,69

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Total		Presentase (%) dari total aset/liabilitas	
	2016	2015	2016	2015
Utang bunga IDC				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.770.684.020	20.901.646.716	1,52	1,57
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.770.684.020	20.901.646.716	1,52	1,57
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	20.770.684.020	20.901.646.716	1,52	1,57
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4.868.274.933	4.898.970.230	0,36	0,37
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	4.667.569.444	4.696.999.285	0,34	0,35
Sub total	71.847.896.437	72.300.909.663	5,26	5,43
Kredit modal kerja				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.900.000.000	-	0,58	-
Total	1.097.229.566.575	1.096.210.212.998	80,38	82,12

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak yang berelasi	Hubungan	Sifat transaksi
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Pemegang Saham	Piutang lain-lain dan Utang lain-lain
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Pemegang Saham	Utang lain-lain
PT Wijaya Karya (Persero)	Pemegang Saham	Utang lain-lain
PT Pembangunan Pariwisata Indonesia (Persero)	Pemegang Saham	Utang lain-lain
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	Badan usaha yang dikendalikan oleh pemegang saham	Utang usaha
Dispenda Badung dan Kota Denpasar	Instansi yang dikendalikan oleh pemegang saham	Utang usaha
Dinas Kehutanan Provinsi Bali	Instansi yang dikendalikan oleh pemegang saham	Utang usaha
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Badan usaha yang dikendalikan oleh Pemerintah	Jasa perbankan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Badan usaha yang dikendalikan oleh Pemerintah	Jasa perbankan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Badan usaha yang dikendalikan oleh Pemerintah	Jasa perbankan
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Badan usaha yang dikendalikan oleh Pemerintah	Jasa perbankan
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Badan usaha yang dikendalikan oleh pemegang saham	Jasa perbankan

Deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pihak yang berelasi menggunakan suku bunga pasar.

Manajemen kunci merupakan komisaris dan direksi Perusahaan. Imbalan yang diberikan masing-masing sebesar Rp4.054.848.750 dan Rp3.668.425.000 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PERJANJIAN, PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI

a. Perjanjian dengan pihak ketiga lainnya

1. Perjanjian dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk terdiri dari:

- a. Sesuai dengan surat perjanjian kontrak No. 002/SPP-JBT/2012 tanggal 8 Februari 2012, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan jasa pemborongan pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa Paket 2, STA 2+970 s.d. STA 5+308 (*Main Road*) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak awal sebesar Rp313.747.274.000. Harga kontrak bersifat *lumpsum* termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 420 hari terhitung sejak tanggal mulai kerja dan masa pemberitahuan cacat mutu adalah 1195 hari terhitung sejak waktu penyelesaian pekerjaan. Jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari harga borongan atau sebesar Rp15.687.363.700 jaminan pemeliharaan tersebut, setengah pertama dari uang retensi dibayarkan setelah BAST pekerjaan telah diterbitkan dan sisanya akan dibayarkan setelah berakhirnya masa pemberitahuan cacat mutu dan telah diterbitkannya BAST pekerjaan dalam masa pemberitahuan cacat mutu (FHO).

Berdasarkan addendum II perjanjian atas pekerjaan pemborongan pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa nomor 002/SPP-JBT/2012 tanggal 23 April 2013, Perusahaan sepakat mengubah jangka waktu kontrak jasa pemborongan paket 2 (PT Waskita Karya (Persero) Tbk), semula 420 hari kalender menjadi 480 hari kalender tanpa mengubah nilai kontrak dihitung sejak Tanggal Mulai Pekerjaan dan Masa Pemberitahuan Cacat Mutu adalah 1195 hari kalender dihitung sejak Waktu Penyelesaian Pekerjaan.

Berdasarkan addendum III perjanjian atas pekerjaan pemborongan pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa nomor 002/SPP-JBT/2012 tanggal 30 Mei 2013, Perusahaan sepakat mengubah nilai kontrak jasa pemborongan paket 2, semula Rp313.747.274.000 menjadi Rp315.069.372.024 termasuk PPN. Atas perubahan tersebut tidak merubah jangka waktu kontrak sebagaimana dinyatakan dalam addendum II 480 hari kalender.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 040.00/BAST/JBT/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013, para pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan dan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa Paket 2 (dua) STA 2+ 970 s/d 5+308 (*Main Road*).

- b. Sesuai dengan surat perjanjian kontrak No. 004/SPP-JBT/2012 tanggal 8 Februari 2012, Perusahaan melakukan kontrak pekerjaan jasa pemborongan pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa Paket 4, STA 6+092 S.D STA 8+122 (*Main Road*), simpang susun benoa, Pelebaran akses pelabuhan sta 0+000 s.d. sta 2+200 dan persimpangan pesanggaran di by pass ngurah rai dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak awal sebesar Rp459.637.148.000. Harga kontrak bersifat *lumpsum* termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 420 hari terhitung sejak tanggal mulai kerja dan masa pemberitahuan cacat mutu adalah 1.195 hari terhitung sejak waktu penyelesaian pekerjaan. Jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari harga borongan atau sebesar Rp22.981.857.400 jaminan pemeliharaan tersebut, setengah pertama dari uang retensi dibayarkan setelah BAST pekerjaan telah diterbitkan dan sisanya akan dibayarkan setelah berakhirnya masa pemberitahuan cacat mutu dan telah diterbitkannya BAST pekerjaan dalam masa pemberitahuan cacat mutu (FHO).

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PERJANJIAN, PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian dengan pihak ketiga lainnya (lanjutan)

1. Perjanjian dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk terdiri dari: (lanjutan)

Berdasarkan addendum I perjanjian atas pekerjaan pemborongan pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa nomor 004/SPP-JBT/2012 tanggal 18 juni 2012, Perusahaan sepakat untuk melakukan pekerjaan pemisahan item tanpa mengubah jangka waktu dan nilai kontrak.

Berdasarkan addendum II perjanjian atas pekerjaan pemborongan pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa nomor 004/SPP-JBT/2012 tanggal 22 November 2012, Perusahaan sepakat untuk melakukan pekerjaan tambah kurang tanpa mengubah jangka waktu dan nilai kontrak.

Berdasarkan addendum III perjanjian atas pekerjaan pemborongan pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa nomor 004/PK-JBT/2012 tanggal 22 April 2013, Perusahaan sepakat mengubah jangka waktu kontrak jasa pemborongan paket 4, semula 420 hari kalender menjadi 473 hari tanpa mengubah nilai kontrak.

Berdasarkan Berita Acara Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa Tentang Pekerjaan Tambah pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa Paket 4 (empat) STA 6+092 S.D. STA 8+122 (*Main Road*), Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Jalan Pelabuhan SAT 0+000 s.d STA 2+200, dan Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai By Pass Nomor: 005/BA/PPK - BALI TOL/P4/2013 Tanggal 16 Mei 2013, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa PT Jasamarga Bali Tol yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jasamarga Bali Tol Nomor: 007,00/SKPTS-JBT/IV/2013 tanggal 2 April 2013, telah melakukan evaluasi terhadap usulan pekerjaan tambah pada pekerjaan tersebut dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan tetap 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) hari atau selesai tanggal 16 Juni 2013.
2. Diusulkan, nilai kontrak mengalami perubahan yaitu semula sebesar Rp459.637.148.000 (termasuk PPN) menjadi sebesar Rp473.973.650.000 (termasuk PPN).
3. Untuk item perubahan kelas mutu beton, Box Culvert PT Indonesia Power dan rambu-rambu tidak terjadi kesepakatan antara penyedia jasa dan papenkon dan akan diproses lebih lanjut oleh penyedia jasa.
4. Dengan diterbitkannya Berita Acara ini, maka Penyedia Jasa berkomitmen untuk tidak mengajukan penambahan biaya kembali terkait item-item pekerjaan yang telah disepakati dalam Berita Acara ini.
5. Untuk item-item pekerjaan yang tidak terjadi kesepakatan antara penyedia Jasa dengan Papenkon akan diproses lebih lanjut oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 038.00/BAST/JBT/VII/2013 tanggal 21 Juni 2013 para pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan dan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa Paket 4 (Empat), STA 6+092 S.D STA 8+122 (*Main Road*), Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan Sta 0+000 S.d 2 +200 dan Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai By Pass.

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PERJANJIAN, PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI (lanjutan)

a. Perjanjian dengan pihak ketiga lainnya (lanjutan)

2. Perjanjian dengan konsultan

1. Perjanjian dengan PT Delameta Bilano

- Berdasarkan Surat Perjanjian kontrak Jasa Pemborongan pekerjaan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan peralatan tol pada jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa No. 005/SPPJBT/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012, Perusahaan melakukan pekerjaan pengadaan dan pemasangan peralatan tol dan pekerjaan pemeliharaan peralatan tol pada pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa dengan nilai kontrak awal sebesar Rp8.994.792.400 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - a. Nilai pekerjaan pengadaan dan pemasangan ("Pekerjaan 1") sebesar Rp6.381.232.000 dengan jangka waktu selama 240 hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - b. Nilai pekerjaan pemeliharaan ("Pekerjaan 2") selama 1826 hari kalender sebesar Rp2.613.560.400.
 - c. Jangka waktu kontrak berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak sampai dengan berakhirnya Jangka waktu pekerjaan pemeliharaan (3 Desember 2017).
- Berdasarkan addendum I tanggal 4 Desember 2012, Perusahaan sepakat merubah jangka waktu Pekerjaan 1 menjadi 180 hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan diterbitkannya berita acara serah terima pengoperasian dan berita acara *provisional hand over* (PHO).
- Berdasarkan addendum II tanggal 30 April 2013, Perusahaan sepakat merubah nilai kontrak dari Rp8.994.792.000 menjadi 11.674.678.400 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nilai Pekerjaan 1 menjadi sebesar Rp8.282.440.100.
 - b. Nilai Pekerjaan 2 menjadi sebesar Rp3.392.238.300.Addendum ini juga merubaha jangka waktu Pekerjaan 1 berubah menjadi 280 hari kalender sejak diterbitkannya SPMK sampai dengan diterbitkannya berita acara serah terima pengoperasian dan berita acara PHO.
- Berdasarkan addendum III tanggal 6 September 2013, Perusahaan sepakat merubah jangka waktu Pekerjaan 1 menjadi 340 hari kalender sejak diterbitkannya SPMK sampai dengan diterbitkannya berita acara serah terima pengoperasian dan berita acara PHO.

b. Kerjasama pengoperasian jalan tol dan layanan lalu lintas dengan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta

Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta melalui Perjanjian Jasa Layanan Transaksi dan Layanan Lalu Lintas pada Jalan Tol Ruas Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa, No. 004/SPKJBT/IV/2013 tanggal 18 April 2013. Lingkup pekerjaan meliputi transaksi dan layanan lalu lintas Jalan Tol Ruas Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dibagi kedalam tiga tahap; Rekrutmen dan pelatihan SDM dan persiapan pra kelaikan operasi selama 43 hari terhitung sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013; Jangka waktu penyusunan sistem dan prosedur pengoperasian adalah selama 2,5 bulan terhitung sejak tanggal 18 April sampai dengan tanggal 30 Juni 2013; Jangka waktu Pengoperasian Layanan Transaksi, Layanan Lalu Lintas Dan Pemeliharaan adalah selama 3 tahun sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016. Nilai Kontrak periode pertama yang terhitung sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp33.401.491.545 dan nilai kontrak untuk tahun 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp523.368.561 dan Rp9.185.819.000.

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PERJANJIAN, PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Perjanjian dengan Pemerintah Provinsi Bali

1. Berdasarkan pada notulen rapat finalisasi perjanjian kerjasama kolaborasi pengelolaan taman hutan raya (TAHURA) Ngurah Rai terkait adanya pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa tanggal 2 Mei 2012, Perusahaan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dengan pokok-pokok kesepakatan:
 - a. Pemerintah Provinsi Bali pada prinsipnya mendukung/menyetujui pemanfaatan/pengelolaan Tahura Ngurah Rai seluas ± 2,3 hektar untuk kepentingan pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa oleh Perusahaan.
 - b. Perusahaan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Bali sebagai kompensasi untuk pemanfaatan/pengelolaan Tahura Ngurah Rai dan pengembangan hutan mangrove lainnya sebesar Rp500.000.000 setiap tahun ditambah eksalasi sesuai besarnya inflasi tahun berjalan dengan batasan maksimum 6,5%.
 - c. Pembayaran kompensasi dimaksud dilakukan sesuai dengan tahun anggaran dengan ketentuan untuk tahun pertama besarnya pembayaran diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan jangka waktu pengoperasian pada tahun yang bersangkutan.
 - d. Untuk pelaksanaan pembangunan ruas jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa selesai tepat waktu, maka persiapan pekerjaan dilapangan dapat dilaksanakan sambil menunggu proses penyelesaian perjanjian Kerjasama Kolaborasi Pengelolaan Tahura Ngurah Rai.
 - e. Hasil Final naskah perjanjian kerjasama selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Dirjen Perlindungan Hutan dan konservasi Alam, Kementerian Kehutanan.
2. Pada tanggal 9 September 2013, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan pemerintah propinsi Bali sehubungan dengan kolaborasi pengelolaan kawasan hutan taman hutan raya (TAHURA) Ngurah Rai dengan no 075/13/PKS/B.PEM/IX/2013 atas pemanfaatan kawasan hutan seluas 5,11 HA. Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun dan dana kompensasi yang harus dibayar ke Pemerintah Provinsi Bali senilai Rp1.000.000.000 yang dibayarkan sesuai tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap I tahun 2013 senilai Rp100.000.000 yang dibayarkan setelah jalan tol beroperasi, yang dibayarkan pada pertengahan triwulan IV tahun 2013.
 - b. Tahap II tahun 2014 senilai Rp200.000.000 yang dibayarkan 2 tahap pada akhir triwulan II dan IV tahun 2014.
 - c. Tahap III tahun 2015 senilai Rp212.000.000 yang dibayarkan 2 tahap pada akhir triwulan II dan IV tahun 2015.
 - d. Tahap III tahun 2016 senilai Rp233.000.000 yang dibayarkan 2 tahap pada akhir triwulan II dan IV tahun 2016.
 - e. Tahap III tahun 2017 senilai Rp255.000.000 yang dibayarkan 2 tahap pada akhir triwulan II dan IV tahun 2016.

d. Perjanjian bagi hasil sewa lahan dengan PT Nusantara Sarana Telekomunikasi

Perusahaan dan PT Nusantara Sarana Telekomunikasi telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Sewa Lahan Jalan Tol ruas Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa. Perjanjian ini dinyatakan di dalam Surat Perjanjian kerjasama No. 008/NST-JBT/SPK/VI/2013 pada tanggal 24 Juni 2013.

PT Nusantara Sarana Telekomunikasi berkewajiban mengembangkan, membangun, mengoperasikan, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur telekomunikasi di sepanjang ruas Jalan Tol. Perusahaan memperoleh bagian sebesar 40% (empat puluh persen) sedangkan PT Nusantara Sarana Telekomunikasi memperoleh bagian sebesar 60% (enam puluh persen) dari keuntungan atas pendapatan komersil dari pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi yang telah terpasang di sepanjang ruas Jalan Tol. Keuntungan yang dimaksud adalah pendapatan sewa bulanan per-tiang dikurangi dengan biaya langsung, yang terdiri dari biaya pemeliharaan dan biaya penggunaan listrik. Jangka waktu kerjasama adalah 3 (tiga) tahun, yaitu hingga tanggal 24 Mei 2016.

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PERJANJIAN, PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d. Perjanjian bagi hasil sewa lahan dengan PT Nusantara Sarana Telekomunikasi (lanjutan)

Telah ditandatangani Addendum I No. 008/NST-JBT/SPK/VI/2013 dimana perjanjian di perpanjang kembali dengan tambahan 3 tahun sehingga perjanjian menjadi berakhir pada tanggal 24 Mei 2019

e. Perjanjian penerapan sistem pembayaran elektronik (*electronic payment*)

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Bank Mandiri No: 007/SPK-JBT/VII/2013 tanggal 27 Juni 2013 sehubungan dengan kerjasama penerapan sistem pembayaran elektronik (*Electronic Payment*) dengan teknologi nir sentuh (*contactless smartcard*). Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun sejak perjanjian ini di tandatangani.

f. Perjanjian pengadaan jasa bank pengumpulan tol

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan BNI dengan No: 006/SPK-JBT/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 sehubungan dengan pengadaan jasa bank pengumpulan tol. Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Nilai pekerjaan ini adalah Rp5.499.350.500 sudah termasuk PPN.

g. Penggantian lahan

1. Berkaitan dengan penggunaan tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III) yang digunakan untuk pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Bena, Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan penggantian lahan untuk AP I dan Pelindo III dengan nilai sebagai berikut:

Nomor	Dimiliki	Area	NJOP (Rp)	Harga penilaian (Rp)
1.	AP I	3.404 m ²	3.581.003.000	29.291.420.000
2.	Pelindo III (darat)	522 m ²	1.227.744.000	2.589.120.000
	Pelindo III (perairan)	41.490 m ²	-	-
Total			4.808.747.000	31.880.540.000

Sampai dengan tanggal 30 Januari 2017, keputusan uang ganti rugi terhadap tanah HPL milik AP I dan Pelindo III masih dalam proses menunggu arahan dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Perusahaan memiliki kewajiban untuk membangun gedung kantor sesuai ketentuan di PPJT. Pembangunan gedung kantor tersebut akan dilakukan di area lahan yang dimiliki oleh Pelindo III. Perusahaan sudah mendapat persetujuan dari Pelindo III untuk menggunakan lahan perairan pelabuhan seluas +/- 5000 m² sesuai Surat No Pj.06/349/P.III tanggal 31 Desember 2014 untuk pembangunan gedung kantor Perusahaan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan masih mengurus ijin-ijin yang berlaku untuk pembangunan gedung kantor.

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PERJANJIAN, PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI (lanjutan)

h. Permasalahan potensi klaim kontraktor

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Waskita) adalah kontraktor untuk paket 2 dan 4 (Catatan 30.a.1 dan 2) jalan tol ruas Nusa Dua - Ngurah Rai – Benoa. Pada tanggal 3 November 2015, kantor hukum Nengah Sujana dan Rekan dalam hal ini bertindak sebagai perwakilan Waskita telah mengirimkan surat somasi kepada Perusahaan terkait klaim atas penambahan pekerjaan untuk paket 2 dan 4 dengan total nilai klaim sebesar Rp54.342.889.980 (tidak termasuk PPN, bunga biaya dan kerugian lainnya). Pada tanggal 10 November 2015, Perusahaan memberikan sanggahan terhadap somasi tersebut secara tertulis, selanjutnya, Perusahaan dan Waskita telah menunjuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai mediator atas kondisi ini. BPKP telah berkonsultasi kepada Lembaga Pengadaan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan LPJKN telah menunjuk Bapak Sarwono Hadjomujadi sebagai tenaga ahli FIDIC (*Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils*).

Pada tanggal 14 Desember 2015, Perusahaan telah menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Denpasar. Berdasarkan surat panggilan tersebut, Perusahaan telah diminta untuk membayar klaim dengan total nilai Rp54.342.889.980, bunga keterlambatan pembayaran sebesar Rp9.633.177.794, biaya pengurusan perkara sebesar Rp600.000.000, bunga atas kerugian material sebesar 2% setiap bulan dan klaim tidak material sebesar Rp30.000.000.000 dan Waskita meminta untuk menyita paket 2 dan 4 dari ruas jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa.

Pada tanggal 20 Juni 2016, Perusahaan telah menerima putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar No. 903/Pdt.G/2015/PN.DPS yang menyatakan bahwa Perusahaan harus membayar klaim kepada Waskita sebesar Rp64.576.067.774 (belum termasuk PPN) dan bunga keterlambatan sebesar 2% setiap bulannya. Pada tanggal 28 Juni 2016, Perusahaan telah menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar.

Pada tanggal 20 Desember 2016, Pengadilan Tinggi Denpasar telah menerima permohonan banding Perusahaan melalui Putusan No.156/PDT/2016/PT.DPS dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.903/Pdt.G/2015/PN.DPS.

31. RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN

Bisnis Perusahaan mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola sistem manajemen risiko.

Perusahaan mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan Perusahaan.

Tujuan Perusahaan dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Perusahaan.

Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko likuiditas, risiko suku bunga dan risiko perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik. Perhatian atas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia dan internasional.

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak dari instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang lain dan investasi tertentu. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

b. Risiko mata uang

Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

Pendapatan, pendanaan dan sebagian besar biaya operasi dari Perusahaan dilakukan dalam mata uang Rupiah oleh karena itu Perusahaan tidak memiliki eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan.

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi untuk memungkinkan Perusahaan dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal Perusahaan. Selain itu Perusahaan juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

d. Risiko suku bunga

Risiko bunga atas arus kas adalah risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Eksposur terhadap suku bunga Perusahaan dinilai rendah apabila ditinjau dari sisi posisi keuangan, namun Perusahaan terus memonitor hal ini untuk meminimalkan dampak negatif terhadap perusahaan. Pinjaman yang dikeluarkan pada tingkat suku bunga variabel mengekspos Perusahaan terhadap arus kas dari risiko tingkat suku bunga.

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

e. Nilai wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan adalah harga permintaan (*ask price*).

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi, apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis dan;
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	31 Desember 2016		31 Desember 2015	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
<u>Aset keuangan</u>				
Kas dan setara kas	126.176.003.244	126.176.003.244	166.864.730.658	166.864.730.658
Dana ditetapkan penggunaannya	54.743.644.606	54.743.644.606	49.486.866.341	49.486.866.341
Piutang usaha	68.818.182	68.818.182	316.800.000	316.800.000
Piutang lain-lain	9.928.774	9.928.774	12.931.262	12.931.262
Pendapatan akan diterima	358.926.027	358.926.027	529.230.247	529.230.247
Total aset keuangan	181.357.320.833	181.357.320.833	217.210.558.508	217.210.558.508
<u>Liabilitas keuangan</u>				
Utang usaha	3.576.451.498	3.576.451.498	4.411.674.963	4.411.674.963
Utang konsultan	-	-	2.745.609.200	2.745.609.200
Utang retensi	36.704.129.762	36.704.129.762	36.587.754.035	36.587.754.035
Beban akrual	9.172.264.913	9.172.264.913	9.208.252.333	9.208.252.333
Provisi pelapisan jalan tol	14.604.206.100	14.604.206.100	-	-
Utang lain-lain	5.299.277.661	5.299.277.661	5.299.277.661	5.299.277.661
Utang bank	1.236.211.631.933	1.236.211.631.933	1.238.639.916.492	1.238.639.916.492
Total liabilitas keuangan	1.305.567.961.867	1.305.567.961.867	1.296.892.484.684	1.296.892.484.684

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Permodalan

Tujuan dari Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko.

Perusahaan menetapkan sejumlah rasio modal sesuai proporsi terhadap risiko. Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Konsisten dengan Perusahaan lain dalam industri, Perusahaan memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Rasio ini dihitung sebagai berikut: utang neto dibagi modal yang disesuaikan. Utang neto merupakan total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas. Modal yang disesuaikan terdiri dari seluruh komponen ekuitas (meliputi modal saham dan saldo laba).

Selama tahun 2016, strategi Perusahaan tidak berubah yaitu mempertahankan rasio utang terhadap sebesar maksimum 5:1. Rasio utang terhadap pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

	2016 (Rp)
Liabilitas jangka pendek	83.748.408.436
Liabilitas jangka panjang	1.280.965.034.928
Total liabilitas	1.364.713.443.364
Total ekuitas	573.616.993.437
Rasio utang terhadap ekuitas	2 : 1

32. TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

Informasi tambahan laporan arus kas terkait aktivitas investasi non-kas adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015
Provisi pelapisan jalan tol	14.604.206.100	-
Amortisasi biaya transaksi atas utang bank	2.553.641.332	-
Penambahan aset takberwujud melalui:		
Utang usaha	1.145.033.000	-
Utang retensi	121.661.000	2.936.142.724
Pendapatan margin konstruksi	11.050.737	63.042.776
Penambahan aset tetap melalui reklasifikasi	426.338.000	-
Total	18.861.930.169	2.999.185.500

PT JASAMARGA BALI TOL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan berjalan diungkapkan dibawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

- a. Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan. Amandemen ini mengklarifikasi, bukan mengubah secara signifikan, persyaratan PSAK 1, antara lain, mengklasifikasi mengenai materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.

34. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 30 Januari 2017.



JASAMARGA BALI TOL
Highway Corporation

Kawasan Ikat Plaza

Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai, No.505
Pemogan 80221, Denpasar, Bali, Indonesia
Telp. : +62 361 725326
Faxs. : +62 361 725327
Hotline Service : +62 361 729999